



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

LPPD





KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LPPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan daerah tercinta.

Sekian dan Terima Kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepulauan Selayar, 27 Maret 2026

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR, BAGAN DAN GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.1.1. Penjelasan Umum	1
A. Dasar Hukum	1
B. Kondisi Geografis Daerah	6
C. Perkembangan Penduduk	23
D. Kecamatan, Desa dan Kelurahan	26
E. Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil	29
F. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	35
I.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	39
A. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Pemerintah Daerah	39
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	54
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah	58
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahun 2025	61
I.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	61
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
II.1. Capaian Kinerja Makro	68
II.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	69
II.2.1. Indikator Kinerja Kunci	69
II.2.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	87
II.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	90
II.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	90
II.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025	92



II.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	97
II.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya Dan Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	97
II.3.5. Analisis Evektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	138
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	145
3.1. Tugas Pembantuan Dari Pusat Dan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Urusan Pemerintahan	145
3.2. Permasalahan	152
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	153
A. Bidang Urusan Pendidikan	153
B. Bidang Urusan Kesehatan	159
C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum	190
D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	197
E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	203
F. Bidang Urusan Sosial	253
G. Program dan Kegiatan	267
BAB V PENUTUP	281



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar	8
Tabel 1.2	Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten di Kabupaten Kepulauan Selayar	9
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Per Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar	23
Tabel 1.4	Sebaran Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025	24
Tabel 1.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022-2024	26
Tabel 1.6	Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar	27
Tabel 1.7	Unit Kerja Perangkat Daerah dan Tipe Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	30
Tabel 1.8	Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan	32
Tabel 1.9	Jumlah PNS Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin	32
Tabel 1.10	Jumlah ASN Jabatan Fungsional dan PPPK berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	33
Tabel 1.11	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Kepangkatan	33
Tabel 1.12	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan	34
Tabel 1.13	Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2025	35
Tabel 1.14	Realisasi Dana Perimbangan Daerah 2025.....	36
Tabel 1.15	Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah.....	37
Tabel 1.16	Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja	37
Tabel 1.17	Realisasi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan.....	39
Tabel 1.18	Program Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025	67
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Pertanian	151
Tabel 4.1	Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	154
Tabel 4.2	Realisasi SPM Bidang Pendidikan	156



Tabel 4.3	Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2025.....	158
Tabel 4.4	Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan.....	160
Tabel 4.5	Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2025	173
Tabel 4.6	Jumlah Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Tahun 2025.....	174
Tabel 4.7	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2025	174
Tabel 4.8	Realisasi SPM Bidang Pendidikan	175
Tabel 4.9	Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum.....	190
Tabel 4.10	Jumlah Personil ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan	192
Tabel 4.11	Jumlah Personil Non ASN Berdasarkan Pendidikan	193
Tabel 4.12	Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum	193
Tabel 4.13	Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	198
Tabel 4.14	Jumlah Personil ASN Berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Pangkat	198
Tabel 4.15	Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat	200
Tabel 4.16	Target Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum	204
Tabel 4.17	Jumlah Personil Aktif Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2025	207
Tabel 4.18	Personil Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Berdasarkan Tingkat Pendidikan	207
Tabel 4.19	Realisasi SPM Bidang Trantibum	208
Tabel 4.20	Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan	213
Tabel 4.21	Data Pegawai BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 ..	226
Tabel 4.22	Realisasi SPM Sub Urusan Kebencanaan	228
Tabel 4.23	Target Pencapaian SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran	249
Tabel 4.24	Personil Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Berdasarkan Tingkat Pendidikan	251



Tabel 4.25	Sarana Realisasi SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran	251
Tabel 4.26	Target Pencapaian SPM Bidang Sosial	254
Tabel 4.27	Realisasi SPM Bidang Sosial	259
Tabel 4.28	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025	267
Tabel 4.29	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025.....	272
Tabel 4.30	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025	273
Tabel 4.31	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025	274
Tabel 4.32	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2025	275
Tabel 4.33	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2025	278
Tabel 4.34	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran Tahun 2025	279
Tabel 4.35	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2025	280



**DAFTAR
GAMBAR, DIAGRAM DAN GRAFIK**

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Administratif Kabupaten Kepulauan Selayar.....	6
Diagram 1.1 Luas dan Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar	8
Gambar 1.2 Peta Jaringan Transportasi Darat	18
Gambar 1.3 Peta Jaringan Transportasi Laut	19
Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	25



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

I.1.1. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Adapun sistematika penulisan dalam LPPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu : Bab I : Pendahuluan; Bab II : Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Bab III : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan; Bab IV : Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan Bab V : Penutup.

A. DASAR HUKUM

Adapun Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas



Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);



6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 139);
24. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 876);

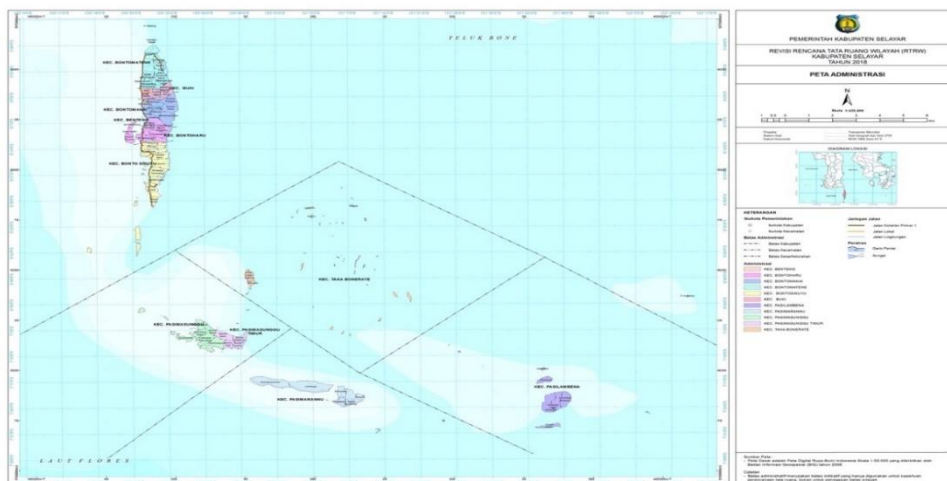


25. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 883).

B. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Bira, sehingga Selayar sangat potensial dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 (Sembilan) bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Gambar 1.1
Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar



Secara astronomis, Kepulauan Selayar terletak diantara 5°40' - 7°35' Lintang Selatan dan 120°15' - 122°30' Bujur Timur, dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba (Selat Bira);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;



- Sebelah Selatan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur.

a) Luas Wilayah

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km² dimana luas daratan 1.357,03 km², sedangkan luas laut 9.146,66 km², dengan panjang garis pantai 670 km. Secara administratif, pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jamea, Kecamatan Pasimasunggu Timur ibukotanya Ujung Jamea, Kecamatan Taka Bonerate ibukotanya Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena ibukotanya Kalaotoa. Adapun 6 kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng ibukotanya Benteng, Kecamatan Bontoharu ibukotanya Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu ibukotanya Pariangan, Kecamatan Bontomanai ibukotanya Polebunging, Kecamatan Buki ibukotanya Buki dan Kecamatan Bontomatene ibukotanya Batangmata.

Berdasarkan luas wilayahnya, Kecamatan Bontosikuyu merupakan kecamatan yang paling luas yakni 248,22 km², disusul Kecamatan Pasimarannu yang meliputi pulau Bonerate dan Pulau Lambego (Kalao) dengan luas 195,33 km². Selanjutnya Kecamatan Bontomatene yang terletak di ujung utara Pulau Selayar seluas 193,05 km². Sementara Kecamatan Benteng yang juga melingkupi ibukota kabupaten tercatat sebagai kecamatan terkecil dengan luas 24,63 km². Berikut adalah rincian luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar.



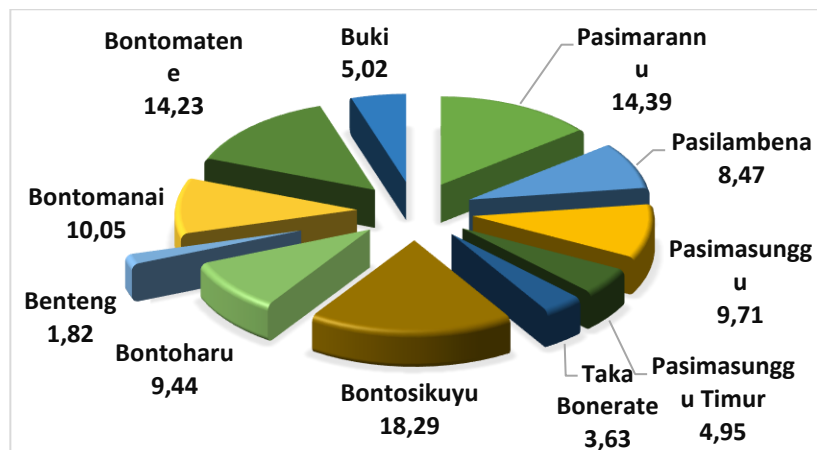
Tabel 1.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	Pasimarannu	195,33	14,39
2	Pasilambena	114,88	8,47
3	Pasimasunggu	131,80	9,71
4	Pasimasunggu Timur	67,14	4,95
5	Taka Bonerate	49,30	3,63
6	Bontosikuyu	248,22	18,29
7	Bontoharu	128,12	9,44
8	Benteng	24,63	1,82
9	Bontomanai	136,42	10,05
10	Bontomatene	193,05	14,23
11	Buki	68,14	5,02

Diagram 1.1 ditampilkan persentase luas wilayah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa kecamatan Takabonerate merupakan kecamatan dengan persentase luas terbesar sebesar 16% disusul kecamatan Bontosikuyu dan Kecamatan Pasimarannu, masing – masing sebesar 15% dan 13%.

Diagram 1.1
Luas dan Persentase Luas Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar



Ditinjau dari jarak ibukotanya ke ibukota kabupaten, jarak kecamatan-kecamatan yang ada sangat bervariasi, dari yang dekat, jauh dan sangat jauh. Kecamatan terdekat tentu saja adalah



Kecamatan Benteng yang melingkupi ibukota kabupaten disusul Kecamatan Bontoharu yang berjarak 3 (tiga) kilometer sedangkan yang terjauh adalah Kecamatan Pasilambena yang berjarak kurang lebih 193 km dengan waktu tempuh terkadang sampai sehari penuh dengan menggunakan perahu motor. Berikut rincian jarak dari ibukota setiap kecamatan ke ibukota kabupaten :

Tabel 1.2
Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten
di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
1	Pasimarannu	Bonerate	±140
2	Pasilambena	Latokdok	±193
3	Pasimasunggu	Benteng Jampea	±85
4	Pasimasunggu Timur	Ujung Jampea	±96
5	Taka Bonerate	Batang	±75
6	Bontosikuyu	Pariangan	±18
7	Bontoharu	Matalalang	±3
8	Benteng	Benteng	0
9	Bontomanai	Polebungin	±18
10	Bontomatene	Batangmata	±27
11	Buki	Buki	±19

Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan tersebut dilengkapi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Bira, sehingga Selayar sangat potensial dikembangkan sebagai Pusat Distribusi



Logistik 9 (Sembilan) bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Lebih jauh, pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar didukung pula oleh potensi sumberdaya alam terutama sektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Takabonerate.

b) Topografi

Fisiografi Pulau Selayar berdasarkan kondisi batuan dan kontrol struktur geologi penyusunnya maka dapat dikelompokkan menjadi tiga satuan morfologi, yaitu:

- a. Satuan morfologi daratan alluvial pantai.
- b. Satuan morfologi perbukitan bergelombang.
- c. Satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal.

Satuan morfologi daratan alluvial pantai menempati daratan sempit di pantai barat Pulau Selayar yang terbentuk oleh endapan pasir, pantai lempungan, kerikil yang bersifat lepas dan lapisan tipis batu gamping koral. Sedangkan satuan morfologi perbukitan gelombang dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal secara dominan menempati bagian barat dengan ketinggian 356-657 meter di atas permukaan laut. Bentang alam yang tinggi disini diantaranya puncak Gunung Bontoharu (435 m), Gunung Bontokali (353 m), serta Gunung Bontosikuyu (607 m). Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil gunung api berupa breksi, lafa, konglomerat, tufa dengan batuan dengan selingan batuan sedimen laut.

Persentase kelas kelerengan Pulau Selayar umumnya didominasi oleh lereng landai (2-15%), dan semakin ke Selatan kelerengan tersebut semakin besar. Kecamatan Bontosikuyu mempunyai kelas sangat terjal (>40%) mencapai 43,97% terhadap luas wilayah kecamatan, sedangkan di Kecamatan Bontoharu lereng



sangat terjal mencapai 33,12%, akan tetapi kebalikannya di Kecamatan Bontomatene dimana lereng sangat terjal hanya mencapai 4,21% dari luas wilayah kecamatan.

c) Geologi

Secara umum kondisi geologi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu geologi Pulau Selayar dan geologi pulau-pulau kecil yang termasuk wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar. Geologi Pulau Selayar masih berhubungan dengan geologi Sulawesi Selatan bagian Selatan. Sedang geologi pulau-pulau kecil di kabupaten ini, yang terletak di Laut Flores, kemungkinan berhubungan dengan geologi Pulau Buton.

Batuan tertua yang menyusun Pulau Selayar adalah batuan gunung api Formasi Camba yang berumur Miosen Tengah hingga Miosen Akhir. Bagian bawah dari Formasi Camba tersusun oleh breksi, lava, konglomerat dan tufa. Di atasnya dijumpai batuan sedimen laut yang berselingan dengan batuan gunung api. Batuan-batuan Formasi Camba dijumpai di bagian tengah pulau dengan arah penyebaran utara-selatan. Di atas Formasi Camba dijumpai Formasi Walanae yang menjemari dengan batu gamping Selayar. Formasi Walanae terdiri dari batu pasir yang berselingan dengan batu lanau, tufa, napal, batu lempung, konglomerat, dan batu gamping. Formasi ini berumur dari Miosen Tengah hingga Pliosen. Penyebaran batuan Formasi Walanae memanjang di bagian barat Pulau Selayar dari utara ke selatan. Batu gamping Selayar penyebarannya terutama di bagian utara dan barat, dan terdiri dari batu gamping pejal, batu gamping koral, dan kalkarenit dengan sisipan napal dan batu pasir gampingan.

Kondisi geologi pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya disusun oleh terumbu karang. Beberapa pulau disusun oleh batuan beku yang berasal dari kerak kontinen



seperti halnya Pulau Buton. Pulau-pulau ini adalah Pulau Jampea yang disusun oleh batuan beku granit, Pulau Kayuadi bagian utara disusun oleh batuan beku yang bersifat menengah. Batuan-batuan yang menyusun Pulau Selayar pada umumnya terlihat lemah sampai sedang dengan kemiringan batuan ke arah barat dan jurus per lapisannya relatif utara-selatan.

d) Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologis Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi pulau ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Pulau Selayar, yang pada umumnya debit air sungai-sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai dan sistem sungainya. Akibat sistem pengaliran langsung ke laut dan kondisi batuan yang berkelurusan (*straight*) rendah, serta curah hujan yang tidak mendukung sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, sehingga besaran debit air sungai-sungai di Selayar sulit diukur. Berdasarkan susunan stratigrafi dan struktur geologi, maka pada wilayah bagian tengah (yang merupakan sebaran endapan formasi Walanae) merupakan suatu formasi lapisan batuan pembawa air yang bersifat tertekan (*aresian aquifes*) dengan debit air kecil sampai sedang (kurang dari 1-3 liter/detik). Air tanah bebas (*watertable groundwater*) dijumpai pada endapan alluvial dan endapan pantai, endapan formasi Walanae serta pada lembah-lembah yang ditempati oleh endapan batuan formasi Camba. Tingkat kedalaman air tanah sangat bervariasi tergantung pada keadaan alam dan jenis lapisan batuan. Pada endapan alluvial dan endapan pantai, tingkat kedalaman muka air tanahnya berkisar antara 5 – 6 meter, dan sangat dipengaruhi oleh intrusi air laut. Air tanah bebas ini dapat dijumpai pada daerah yang ditutupi oleh endapan batu gamping Selayar dari formasi Walanae berupa aliran tanah terbatas rekahan ataupun ruang akibat pelarutan yang membentuk sungai bawah tanah. Sumber air yang ada sangat



terbatas, sehingga hampir keseluruhannya telah dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan penduduk. Indikasi keberadaan mata air tersebut terdapat di beberapa wilayah antara lain: Batangmata Sapo, Lembang Lembang, Bonto dan sebelah timur Tile-tile, dengan besaran debit air relatif kecil sampai sedang (1 – 4 liter/detik).

Sistem aliran hidrogeologi di Pulau Selayar menunjukkan adanya pergerakan air, baik air permukaan maupun air tanah menuju ke kawasan perairan laut. Pada daerah yang ditempati satuan batu gamping, aliran air tanah terbatas pada rekahan ataupun ruang akibat pelarutan membentuk sungai-sungai bawah tanah. Ini dapat dijumpai di sekitar wilayah Tajuiya, Tamasongia dengan debit air yang bervariasi. Keterbatasan sumber air akibat cakupan luas DAS (Daerah Aliran Sungai) yang relatif sempit, struktur batuan permukaan dan *catchment area* sangat sempit menjadi tolak ukur untuk menggali potensi air. Oleh karena itu arahan penggunaan lahan pada kawasan potensial resapan air dibatasi untuk kawasan budidaya dan penggalian sumber air tanah khususnya kawasan Utara.

e) Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Pulau Sulawesi. Kondisi keterpisahan tersebut diperparah dengan infrastruktur (aksesibilitas) yang masih terbatas, dan ini sangat berpengaruh terhadap laju pemeratan pembangunan karena transportasi ekonomi tidak efisien. Namun demikian dalam perspektif pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kondisi tersebut memiliki nilai strategis.

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-timur NKRI dan berada di antara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang



mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Selayar, sehingga Selayar sangat potensial dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lebih jauh lagi pengembangan Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya didukung pula oleh potensi sumberdaya alam, terutama di sektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Laut Takabonerate.

Terkait dengan kondisi tersebut serta dalam rangka pemerataan pembangunan KTI, kawasan utara Pulau Selayar dinilai memiliki peranan penting dalam mentransformasikan Kabupaten Kepulauan Selayar, dari salah satu daerah tertinggal di KTI menjadi daerah yang maju dan mandiri. Keadaan tersebut dapat dimulai dengan mengembangkan kawasan utara Pulau Selayar sebagai Industri Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, telah ditetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administrative Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

- a. Kawasan Pengembangan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi;
- c. Kawasan Wisata Bahari Takabonerate yang merupakan KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah dan posisi geografis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perda RTRW



Nomor 5 tahun 2012 telah ditetapkan pengembangan kawasan sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata
2. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
3. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional

Secara lebih spesifik terkait pengembangan Kawasan Industri Perikanan Terpadu, pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039, pada Paragraf 10 Zona Industri Pasal 23 angka (2) huruf b disebutkan KPU-ID-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Industri Perikanan Terpadu di Kabupaten Kepulauan Selayar yang selanjutnya disebut KPU-ID-PI-01. Selanjutnya melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8/Q.02/PTSP/2019 tentang Rekomendasi Kesesuaian RTRW Provinsi pada Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, mengizinkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pengembangan Kawasan Industri Perikanan Terpadu dengan luas kawasan 51 Ha, dan lokasi kawasan di Hangkoang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Sebelumnya telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 590/XI/Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Perikanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar. Lokasi Kawasan Industri Perikanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di Hangkoang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu dengan luas sekitar 51 Ha (Lima puluh satu hektar) dengan titik



koordinat pada posisi S : 06 derajat 24'04.9" dan 120 derajat 29'24,9".

Sehingga atas dasar arahan pengembangan dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar 2012-2032, maupun Surat Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 590/XI/Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Perikanan Terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar serta Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 8/Q.02/PTSP/2019 tentang Rekomendasi Kesesuaian RTRW Provinsi pada Kawasan Strategis Provinsi dan Lintas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 maka ditetapkan kembali 3 agenda strategis dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan peran ekonomi daerah terhadap regional dan nasional, yaitu :

- a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang direncanakan di Pulau Pasi Gusung dan sekitarnya Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, dan Kecamatan Taka Bonerate;
- b. Pusat Distribusi Logistik (barang dan jasa) Indonesia yang direncanakan di Kecamatan Bontomatene, tepatnya ujung Utara Pulau Selayar ; dan
- c. Pengembangan Industri Perikanan Terpadu yang direncanakan berlokasi di Pattumbukang Kecamatan Bontosikuyu tepatnya di ujung Selatan Pulau Selayar;

Kawasan Pengembangan tersebut sebagai bentuk persiapan implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan investasi Kab. Kepulauan Selayar. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya diperkirakan akan berdampak secara regional terhadap kabupaten tetangga di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kawasan Timur Indonesia secara umum. Pengembangan kawasan ini sebagai implikasi kebijakan Pemerintah melalui Strategi



Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Inpres No.5/2008) dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kepmendagri No.19/2008) untuk percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI.

Pembentukan kawasan yang dapat berfungsi sebagai katalisator dalam mempercepat transaksi ekonomi terutama dalam meningkatkan arus barang dan jasa adalah salah satu solusi yang ditawarkan dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut di atas. Kawasan utara pulau Selayar sebagai Kawasan Bandar Niaga KTI pada hakikatnya akan berfungsi seperti "Batam"-nya KTI agar masalah riil saat ini yakni minimnya pasokan barang yang berimbas kepada kenaikan harga dan inflasi yang penyebab utamanya adalah sistem logistik yang tidak efektif dan efisien di KTI dapat segera teratasi.

f) Rencana Struktur Ruang

Struktur ruang merupakan suatu susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang sesuai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 meliputi pusat-pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya.

a. Pusat-pusat kegiatan terdiri dari:

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi kawasan perkotaan Benteng dan kawasan perkotaan Pamatata.
- Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi kawasan perkotaan Kayuadi dan kawasan perkotaan Bonerate.
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi kawasan perkotaan Matalalang, kawasan perkotaan Polebungin, kawasan perkotaan Batangmata, dan kawasan perkotaan Buki, kawasan perkotaan Benteng Jampea, dan kawasan perkotaan Latokdok.
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Desa

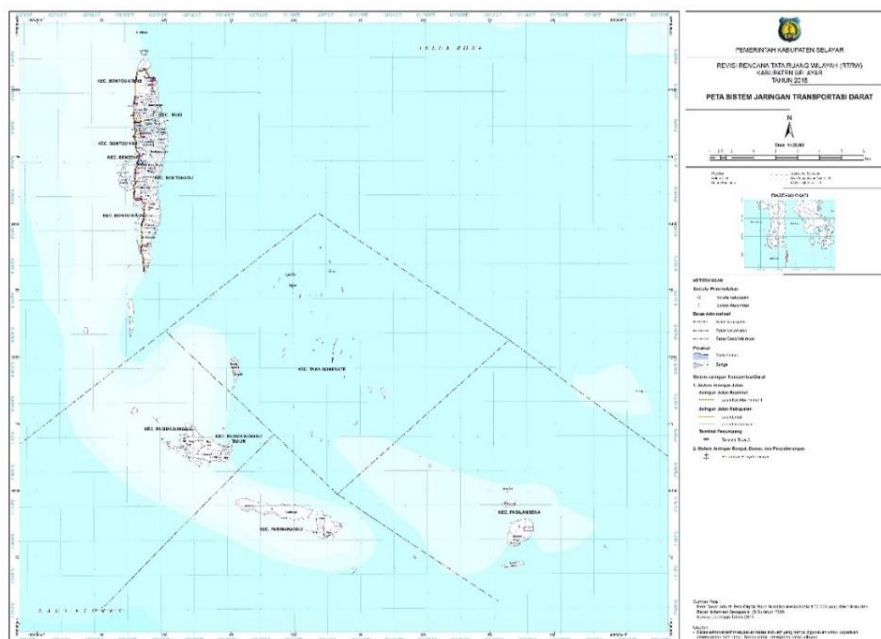


Bontosunggu, Desa Barugaiya, Desa Appatanah, Desa Lowa, Desa Lantibongan, Desa Onto, Desa Jinato, Desa Tambuna, Desa Rajuni, Desa Karumpa dan Desa Pulo Madu.

b. Sistem Jaringan Prasarana Utama terdiri dari:

- Sistem jaringan transportasi darat yang terdiri dari:
 1. Sistem jaringan jalan yang terdiri dari jaringan jalan kolektor (K1), Jaringan jalan kolektor primer (K4) dan rencana pengembangan jaringan jalan sekunder di kawasan perkotaan dan jaringan jalan lokal kabupaten.
 2. Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Gambar 1.2.
Peta Jaringan Transportasi Darat

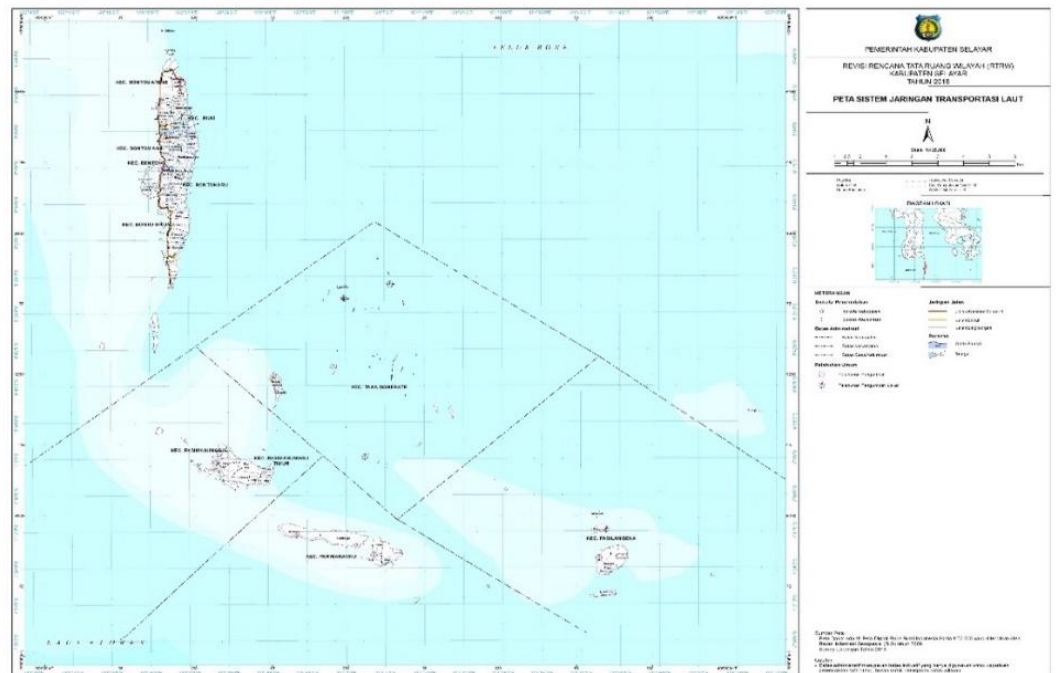


- Sistem jaringan transportasi laut yang terdiri dari:
 1. Tatanan kepelabuhanan yaitu pelabuhan pengumpul (pelabuhan Benteng dan pelabuhan Pamatata) dan pelabuhan pengumpan.



2. Alur pelayaran yaitu alur pelayaran lokal, regional dan nasional.

Gambar 1.3.
Peta Jaringan Transportasi Laut



Sumber Data: RTRW Kab. Kepulauan Selayar

c. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya terdiri dari sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

g) Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis Kabupaten Kepulauan Selayar yang peruntukannya kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari kawasan industri Pamatata, kawasan sentra pertanian tanaman pangan di Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur,



kawasan budidaya ikan karang di Kecamatan Bontoharu dan Takabonerate, kawasan pariwisata terpadu, kawasan perkotaan Kayuadi dan kawasan perkotaan Bonerate. Sedangkan kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan lingkungan hidup merupakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang ditetapkan di Kecamatan Bontomanai, Bontomatene, Bontoharu, Takabonerate, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Pasimarannu dan Pasilambena.

h) Kawasan Kelautan dan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terbagi atas kawasan peruntukan perikanan tangkap, budidaya perikanan, pengolahan ikan dan pelabuhan pendaratan ikan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Buki, Bontomanai, Bontoharu, Bontosikuyu, Takabonerate, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, Pasimarannu dan Pasilambena.

Untuk peruntukan budidaya perikanan terdiri atas budidaya perikanan air payau komoditas udang dan bandeng yang ditetapkan pada sebagian wilayah Bontosikuyu, sebagian wilayah Bontoharu, sebagian wilayah Pasimasunggu dan sebagian wilayah Pasimasunggu Timur. Kemudian kawasan budidaya perikanan air laut komoditas rumput laut pada sebagian wilayah Kecamatan Buki, sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu dan sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena.

Untuk kawasan pengolahan ikan ditetapkan akan dikembangkan di Kecamatan Benteng dan Bontoharu, sedangkan untuk pelabuhan pendaratan ikan ditetapkan akan dikembangkan di PPI Bonehalang Kecamatan Benteng.



i) Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terbagi atas kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luasan 4.057 hektar dan lahan kering dengan luasan kurang lebih 518 hektar. Kawasan peruntukan lahan basah ditetapkan di sebagian wilayah Bontomatene, sebagian wilayah Buki, sebagian wilayah Bontomanai, sebagian wilayah Bontoharu dan sebagian wilayah Bontosikuyu. Sedangkan kawasan peruntukan lahan kering ditetapkan di sebagian wilayah Pasimarannu dan sebagian wilayah Pasimasunggu Timur.

Kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan dengan luasan 1.984 hektar ditetapkan di sebagian wilayah kecamatan se Kabupaten Kepulauan Selayar dan untuk komoditas sayur-sayuran dengan luasan 1.928 hektar ditetapkan di sebagian wilayah Bontomatene, sebagian wilayah Buki, sebagian wilayah Bontomanai, sebagian wilayah Benteng, sebagian wilayah Bontoharu, sebagian wilayah Takabonerate, sebagian wilayah Pasimasunggu, sebagian wilayah Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Pasimarannu dan sebagian wilayah Pasilambena.

j) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata budaya ditetapkan pada Gong Nekara, Meriam Kuno dan Jangkar Raksasa di Kecamatan Bontoharu, Perkampungan Tua dan Mesjid Tua Gantarang di Kecamatan Bontomanai. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas: Taman Nasional Takabonerate di perairan Kecamatan Takabonerate; wisata bahari di perairan Pulau Tambolongan, Polassi dan Bahuluang di Kecamatan Bontosikuyu dan Pulau Kayuadi di Kecamatan Takabonerate; dan wisata pantai di kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Takabonerate dan Kecamatan Pasilambena. Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas: kawasan agrowisata di Kecamatan Bontomatene



dan Kecamatan Bontomanai; dan kawasan pariwisata terpadu di Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontoharu.

k) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan wilayah pertambangan terdiri atas wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara dan wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam, meliputi besi, mangaan, seng, emas, dan tembaga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena, sebagian wilayah Kecamatan Takabonerate, sebagian wilayah Kecamatan Buki, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu. Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam, meliputi fosfat dan dolomite ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, sebagian wilayah Kecamatan Pasimasunggu, sebagian wilayah Pasimasunggu Timur, sebagian wilayah Kecamatan Pasilambena, dan sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu. Dan wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa batu gamping, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah liat, pasir laut, urukan tanah setempat, batu gunung, batu kali, kerikil, dan granit ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu, dan sebagian wilayah Kecamatan Benteng.

Wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontosikuyu.



1) Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri besar terdiri atas kawasan industri Pamatata yang merupakan kawasan pengolahan dan penyimpanan minyak bumi ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomatene, dan kawasan industri perikanan terpadu ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Benteng dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu. Kawasan peruntukan industri sedang terdiri atas kawasan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontomanai, sebagian wilayah Kecamatan Benteng, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoharu, dan kawasan industri pembuatan kapal dan peralatan rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Benteng dan sebagian wilayah Kecamatan Pasimarannu.

C. Perkembangan Penduduk

a. Kepadatan Penduduk Geografis

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Per Wilayah Kecamatan
di Kabupaten Kepulauan Selayar

KECAMATAN	TAHUN			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
Pasimarannu	10.846	10.915	11.065	11.167
Pasilambena	8.465	8.578	8.722	8.815
Pasimasunggu	9.179	9.261	9.433	9.520
Taka Bonerate	14.209	14.774	15.101	15.251
Pasimasunggu Timur	8.072	8.099	8.218	8.230
Bontosikuyu	15.918	16.030	16.164	16.182
Bontoharu	15.031	15.325	15.489	15.586



KECAMATAN	TAHUN			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
Benteng	24.585	24.514	24.378	24.536
Bontomanai	14.148	14.119	14.079	14.052
Bontomatene	13.557	13.565	13.522	13.391
Buki	6.871	6.920	6.925	6.850
JUMLAH	140.881	142.100	143.096	143.580

Sumber : Disdukcapil Kep. Selayar 2026

b. Sebaran Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

Guna melakukan kebijakan yang berprespektif gender maka sangat diperlukan pengetahuan mengenai persebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin. Kebijakan pada persebaran penduduk yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sudah seharusnya berbeda dengan persebaran yang didominasi salah satunya. Dengan demikian kebijakan yang diambil lebih efektif. Adapun gambaran sebaran penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jenis kelamin diurai pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Sebaran Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		(JIWA)	%	(JIWA)	%	(JIWA)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BENTENG	11.893	8,28	12.643	8,81	24.536	17,09
2	BONTOHARU	7.740	5,39	7.846	5,46	15.586	10,86
3	BONTOMATENE	6.424	4,47	6.967	4,85	13.391	9,33
4	BONTOMANAI	7.003	4,88	7.049	4,91	14.052	9,79
5	BONTOSIKUYU	8.031	5,59	8.151	5,68	16.182	11,27
6	PASIMASUNGGU	4.704	3,28	4.816	3,35	9.520	6,63
7	PASIMARANNU	5.495	3,83	5.672	3,95	11.167	7,78

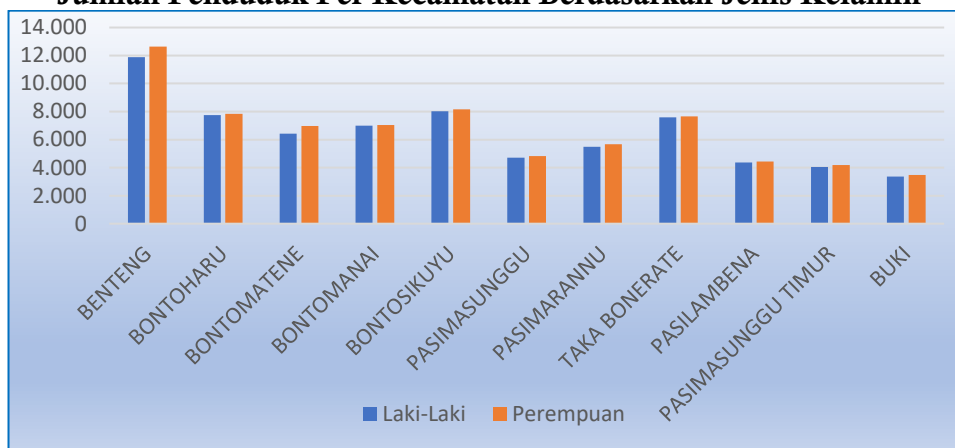


LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

8	TAKA BONERATE	7.591	5,29	7.660	5,34	15.251	10,62
9	PASILAMBENA	4.368	3,04	4.447	3,10	8.815	6,14
10	PASIMASUNGGU TIMUR	4.042	2,82	4.188	2,92	8.230	5,73
11	BUKI	3.368	2,35	3.482	2,43	6.850	4,77
JUMLAH TOTAL		70.659	49,21	72.921	50,79	143.580	100,00

Sumber : Dukcapil Kep. Selayar 2025

Grafik 1.1.
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Dukcapil Kep. Selayar 2026

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa penyebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak merata. Daerah yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki terbanyak di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu di Kecamatan Benteng sebanyak 11.893 jiwa, Disusul Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 8.031 jiwa, dan Kecamatan Bontoharu sebanyak 7.740 jiwa. Demikian juga halnya, jumlah penduduk perempuan yang terbanyak di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar masih pada tiga kecamatan yang sama, yaitu di Kecamatan Benteng sebanyak 12.643 jiwa, kemudian Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 8.151 jiwa, dan Kecamatan Bontoharu sebanyak 7.846 jiwa. Sementara itu, wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk laki-laki terendah adalah Kecamatan Buki



sebanyak 3.368 jiwa dan kecamatan dengan jumlah penduduk perempuan terendah adalah Kecamatan Buki sebanyak 3,482 jiwa.

c. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar tumbuh 0,03% pada tahun 2025, Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 sebanyak 143.096 jiwa dan tahun 2025 sebanyak 143.580 jiwa (Tabel 1.7), terdiri dari laki-laki sebanyak 70.659 jiwa dan perempuan sebanyak 72.921 jiwa.

Tabel 1.8.
Laju Pertumbuhan Penduduk
Tahun 2023-2024

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN	
		2024	2025
1. Jumlah Penduduk	Jiwa	143.096	143.580
2. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,86	0,03
3. Kepadatan Penduduk	jiwa per km2	105	106

Sumber : DUKCAPIL Kepulauan Selayar 2026

D. KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN

Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) Kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan ibukota Ujung Jampea, Kecamatan Taka Bonerate dengan ibukota Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena dengan ibukota Kalaotoa. Sedangkan 6 (enam) kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng dengan ibukota Benteng, Kecamatan Bontoharu dengan ibukota Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu dengan ibukota Pariangan,



Kecamatan Bontomanai dengan ibukota Polebunging, Kecamatan Buki dengan ibukota Buki dan Kecamatan Bontomatene dengan ibukota Batangmata. Berikut adalah rincian kecamatan, desa dan kelurahan:

Tabel 1.6.
Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Ket
1	Bontomatene	Desa Barat Lambongan Desa Bontona Saluk Desa Pamatata Desa Onto Desa Maharayya Desa Tanete Desa Menara Indah Desa Bungaiya Desa Kayu Bauk Desa Tamalanrea Kelurahan Batangmata Kelurahan Batangmata Sapo	
2	Buki	Desa Buki Desa Lalang Bata Desa Balang Butung Desa Kohala Desa Bontolempangan Desa Mekar Indah Desa Buki Timur	
3	Bontomanai	Desa Polebungin Desa Mare-Mare Desa Bonea Makmur Desa Jambuiya Desa Bontomarannu Desa Bonea Timur Desa Barugaiya Desa Parak Desa Bontokoraang Desa Kaburu	
4	Benteng	Kelurahan Benteng Kelurahan Benteng Selatan Kelurahan Benteng Utara	
5	Bontoharu	Desa Bontolebang Desa Bontosunggu Desa Botoborusu Desa Bontotangnga Desa Kahu-Kahu	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

		Desa Kalepadang Kelurahan Bontobangung Kelurahan Putabangung	
6	Bontosikuyu	Desa Harapan Desa Lowa Desa Appatanah Desa Laiyolo Baru Desa Lantibongan Desa Patilereng Desa Patikarya Desa Binanga Sombaiya Desa Laiyolo Desa Tambolongan Desa Polassi Desa Khusus Bahuluang	
7	Takabonerate	Desa Kayuadi Desa Jinato Desa Tarupa Desa Nyiur Indah Desa Latondu Desa Rajuni Desa Batang Desa Tambuna Desa Khusus Pasitallu	
8	Pasimasunggu	Desa Kembangragi Desa Maminasa Desa Tanamalala Desa Labuang Pamajang Desa Massungke Desa Bontosaile Desa Teluk Kampe	
9	Pasimasunggu Timur	Desa Bontobulaeng Desa Bontobaru Desa Bontomalling Desa Lembang Baji Desa Bontojati Desa Ujung	
10	Pasimarannu	Desa Bonea Desa Batu Bingkung Desa Lambego Desa Majapahit Desa Bonerate Desa Komba-Komba	



		Desa Sambali Desa Lamantu	
11	Pasilambena	Desa Kalaotoa Desa Lembang Matene Desa Garaupa Desa Pulo Madu Desa Karumpa Desa Garaupa Raya	

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Setda

E. PERANGKAT DAERAH, UNIT PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka elemen Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah;
- e. Badan Daerah; dan
- f. Kecamatan.



2. Unit Kerja Perangkat Daerah

Jumlah Unit Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 37, yang terdiri dari 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 19 Dinas, 4 Badan, 11 Kecamatan, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.7.
Unit Kerja Perangkat Daerah dan Tipe
Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	NAMA UNIT KERJA	TIPE
	A. Sekretariat Daerah	A
	B. Sekretariat DPRD	C
	C. Inspektorat Daerah	A
	D. DINAS DAERAH	
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	A
2	Dinas Kesehatan	A
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	A
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	B
5	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A
6	Dinas Sosial	B
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	A
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	A
9	Dinas Lingkungan Hidup	A
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	B
12	Dinas Perhubungan	A
13	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	A



14	Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	A
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B
17	Dinas Perikanan	A
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	A
19	Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan	A
E. BADAN DAERAH		
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	A
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	A
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-
F. KECAMATAN		
1	Pasilambena	A
2	Pasimarannu	A
3	Pasimasunggu Timur	A
4	Pasimasunggu	A
5	Taka Bonerate	A
6	Bontosikuyu	A
7	Bontoharu	A
8	Benteng	A
9	Bontomanai	A
10	Buki	A
11	Bontomatene	A

3. Pegawai Negeri Sipil



Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Data Tahun 2025, Sekitar 4.221 Aparatur Sipil Negara dari instansi nonvertikal bekerja di Kepulauan Selayar. Berdasarkan pendidikan sebanyak 4.211 ASN memiliki pendidikan SMA keatas. Untuk persebaran Golongan Kepangkatan, 8 PNS berada di golongan I, sebanyak 214 PNS berada di golongan II, dan 2.187 PNS berada di golongan III serta 746 PNS berada di golongan IV.

Tabel 1.8

Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1	SD	3	-	3
2	SMP	7	-	7
3	SMA	250	160	410
4	DI	-	1	1
5	DII	17	31	48
6	DIII	58	234	292
7	S1/DIV	1016	2116	3132
8	S2	138	186	324
9	S3	2	2	4
JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA		1491	2730	4221

Sumber : BKPPD Tahun 2026

Adapun Jumlah PNS berdasarkan eselon digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.9

**Jumlah PNS Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
Tahun 2024**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	ESELON IIA	0	0	0



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

2	ESELON IIB	24	7	31
3	ESELON IIIA	32	17	49
4	ESELON IIIB	47	41	88
5	ESELON IVA	95	90	185
6	ESELON IVB	33	25	58
7	ESELON VA	0	0	0
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL		231	180	411

Sumber : BKPPD Tahun 2026

Tabel 1.10.
Jumlah ASN Jabatan Fungsional dan PPPK berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	TINGKATAN ESELON	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Jabatan Fungsional Tertentu	671	1.516	2.187
2	Jabatan Fungsional Umum	291	266	557
3	Jabatan PPPK	298	768	1.066
JUMLAH		1.260	2.550	3.810

Sumber : BKPSDM Tahun 2026

Berdasarkan Tingkat Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Selayar tergambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.11
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Kepangkatan Tahun 2025

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
	GOLONGAN IV	286	460	746
1	Pembina Utama/IVe	-	1	1
2	Pembina Utama Madya/IVd	1	1	2
3	Pembina Utama Muda/IVc	48	78	126
4	Pembina Tingkat I/IVb	125	187	312



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

5	Pembina/IVa	112	193	305
	GOLONGAN III	767	1420	2187
6	Penata Tingkat I/IIIId	297	607	904
7	Penata/IIIc	149	240	389
8	Penata Muda Tingkat I/IIIb	203	330	533
9	Penata Muda/IIIa	118	243	361
	GOLONGAN II	132	82	214
10	Pengatur Tingkat I/IId	60	51	111
11	Pengatur/IIC	49	25	74
12	Pengatur Muda Tingkat I/IIB	16	5	21
13	Pengatur Muda/IIa	7	1	8
	GOLONGAN I	8	0	8
14	Juru Tingkat I/Id	5	-	5
15	Juru/Ic	2	-	2
16	Juru Muda Tingkat I/Ib	1	-	1
17	Juru Muda/Ia	-	-	0
	JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA	1193	1962	3155

Sumber : BKPSDM Tahun 2026

Aparatur Sipil Negara pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas 417 PNS berada pada jabatan struktural, 595 PNS berada pada jabatan pelaksana, 596 PNS berada pada jabatan Fungsional Kesehatan, 1.301 PNS berada pada jabatan fungsional guru dan 328 PNS berada pada jabatan fungsional lainnya serta PPPK sebanyak 994. Adapun pengelompokannya berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1.12.
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	JABATAN STRUKTURAL	231	180	411
2	FUNGSIONAL GURU	404	844	1248



3	FUNGSIONAL KESEHATAN	95	495	590
4	FUNGSIONAL LAINNYA	172	177	349
5	JABATAN PELAKSANA	291	266	557
6	PPPK	298	768	1066
JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA		1491	2730	4221

Sumber : BKPSDM Tahun 2026

F. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun 2025 pada Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.020.259.175.020,00 dan terealisasi sebesar Rp. 979.014.504.317,15 dengan capaian realisasi sebesar 95,95%, adapun realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kelompok pendapatan dan jenis-jenis pendapatan sebagai berikut :

1. Target Pendapatan Asli Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 114.091.495.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 97.653.752.394,15 dengan capaian realisasi anggaran sekitar 85,59%.

Tabel 1.13
Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2025

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH		114.091.495.700,00	97.653.752.394,15	16.437.743.305,85	85,59
1	PAJAK DAERAH	23.051.667.100,00	17.363.964.333,53	5.687.702.766,47	75,33
2	RETRIBUSI DAERAH	54.514.403.000,00	58.993.082.593,00	-4.478.679.593,00	108,22
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	12.778.500.000,00	12.551.864.796,00	226.635.204,00	98,23



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	23.746.925.600,00	8.744.840.671,62	15.002.084.928,38	36,83
---	---	-------------------	------------------	-------------------	-------

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI

2. Pendapatan Transfer dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 906.167.679.320,00 dan terealisasi sebesar Rp. 881.360.751.923,00 dengan capaian realisasi anggaran sekitar 97,26%.

Tabel 1.14
Realisasi Dana Perimbangan Daerah 2025

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
PENDAPATAN TRANSFER		906.167.679.320,00	881.360.751.923,00	24.806.927.397,00	97,26
A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		840.044.617.320,00	823.627.868.067,00	16.416.749.253,00	98,05
1	Dana Bagi Hasil	14.923.484.000,00	15.224.232.900,00	-300.748.900,00	102,02
2	Dana Alokasi Umum	597.062.764.000,00	596.237.923.662,00	824.840.338,00	99,86
3	Dana Alokasi Khusus Fisik	17.816.004.000,00	17.690.785.769,00	125.218.231,00	99,30
4	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	144.790.958.000,00	129.256.066.416,00	15.534.891.584,00	89,27
5	Dana Desa	58.598.707.320,00	58.366.159.320,00	232.548.000,00	100,40
6	Insentif Fiskal	6.852.700.000,00	6.852.700.000,00	0,00	100
B. Pendapatan Transfer Antar Daerah		66.123.062.000,00	57.732.883.856,00	8.390.178.144,00	87,31
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	46.290.458.000,00	42.029.839.389,00	4.260.618.611,00	90,80
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	19.832.604.000,00	15.703.044.467,00	4.129.559.533,00	79,18

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak direncanakan sehingga capaian realisasi anggarannya 0,00%.



Tabel 1.15
Pendapatan Lain-Lain Daerah yang Sah Tahun 2025

URAIAN	TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI

b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah pada perubahan APBD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 1.038.963.592.110,49 dan terealisasi sebesar Rp. 969.171.333.419,20 dengan capaian realisasi sebesar 93,28%, adapun realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudit disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025

URAIAN	TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	(%)
Belanja Daerah	1.038.963.592.110,49	969.171.333.419,20	69.792.258.691,29	93,28
Belanja Operasi	796.505.502.069,88	739.973.700.136,60	56.531.801.933,28	92,90
1 Belanja Pegawai	469.223.962.764,73	440.353.024.670,00	28.870.938.094,73	93,85
2 Belanja Barang dan Jasa	310.388.340.405,15	290.078.994.217,60	20.309.346.187,55	93,46
3 Belanja Hibah	15.599.306.300,00	8.260.757.034,00	7.338.549.266,00	52,95
4 Belanja Bantuan Sosial	1.293.892.600,00	1.280.924.215,00	12.968.385,00	98,99
Belanja Modal	117.723.877.220,61	105.972.447.809,60	11.751.429.411,01	90,01
1 Belanja Modal Tanah	4.264.901.984,25	3.778.985.100,00	485.916.884,25	88,60
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.370.822.600,00	12.587.436.454,00	3.783.386.146,00	76,88
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.309.266.349,63	39.824.645.014,00	3.484.621.335,63	91,95
4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	53.177.105.286,73	49.287.736.241,60	3.889.369.045,13	92,68
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	601.781.000,00	493.645.000,00	108.136.000,00	82,03
6 Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	2.175.000.000,00	1.427.219.190,00	747.780.810,00	65,61
1 Belanja Tidak Terduga	2.175.000.000,00	1.427.219.190,00	747.780.810,00	65,61



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

Belanja Transfer		122.559.212.820,00	121.797.966.283,00	761.246.537,00	99,37
1	Belanja Bagi Hasil	4.055.928.500,00	3.528.632.588,00	527.295.912,00	86,99
2	Belanja Bantuan Keuangan	118.503.284.320,00	118.269.333.695,00	233.950.625,00	99,80

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI

1. Belanja Operasi dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 796.505.502.069,88 dan terealisasi sebesar Rp. 739.973.700.136,60 dengan capaian realisasi sekitar 92,90%.
2. Belanja Modal dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 117.723.877.220,61 dan terealisasi sebesar Rp. 105.972.447.809,60 dengan capaian realisasi sekitar 90,01%.
3. Belanja Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 2.175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.427.219.190,00 dengan capaian realisasi sekitar 65,61%.
4. Transfer/Bagi Hasil pada perubahan APBD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 122.559.212.820,00 dan terealisasi sebesar Rp. 121.797.966.283,00 dengan capaian realisasi sebesar 99,37%.

c. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan Daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yakni berasal dari penerimaan pembiayaan yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, adapun realisasi pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kelompok pembiayaan sebagai berikut :



Tabel 1.17
Realisasi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Pembiayaan

URAIAN		TARGET	REALISASI	SISA LEBIH / (KURANG)	(%)
Surplus/ Defisit		(45.593.525.234,00)	30.012.449.646,21		
Pembiayaan Daerah		18.704.417.090,49	18.704.417.090,49	0,00	100
Penerimaan Pembiayaan		18.704.417.090,49	18.704.417.090,49	0,00	100
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.704.417.090,49	18.704.417.090,49	0,00	100
Pembiayaan Netto		18.704.417.090,49	18.704.417.090,49	0,00	100
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		0,00	28.547.587.988,44	0,00	0

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar unaudit BPK RI, update per tanggal 12 Maret 2025

I.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan upaya penyelesaian masalah-masalah yang melekat dan terus berkembang di dalamnya. Serangkaian tindakan yang dirancang untuk menyelesaikan masalah tersebut akan berhasil dengan baik jika didukung oleh proses perencanaan pembangunan yang matang. Salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan adalah kemampuan untuk mengenali dan merumuskan isu serta permasalahan utama di suatu daerah.

Permasalahan daerah dianggap prioritas ketika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk prioritas kebijakan nasional maupun provinsi yang bersifat mandatory. Perumusan masalah pembangunan daerah dapat digunakan pendekatan akar masalah, yaitu dengan memetakan masalah melalui identifikasi masalah pokok, masalah utama, dan akar masalah. Masalah utama merupakan persoalan yang bersifat makro bagi daerah dan dapat dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, serta sasaran pembangunan.



Masalah pokok adalah penyebab dari masalah utama dapat diselesaikan melalui rumusan strategi. Adapun akar masalah merupakan penyebab rinci dari masalah pokok yang pemecahannya dilakukan melalui perumusan arah kebijakan atau kebijakan umum. Berikut pemetaan permasalahan utama untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah :

Berikut Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar :

1. Belum optimalnya pemerataan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat, Derajat kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar terlihat dari: Umur Harapan Hidup yang masih pada angka 73,48 tahun, Indeks Kesehatan pada angka 82,83 poin. Prevalensi stunting masih tinggi masih pada angka 25,70 persen. Kasus Tuberculosis yang masih tinggi dari tahun ke tahun. Kondisi ini disebabkan : Upaya promotif, preventif dan pola hidup sehat belum berjalan maksimal; Sarana dan prasarana pada fasilitas kesehatan belum memadai dan sesuai kebutuhan; Pelayanan kesehatan bergerak di wilayah kepulauan masih dilaksanakan dua kali dalam setahun; Ketersediaan dokter dan dokter ahli belum tercukupi , tenaga kesehatan terlatih dan terakreditasi belum terpenuhi di layanan kesehatan
2. Belum optimalnya pemerataan layanan dan kualitas pendidikan. Dapat dilihat dari angka melek huruf, rata-rata lama sekolah yang masih rendah. Kompetensi literasi dan numerasi berdasarkan asesmen nasional masih pada peringkat rendah (literasi : 1,63 numerasi 1,62). Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi masih rendah (15,15 persen) Kondisi ini disebabkan belum meratanya akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh anak mulai usia 5 tahun keatas agar tetap bisa bersekolah hingga jenjang pendidikan tinggi; Belum meratanya kualitas sarana prasarana dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas dan memenuhi standard kompetensi antara perdesaan dan perkotaan, serta antara daratan dan kepulauan; Pemanfaatan teknologi pembelajaran yang belum menjadi prioritas kebijakan pembangunan pendidikan, sehingga perangkat lunak dan perangkat keras proses pembelajaran juga mengalami ketimpangan yang tajam antara masyarakat



perkotaan dengan perdesaan, antara daratan dengan daerah kepulauan; Kualitas lulusan masih rendah, sehingga produktivitas dan daya saingnya masih rendah.

3. Tingginya tingkat kemiskinan dan belum optimalnya perlindungan sosial. Berdasarkan data BPS, pada 2024, tercatat persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten kepulauan Selayar sebesar 10,79 persen. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin dibanding tahun 2023 yang sebesar 2,15. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan yakni sebesar 0,11 poin atau naik menjadi 0,57 pada tahun 2023. Kenaikan kedua indeks, yakni P1 dan P2 memberikan indikasi bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin melebar. Indeks Gini setiap tahun menurun dan masih cukup tinggi (Tahun 2024 : 0,329). Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masih pada angka 36,72 persen di tahun 2024. Kondisi ini disebabkan : Belum optimalnya penanganan kemiskinan berdasarkan skala prioritas dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan yang memerlukan perhatian khusus; Peningkatan beban tanggungan bagi usia produktif akibat rasio ketergantungan penduduk meningkat; Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem data kependudukan sebagai basis perencanaan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial yang inklusif; Lapangan kerja di perdesaan masih bertumpu pada sektor primer (perikanan, pertanian dan perkebunan); Pengembangan sektor jasa masih bertumpu di perkotaan; Rendahnya kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja formal dan informal; serta Terbatasnya akses bagi penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya di sektor ekonomi formal dan informal, kesempatan peningkatan kapasitas dan kesempatan peluang kerja yang layak.
4. Belum optimalnya penerapan teknologi digital dan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi. Kondisi ini disebabkan : Belum optimalnya upaya penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi



yang belum menjangkau seluruh wilayah secara merata; Masih rendahnya regulasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi digital yang tepat; Masih terdapat desa blank spot tanpa BTS; Masih rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak terutama dalam hal kecakapan digital, etika digital dan budaya digital.

5. Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai nilai tambah ekonomi daerah. Dapat dilihat, penurunan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan terhadap PDRB dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Menurunnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB jika dilihat dari data tahun 2020 dan tahun 2024. Kontribusi sektor pariwisata masih sekitar 17 Milliar Rupiah (0,23 persen dari PDRB). Kondisi ini disebabkan : tenaga kerja pada sektor pertanian mengalami penurunan disebabkan tenaga kerja sektor pertanian bergeser pada sektor manufaktur dan jasa; Kelembagaan usaha nelayan dan jenis usaha yang beragam menjadikan usaha penangkapan ikan sangat parsial; Produktivitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan masih rendah akibat kewenangan pengelolaan laut yang sudah menjadi kewenangan provinsi; Potensi pariwisata dengan potensi wisata bahari dengan hamparan atol terbesar ketiga Dunia yang ada di kawasan Taman Nasional Takabonerate dan sekitarnya, potensi wisata alam dan wisata budaya dengan berbagai kearifan lokal belum terkelola secara maksimal.
6. Belum optimalnya produktivitas sumberdaya alam Dilihat dari penurunan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Menurunnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan jika dilihat dari data tahun 2020 dan tahun 2024. Kondisi ini disebabkan : Penggunaan alsintan modern dan bibit unggul yang belum merata; Pengembangan budidaya dengan penerapan teknologi dan inovasi yang belum optimal terutama budidaya rumput laut, tambak dan ikan karang; Masih lemahnya penanganan hama dan penyakit ikan; Logistik penangkapan ikan modern yang belum terpenuhi secara maksimal.



7. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik dan regional, Berdasarkan data BPS Net Ekspor Barang dan Jasa masih rendah (Tahun 2024 : -14,23 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto PDRB masih rendah pada angka 45,33 persen. Kondisi ini disebabkan : Belum tersedianya Pelabuhan Peti Kemas dan operator yang dapat mengeksport komoditi unggulan perikanan, perkebunan dari Kepulauan Selayar langsung ke tujuan ekspor.
8. Belum optimalnya pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Dapat dilihat, proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat kecil (1,20 persen di tahun 2024), Indeks Infrastruktur masih rendah (Tahun 2024 : 3,26 persen). Tahun 2024, jumlah desa mandiri masih sebanyak 22 desa dan masih terdapat 4 desa dengan kategori tertinggal. Kondisi ini disebabkan : Belum optimalnya kualitas dan kuantitas jalan sebagai penghubung koridor utama pedesaan dan perkotaan mendukung integrasi dan distribusi penghubung antar pusat kegiatan; Belum meratanya akses dan kualitas infrastruktur wilayah antara daratan Selayar dan wilayah kepulauan; Belum meratanya cakupan sarana dan prasarana pelayanan publik di perdesaan dan perkotaan, khususnya air bersih dan sanitasi aman dan layak; Cakupan dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang belum merata; Belum terpenuhinya kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau; Belum meratanya penyediaan dan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan di perdesaan, serta ketersediaan dan reliabilitas listrik yang masih kurang di perkotaan; dan belum optimalnya layanan reforma agraria; serta Lambatnya penuntasan RDTR sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Belum optimal pelayanan publik dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, Tata kelola pemerintahan merupakan aspek sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pada suatu daerah termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicerminkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik. Data menunjukkan, sampai dengan tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada predikat “Baik”. Hal ini



menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar masih perlu ditingkat ke level “Sangat Baik”. Kondisi ini disebabkan : Belum optimalnya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi yang ditandai dengan Indeks SPBE Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 masih pada kategori “Baik”; Belum optimalnya perkembangan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan Indeks Inovasi Daerah yang masih belum optimal dan dibawah rata-rata capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; Belum optimalnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja dan keuangan: serta Belum optimalnya penguatan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Dua faktor ini ditandai oleh capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah serta nilai SAKIP yang belum optimal dan masih perlu perbaikan, Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP yang masing-masing masih pada level 2,84; Faktor lain yang turut berkontribusi adalah belum optimalnya sistem penataan manajemen SDM; Selanjutnya, belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini ditandai oleh capaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2024 yang walaupun membaik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun belum mencapai kategori “Sangat Baik”.

10. Belum optimalnya keamanan dan ketertiban serta perlindungan hukum, Dapat dilihat dari angka kriminalitas yang masih tinggi, persentase gangguan tantribun yang dapat diselesaikan belum mencapai 100 persen. Kondisi ini disebabkan : Kasus korupsi yang meningkat, baik dalam sistem hukum dan pemerintahan; Ketidaksetaraan akses ke hukum di masyarakat; Konflik dan ketidakstabilan politik; Teknologi keamanan siber masih kurang; Tingkat Pendidikan dan pemahaman hukum masyarakat masih terbatas; Peredaran narkoba yang belum terselesaikan.
11. Masih rendahnya stabilitas ekonomi makro daerah dan terbatasnya kapasitas fiskal daerah, Salah satu faktor penting untuk mencapai tujuan pembangunan adalah ketersediaan pembiayaan pembangunan. Kebutuhan pembiayaan pembangunan semakin meningkat seiring dengan program strategis dari pemerintah provinsi dan arahan mandatory oleh Pemerintah.



Selain itu, pemerintah daerah memerlukan pendanaan yang cukup untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh karena itu, pembiayaan daerah perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Postur pendapatan dan belanja daerah menunjukkan, Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat mengandalkan transfer dari pusat

12. Masih rendahnya daya saing daerah. Dapat dilihat kinerja investasi dan sektor ekonomi belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar. Nilai investasi PMDN/PMA pada tahun 2024 semakin menurun, dengan nilai investor PMDN / PMA Rp. 28,46 milyar. Kondisi ini disebabkan : Belum terbentuknya kawasan / sentra industri / industri terpadu dan perdagangan yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal yang mampu bersaing di tataran regional, nasional, bahkan global. Demikian pula perkembangan koperasi dan UKM cenderung menurun
13. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi Pancasila, demokrasi dan kewaspadaan nasional, Kondisi ini disebabkan letak geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan gugusan kepulauan yang terpisahkan oleh laut, serta kondisi demografi yang beragam, hampir semua suku dan agama dari masing-masing provinsi di Indonesia ada di Kepulauan Selayar. Melihat kondisi ini, menyebabkan masyarakat kurang pemahaman terhadap ideologi negara, berbangsa dan bernegara; Masyarakat yang sering merantau ke luar daerah dalam waktu yang cukup lama dikhawatirkan membawa budaya dan/atau paham dari luar serta rawan disusupi paham radikal yang dapat meresahkan masyarakat dan/atau berperilaku ekstrim; Kelompok masyarakat yang heterogen dapat memicu gesekan horisontal
14. Belum optimalnya penguatan nilai keagamaan, sosial dan budaya, Hal dapat dilihat dari rendahnya solidaritas sosial dan kerjasama pada tingkatan masyarakat. Kedua dimensi ini merupakan dimensi yang diukur pada Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat, yang tahun 2024 masih pada angka 77,87.



15. Masih rendahnya kualitas ketahanan keluarga, kesetaraan dan keadilan gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 baru mencapai 92,64 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 69,07. Dilihat capaian masing-masing indikator pembentuk IPG dan IDG, secara umum masih terdapat kesenjangan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.
16. Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan rendahnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, lingkungan hidup yang berkualitas sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun akan mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sampai tahun 2024, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Kepulauan Selayar belum optimal yang dapat diukur dari pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2024, IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 67,65 yang masih kategori “Sedang”. Jika dilihat dari komposit pembentuk kualitas lingkungan hidup, capaian Indeks Kualitas Air juga belum optimal karena masih pada kategori sedang dan lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingginya pencemaran sumber-sumber air baku oleh limbah. Jika dilihat dari kualitas air sungai sebagai sumber air baku pada tahun 2024 mengalami penurunan. Demikian juga dengan kualitas tutupan lahan yang menggambarkan kondisi vegetasi hutan dan vegetasi non hutan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh terus menurunnya proporsi hutan terhadap luas seluruh lahan serta menurunnya proporsi luas lahan kritis yang direhabilitas terhadap luas seluruh lahan. Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang sampai saat ini belum dapat ditangani secara baik. Lingkungan kotor serta polusi sampah bisa membawa dampak buruk baik itu terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. Oleh karena itu pengelolaan sampah sangat penting untuk mengurangi dan menangani



produksi sampah baik itu sampah rumah tangga ataupun industri. Kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai tahun 2024 belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah pada tahun 2024 masih berada pada angka 2,60 persen. Capaian dimaksud masih tergolong rendah walaupun mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini disebabkan karena fasilitas pengelolaan sampah yang masih kurang, pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang belum optimal serta kebijakan/regulasi pengelolaan persampahan yang belum berjalan secara optimal. Dapat dilihat dari Indeks Risiko Bencana (IRB) yang masih pada kelas risiko “sedang” (133,58 : tahun 2024). Curah hujan dan jumlah hari hujan yang tiap tahun semakin menurun. Kondisi ini disebabkan : Frekuensi bencana angin kencang, abrasi pantai, banjir, cuaca ekstrim dan gempa bumi dengan skala rendah yang tiap tahun terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar; Penurunan daya dukung dan tampung lingkungan akibat pembangunan yang massif; Pencemaran air dan pencemaran pada wilayah pesisir/laut.

17. Meningkatnya ancaman penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan. Penurunan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan dapat dilihat dengan belum meratanya dan belum berkualitasnya akses energi; masih tingginya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan; masih rendahnya kapasitas tampungan air dan masih rendahnya persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. Kondisi ini disebabkan : Belum terpenuhinya pasokan listrik untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan industri; Belum optimalnya upaya pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; Terbatasnya upaya pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil khususnya pada daerah kepulauan. Sedangkan permasalahan terkait menurunnya kemandirian pangan disebabkan masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan; Masih rendahnya diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan; Masih terbatasnya pembangunan



tampungan air untuk memenuhi kebutuhan air baku; Masih terbatasnya jaringan irigasi, khususnya pada bendungan yang telah terbangun; Masih terbatasnya penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan; dan Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air.

2. Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan kondisi yang berpotensi menjadi masalah atau peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Isu strategis bersifat antisipatif dan berorientasi pada masa mendatang. Penyajian isu strategis meliputi permasalahan pembangunan sesuai dengan kondisi objektif daerah serta perkembangan pelaksanaan pembangunan yang telah sejalan hingga saat ini.

Berdasarkan hal tersebut isu-isu strategis yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- a. Peningkatan keberdayaan masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia
Kondisi sebagian masyarakat yang masih menghadapi tekanan kemiskinan, kurangnya kesempatan kerja dan pengangguran, serta kualitas SDM masyarakat yang belum siap bersaing dalam banyak hal akan melahirkan marginalisasi masyarakat miskin, karena posisi mereka yang rentan, serta melahirkan dampak lain berupa peningkatan jumlah pengangguran. Berkurangnya kesempatan kerja, dan kolapsnya sejumlah usaha mandiri yang ditekuni masyarakat, juga menyebabkan terjadinya proses perluasan dan pendalaman kemiskinan. Akibat kualitas SDM masyarakat yang masih tertinggal, dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah dan belum ditunjang kecakapan, serta keahlian yang profesional, seringkali menyebabkan tenaga kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Untuk menangani kemiskinan yang



dibutuhkan dalam hal ini memberikan kesempatan dan fasilitasi akses masyarakat miskin terhadap berbagai sumber permodalan dan peluang usaha. Keberdayaan masyarakat khususnya masalah tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu didasarkan pada pemahaman harapan masyarakat miskin dan adanya perlindungan, dan pemenuhan hak dasar masyarakat, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Kabupaten Kepulauan Selayar akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar, Namun berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan menurunnya angka stunting. Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk sangat penting diperhatikan untuk menciptakan keseimbangan pertumbuhan penduduk untuk mendukung terjadinya jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif sehingga tingkat kemiskinan tidak meningkat. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi. Komitmen peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Selayar yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) harus menjadi agenda utama. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan secara merata, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan dan meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan. Pencegahan terhadap peningkatan penyakit menular dan tidak menular serta penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang merupakan prioritas utama. Peningkatan kualitas SDM aparatur di kecamatan



kepulauan khususnya yang melakukan pelayanan pemerintahan dan pelayanan langsung ke masyarakat saat ini sangat perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan dan dalam rangka mempersiapkan pemekaran daerah.

- b. Pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah Infrastruktur wilayah termasuk jalan beserta saluran dreinasenya dan jembatan, serta prasarana sumberdaya air dan jaringan irigasi, ketersediaan akses air minum layak dan sanitasi aman memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi maupun kehidupan sosial budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pembangunan dan upaya peningkatan dan perbaikan sudah dilakukan selama ini, namun masih tetap menjadi perhatian serius di masa mendatang. Kualitas infrastruktur transportasi darat terutama akses jalan, transportasi laut terutama pembangunan pelabuhan yang relatif rendah mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar maupun dari Kabupaten Kepulauan Selayar ke kabupaten tetangga. Pembangunan infrastruktur jalan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dilakukan untuk kelancaran transportasi orang, barang dan jasa terutama dari kawasan pariwisata, kawasan sentra produksi ke pusat-pusat pemasaran. Pemerataan infrastruktur khususnya konektivitas wilayah kecamatan daratan dengan kecamatan kepulauan, antar pulau dan atau kabupaten lain sangat diperlukan sebagai salah satu syarat teknis dalam rangka mempersiapkan pemekaran daerah
- c. Pengelolaan sumberdaya alam Menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada ancaman krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif ke perumahan, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana



irigasi. Selain itu, praktik pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Disisi lain, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan tanpa pengawasan intensif akan mengancam keberadaan kawasan hutan dan terganggunya keseimbangan tata guna air tanah. Memburuknya kondisi wilayah konservasi tangkapan air yang meningkat pesat menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunya debit air waduk/embung/bendung dan sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian dan kebutuhan masyarakat. Akses terhadap air bersih di Kabupaten Kepulauan Selayar memerlukan optimalisasi. Kerawanan air bersih masih mengancam Kabupaten Kepulauan Selayar yang disebabkan ketersediaan sumber baku dan air permukaan tergantung yang pada musim. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan residu atau sampah perlu ditangani secara komprehensif, sinergi dan berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global (global warming) yang berdampak pada aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari.



- d. Tata kelola pemerintahan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar masih pada nilai 60,55 dengan predikat “B” (data tahun 2024) dengan nilai tersebut masih perlu upaya perbaikan pada setiap komponen penilaian. Penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum optimal, seperti belum adanya grand design pengembangan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan beberapa aplikasi manajemen internal maupun pelayanan kepada masyarakat yang terintegrasi. Kondisi geografis ini menyebabkan adanya tantangan serius dalam hal jangkauan pelayanan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan pemerintahan yang merata khususnya di kecamatan kepulauan
- e. Pemenuhan pangan dan energi Ancaman krisis pangan cenderung makin nyata ketika dikaitkan dengan persoalan kependudukan. Seperti diketahui, bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya. Alih fungsi lahan dan kebutuhan lahan untuk sarana dan prasarana kehidupan, menyebabkan lahan produktif semakin berkurang. Akibat dari illegal fishing dan destructive fishing menyebabkan berkurangnya terumbu karang sebagai tempat pemijahan ikan. Di sisi lain permasalahan yang harus dihadapi petani dan nelayan adalah kenaikan biaya produksi dan perolehan keuntungan yang makin sedikit, sehingga Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menjadi rendah. Keterbatasan ketersediaan energi, bukan saja menyebabkan harga energi di pasaran menjadi makin mahal, tetapi juga menyebabkan dampak terhadap peningkatan harga kebutuhan masyarakat yang lain. Ancaman krisis energi juga menyebabkan terbukanya peluang konflik sosial sebagai akibat meningkatnya jumlah orang miskin dan bertambahnya pengangguran. Untuk mengatasi ancaman krisis energi, perlu diupayakan pencarian energi alternatif secara terus menerus terkait dengan energi yang ramah lingkungan (Energi Baru Terbarukan).
- f. Penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Tantangan yang dihadapi dalam bidang Iptek adalah rendahnya kualitas



sumberdaya manusia yang mampu bersaing dalam penerapan dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta ketersediaan perangkat teknologi dalam menghadapi perkembangan global menuju ekonomi dan masyarakat yang berbasis pengetahuan. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kemampuan Iptek daerah menuju masyarakat dan pemerintahan yang maju dan mandiri perlu membangun keterpaduan dalam pengembangan Iptek yang melibatkan secara intensif pelaku peneliti dari perguruan tinggi, perusahaan maupun pemerintah daerah, terutama untuk menciptakan kontribusi Iptek daerah dalam mengantisipasi globalisasi serta berbagai persoalan dasar dalam masyarakat.

- g. Keamanan, ketertiban, politik dan hukum Perubahan geopolitik internasional dan nasional akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban di daerah. Tantangan yang dihadapi dalam bidang keamanan dan ketertiban ke depan adalah mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah dalam kehidupan sosial budaya yang kondusif. Kesadaran masyarakat yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman dan gangguan kamtibmas perlu ditingkatkan bersama dengan peningkatan sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban yang komprehensif dan partisipatif, khususnya dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat untuk mengelolah kewan dan ketertiban. Perkembangan dalam bidang politik dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran politik dan kedewasaan politik bagi masyarakat serta perkembangan budaya politik sehingga lebih transparan serta mampu menciptakan iklim kondusif yang didukung tata pemerintahan yang baik. Tantangan yang dihadapi dalam bidang hukum adalah penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Disamping itu, peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum serta harmonisasi produk hukum daerah.
- h. Perubahan iklim, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan risiko bencana alam Pemanasan global, perubahan iklim dan emisi Gas Rumah Kaca



(GRK) tengah terjadi dan diperkirakan akan terus terjadi pada masa-masa mendatang. Hal ini dapat berdampak pada keberlangsungan terumbu karang sebagai tempat hidup biota laut. Fokus adaptasi ini kiranya perlu ditujukan pada area-area yang rentan terhadap perubahan iklim seperti: sumberdaya air, pertanian, perikanan, infrastruktur permukiman, kesehatan, dan kehutanan. Risiko bencana harus tetap menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah. Wilayah rawan bencana telah diidentifikasi. Kawasan rawan bencana alam gempa bumi yang terjadi di tahun 2021 yang berdampak pada kerusakan fisik. Bencana angin kencang, banjir, abrasi pantai yang tiap tahun terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah dengan resiko bencana yang tinggi jika dilihat dari Indeks Resiko Bencana Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 140,18 dengan kategori “Sedang”. i. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Polusi dan kerusakan lingkungan diperkirakan akan terus terjadi pada masa-masa mendatang. Pencemaran air, tanah dan udara semakin meningkat. Food loss and waste. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) over capacity akibat semakin tidak terkendalinya timbunan sampah. Kapasitas daya tampung dan daya dukung lingkungan semakin berkurang disebabkan laju pertumbuhan penduduk dan penyediaan pendukung kehidupan masyarakat.

B. VISI, MISI KEPALA DAERAH

1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan terlantik pada tanggal 20 Februari 2025. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 adalah :

“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”.



Pernyataan visi mengandung makna, yaitu **Bersama**, artinya bentuk sinergitas diantara penta helix pemangku kepentingan (Akademisi, Swasta, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Media) yang terbangun dari peran yang setara dan selaras dalam satu kesatuan yang utuh, solid, dan menjunjung tinggi sifat toleransi untuk mengelola sumber daya alam, dalam rangka membangun perekonomian daerah, dengan prinsip pembangunan :

- a. Meminimalkan kesenjangan ekonomi antara Selayar daratan dengan Selayar kepulauan
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan
- c. Pelayanan sosial yang diterima oleh penduduk Pulau Selayar, sama dengan yang diterima oleh penduduk kepulauan
- d. Tingkat kesejahteraan penduduk Pulau Selayar, sama dengan tingkat kesejahteraan penduduk kepulauan
- e. Infrastruktur dibangun sesuai kebutuhan pulaunya
- f. Ketersediaan pangan (bahan makanan) di Pulau Selayar, sama dengan yang ada di kepulauan
- g. Mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang berkeadilan, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Membawa, artinya pergerakan perilaku ekonomi sebagai daerah konsumen menjadi daerah produsen dengan peningkatan kualitas manajemen dan teknologi industri menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Maju, artinya kemampuan daerah melakukan perubahan paradigma pembangunan dengan menerapkan digitalisasi dan teknologi industri pada penyelenggaraan pemerintahan dan perekonomian dengan hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM dan huluisasi pada ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal.

Sejahtera, artinya hasil pembangunan yang dicapai telah menciptakan lapangan usaha baru dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat untuk meminimalkan pengangguran dan kemiskinan, serta memberi dampak pada meningkatnya daya beli masyarakat.



Kondisi akhir yang diharapkan dari terwujudnya Visi pada tahun 2029 yaitu :

- a. Kesempatan berusaha terbuka;
- b. Lapangan kerja tersedia;
- c. Angka pengangguran menurun;
- d. Angka kemiskinan menurun;
- e. Daya beli masyarakat meningkat;
- f. Ketentraman dan kedamaian masyarakat yang penuh toleransi; dan
- g. Pengelolaan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

2. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, ditetapkan Misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui "Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur" yang menghasilkan ASN kreatif, inovatif, dan kolaboratif serta mampu mengikuti perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi digital, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menciptakan inovasi daerah.
- b. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan kerja melalui "Program Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat" yang menghasilkan SDM mandiri, tenaga kerja siap pakai, kreatif, dan mampu berinovasi untuk menciptakan lapangan usaha, dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.
- c. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah, untuk membentuk perubahan paradigma pembangunan ekonomi berupa kebiasaan menjual bahan mentah, menjadi kebiasaan menjual produk akhir yang berkualitas melalui "Program Hilirisasi Sumber Daya Alam" atau



petik-olah-jual dengan teknologi industri, dalam rangka membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin.; dan untuk meningkatkan produk daerah melalui “Program Pembinaan Manajemen Lembaga Usaha dan Masyarakat” dengan digitalisasi pemasaran bagi UMKM, BUMDes, Koperasi, dan/atau BUMD, dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

- d. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan, untuk mengembangkan perekonomian masyarakat perdesaan dengan melakukan pembinaan pengelolaan potensi sumber daya unggulan, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA) pada masing-masing desa melalui “Program Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Masyarakat Perdesaan”, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dan pendapatan daerah.
- e. Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Wilayah, untuk pemerataan pembangunan infrastruktur perhubungan secara proporsional sesuai kebutuhan dan terkoneksi di seluruh wilayah kabupaten melalui “Program Pengembangan Prasarana Transportasi” dengan melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fisik prasarana, dalam rangka membangun kesatuan ekonomi antar pulau dan kesatuan wilayah kabupaten.
- f. Meningkatkan Pembinaan Sosial, Budaya, dan Agama, untuk menyiapkan fasilitasi kegiatan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan dengan melakukan pembinaan kelembagaan sosial, budaya, dan agama, serta pembinaan masyarakat penyandang masalah sosial.
- g. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, untuk mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga, melestarikan dan memelihara lingkungan hidup dimulai dengan penyehatan lingkungan permukiman, pengelolaan limbah, serta meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui program



“Pembinaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup”, dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam.

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 di dukung dengan 17 (tujuh belas) prioritas pembangunan daerah, sebagai berikut :

1. Membangun desa, menata kota Membangun Desa merupakan lanjutan Program “Gerbang Sari” adalah upaya pembangunan ekonomi perdesaan dengan :
 - a. Hulusasi SDA Berbasis Perwilayahan Komoditas; membagi wilayah sesuai potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan membentuk: Desa Nelayan, Desa Wisata, Desa Tani dan Desa Koperasi
 - b. Hilirisasi SDA Berbasis UMKM, berasaskan “Petik – Olah – Jual” sebagai produk akhir untuk dipasarkan
 - c. Pemasaran Produk UMKM Berbasis Teknologi Digital

Menata Kota adalah merupakan upaya pembangunan kawasan perkotaan dengan prioritas ibukota kabupaten dengan menata zona-zona peruntukan lahan, untuk mewujudkan kota tertib dan nyaman, melalui kegiatan :

- a. Menata kawasan permukiman, dengan : 1) Menyusun Rencana Induk Drainase 2) Menata pengelolaan limbah atau peta jalan pengelolaan sampah 3) Membangun sumur resapan yang berfungsi untuk menahan intrusi air laut ke lahan permukiman
- b. Menata kegiatan UMKM Perkotaan, dengan : 1) Menata sentra kuliner, pelengkap destinasi wisata perkotaan (Sapta Pesona) 2) Membangun Sentra Ekonomi Kreatif (Pusat Karya Tanadoang) kerja sama dengan Dekranas Daerah
- c. Menata PSU Perkotaan, dengan : 1) Menata jalur pantai Benteng 2) Menata Lapangan Pemuda menjadi alun-alun kota, yang berfungsi



sebagai Ruang Terbuka Hijau 3) Menata layanan sanitasi dan limbah perkotaan; 4) Menata kembali jaringan drainase perkotaan; 5) Melakukan reklamasi Pantai Bonea (dengan kajian LH) pada bagian dalam break water yang berfungsi sebagai Hutan Kota;

2. Kemandirian pangan, melalui peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dengan bantuan bibit, pupuk dan pestisida mendukung Program Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah pusat;
3. Pelayanan kesehatan gratis dengan BPJS, dengan program pengembangan dan penguatan terhadap pelaksanaan kesehatan gratis;
4. Penguatan pendidikan gratis PAUD – PT, melalui program bantuan gratis kepada peserta didik pada satuan PAUD sampai dengan SLTP berupa perlengkapan sekolah, serta bantuan hibah pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa;
5. Penguatan kesetaraan gender, PPA, dan penyandang disabilitas, dalam mendapatkan posisi yang sama di masyarakat, kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya, kesempatan kerja, ruang berpolitik dan memiliki hak kepemilikan yang sama;
6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH, melalui program penataan kawasan permukiman dan penanganan rumah tidak layak sebagai upaya mengatasi stunting dan kemiskinan;
7. Pengentasan kemiskinan, dengan program penanggulangan penduduk miskin berbasis data yang akurat;
8. Penguatan fiskal daerah, melalui program peningkatan pendapatan daerah dan penggunaan dana secara efisien melalui pengelolaan yang efektif dengan hasil yang optimal;
9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah melalui program pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kapasitas SDM untuk mengelola SDA sebagai produk ekonomi kreatif dan/atau inovasi;
10. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM, melalui program pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan oleh UMKM dan masyarakat, untuk



mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang akan memberi nilai tambah bagi masyarakat Petani dan Nelayan;

11. Hulusasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal, melalui program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan sebagai penyedia bahan baku pada hilirisasi;
12. Pemerataan pembangunan ekonomi yg berkeadilan dan penguatan UMKM, melalui program pengembangan usaha melalui penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan, seperti koperasi, UMKM, dan usaha perorangan dengan meningkatkan kemampuan SDM dan kemudahan akses permodalan;
13. Penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan, melalui program pengembangan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan, serta penguatan empat pilar kebangsaan untuk meningkatkan toleransi antar suku dan antar agama;
14. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan, melalui program pembangunan kebangsaan untuk meningkatkan perilaku toleransi masyarakat dalam beragama dan keberagaman suku, dalam rangka mewujudkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat;
15. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, melalui program penyadaran dan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, dalam rangka menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olah raga, melalui program penggalan dan pemeliharaan seni dan budaya untuk membangkitkan nilai-nilai yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat, dalam rangka menghidupkan kembali sifat kepedulian dan gotong-royong untuk membangun ekonomi kreatif, serta membina seni, budaya, dan olah raga menjadi daya tarik wisata dan olah raga prestasi; dan
17. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui program



pemeliharaan dan pelestarian lingkungan dalam bentuk dokumen maupun fisik, untuk menjamin terjaganya sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan.

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN DAERAH

Adapun Penjabaran Program Pembangunan sebagaimana *telampir dalam Laporan ini*.

I.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM merupakan amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk memastikan terpenuhinya pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar secara konsisten melaksanakan penerapan SPM sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Karakteristik wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah kepulauan dengan kondisi geografis yang tersebar menuntut adanya perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pelayanan dasar yang adaptif, efektif, dan berkeadilan, sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan minimal tanpa terkecuali.

Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus sebagai instrumen evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan dasar. Laporan ini memuat gambaran umum kebijakan, strategi



pelaksanaan, capaian indikator SPM, kendala yang dihadapi, serta langkah tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena :

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolak ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

A. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas



- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan



Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 144);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

B. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai sasaran adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana



Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Organisasi Perangkat Daerah Daerah. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

C. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Program merupakan instrument kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun salah satu kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendukung pencapaian SPM dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pemerintah daerah yaitu, Program Penyempurnaan Sistem manajemen pelayanan publik dan Program peningkatan kapasitas administrasi pelayanan publik.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk membiayai program/ kegiatan terkait pemenuhan pelayanan dasar yang terdiri dari Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan



Umum, Perumahan, Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta Bidang Sosial.

Adapun Program dalam rangka pemenuhan pelayanan SPM di Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 18

Program Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Kepulauan Selayar
tahun 2025

No	Bidang Urusan	Nama Program	Perangkat Daerah
1	PENDIDIKAN	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2	KESEHATAN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	SOSIAL	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

II.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja (%)
1	2	4	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,98	72,78	1,11
2	Persentase Penduduk Miskin	10,79	10,61	-1,67
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,05	2,48	20,98
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,33	3,98	19,52
5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	58,45	62,11	6,26
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,329	0,324	-1,52

Sumber Data : BPS Kepulauan Selayar 2026

II.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

II.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Pemerintahan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1	URUSAN PENDIDIKAN						
1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	2478	4485	55,25	%
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	15906	20787	76,52	%
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	1051	1341	78,37	%
1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet	260	661	39,33	%

1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas	517	1313	39,38	%
2	URUSAN KESEHATAN						
1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	Jumlah ibu melahirkan tahun N	2	1.734	0,12	%
1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	1.252	6.643	18,85	%
1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1.374	2.731	50,31	%
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1.734	2.731	63,49	%
1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0- 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	1.716	1.735	98,90	%
1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	6.326	11.784	53,68	%

		kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3					
1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	10.849	11.365	95,46	%
1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	37.826	67.341	56,17	%
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	14.989	18.968	79,02	%
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	13.118	13.118	100	%
1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi	1.482	1.482	100	%

			kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.				
1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	199	199	100	%
1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	4.254	4.254	100	%
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	2.796	2.796	100	%
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	307,52	3.779	8,14	%
1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	327,14	824,8	39,66	%
1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	Jumlah total penduduk kabupaten/kota	32.002	45.954	69,64	%

1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah di kabupaten/kota	29.837	45.954	64,93	%
1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	0,1433	0,2823	100	%
1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0,2823	0,2823	100	%
1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	53	53	100	%
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk	-	-	-	%
1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	170	1411	12,05	%

1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	0	1	0	%
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	1	1	100	%
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	3,21	37,26	8,6151369	%
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	13	60	21,6666667	%
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	1	1	100	%
5	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	2	3	66,6666667	%
1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban	6	6	100	%

	Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	yang ditangani	Umum yang dilaporkan				
1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat anksi	11	11	100	%
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	1337	143096	0,9343378	%
1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	2008	2008	100	%
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	35	36	97,2222222	%
6	URUSAN SOSIAL						
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	3291	3291	100	%
1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	59	59	100	%
1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial	4407	4407	100	%

			dasar di luar panti				
1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1	1	100	%
1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	18	18	100	%
1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	7758	7758	100	%

2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1	URUSAN TENAGA KERJA						
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	3	3	100	%

2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah perusahaan	8.755	8.755	100	%
2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	7.744	7.744	100	%
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	15	15	100	%
2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	4	4	100	%
3	URUSAN PANGAN						
2.c.1	Persentase jumlah cadangan	Jumlah cadangan pangan	Target jumlah cadangan pangan	21,07	27,26	77,29	%

	pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	pemerintah Kabupaten/Kota					
4	URUSAN PERTANAHAN						
2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	2.757.350,6	9.995.813,06	27,59	%
2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	1.083.659,068	1.083.659,068	100	%
2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	1	5	20	%
5	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						
2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	1	3	33,33	%
2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	4348,77	20918,15	20,79	%
6	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						

2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	36.883	38.857	94,92	%
2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	35.274	36.231	97,36	%
2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2 dokumen	2	2	100	%
2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	100.065	107.350	93,21	%
2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	1.096	1.200	91,33	%
2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	1	1	100	%
2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	1	1	100	%
7	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	3	6	50	%
2.g.2	Persentase peningkatan status desa	Jumlah desa berkembang yang	Jumlah desa berkembang (per-	8	36	22,22	%

	mandiri	memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	awal tahun N)				
2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	Jumlah kerja sama desa yang ditangani	2	2	100	%
8	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	1,7	2,05	82,93	%
2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun	1,7	2,05	82,9268293	%
2.h.3	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	Target persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	8	12,3	65,04	%
9	URUSAN PERHUBUNGAN						
2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	$KTD_{Daerah} = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$	-			0,10	Rasio
2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	-			0,22	Rasio
2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen	Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	0	1	0	%

	keselamatan	keselamatan					
10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	25	38	65,79	%
2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik	15	15	100	%
2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penduduk	98.717	98.717	100	%
11	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	16.507.570.578	15.838.008.692	4,23	%
2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	Σ Usaha mikro	691	20.316	3,40	%
12	URUSAN PENANAMAN MODAL						
2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1)	Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	63.702.956.308	28.462.685.254	123,81	%

		di kabupaten/kota					
2.1.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	92.165.641.562	58.000.000.000	158,91	%
13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	0	1	-	%
2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	134	37899	0,35	-
2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	2	94	2,13	%
2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	8	11	72,73	%
14	URUSAN STATISTIK						
2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum	Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	4.261	4.261	100	%

		satu data daerah					
15	URUSAN PERSANDIAN						
2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	749	918	81,59	%
16	URUSAN KEBUDAYAAN						
2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	7	34	20,59	%
2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	6.622	5.367	23,38	%
17	URUSAN PERPUSTAKAAN						
2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	$TKM = ((0,15 \times \text{Pra Membaca}) + (0,50 \times \text{Saat Membaca}) + (0,35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	-	56,24	-	56,24	Nilai
2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	-	5,72	-	5,72	Nilai
18	URUSAN KEARSIPAN						
2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4$	-	75	-	75	%

B. URUSAN PILIHAN

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	24.418,75	28.749,7	84,94	%
3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	-			41,41	Kg / Kap / Tahun
2	URUSAN PARIWISATA						
3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Realisasi investasi Tahun N	775.434.855	1.337.236.105	57,99	%
3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	Jumlah wisatawan asing tahun N-1	635	394	61,17	%
3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	Jumlah wisatawan tahun N-1	16.159	14.101	14,59	%
3	URUSAN PERTANIAN						

3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	Produksi tanaman pangan tahun N-1	25796,08	18929,22	36,28	%
3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	Produksi hortikultura tahun N-1	4508,8	7030,46	-35,87	%
3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	Produksi komoditas peternakan tahun N-1	439	522	-15,90	%
3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	521	699	74,54	%
4	URUSAN KEHUTANAN (Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota)						
5	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota)						
6	URUSAN PERDAGANGAN						
3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	366	630	58,10	%
7	URUSAN PERINDUSTRIAN						
3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara	-			27	%

	sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan					
3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	11	1.448	0,76	%
3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	1448	1433	1,05	%
3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	Total investasi seluruh sektor	0	1	0	%
7	URUSAN TRANSMIGRASI (Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota)						

II.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN						
4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	8	17	47,06	%
2	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN						
4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	341.843.800.752	103.896.359.211.049	0,33	%
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pendapatan daerah	95.485.877.042,15	992.416.760.737,85	9,62	%
4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	560.064.276.890,2	660.555.184.558	84,79	%

4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	77.776.886.323,86	91.640.437.929.049	0,08	%
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1044	1441	72,45	%
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	11	11	100	%
5	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN						
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-			2	Nilai
4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-			2	Nilai
4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	-			2	Nilai

4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	1.072	1.347	79,58	%
6	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGADAAN						
4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	-			17,78	Poin
4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	-			21,24	Poin
4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	-			12,50	Poin
7	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG HUBUNGAN DENGAN PERWAKILAN DAERAH						
4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	-			Tepat Waktu	1. Tepat Waktu dan 2 Tidak Tepat Waktu
4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	8	8	100	%
8	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PELAYANAN PUBLIK						
4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	86,98	-	86,98	Nilai



II.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

(Tersedia Data Tahun 2024/ Belum ada data final 2025 dari Bagian Organisasi)

II.3.1. TARGET KINERJA DALAM PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Visi : “Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	68,00 (B)
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,00
		2	Nilai Sakip Daerah	70,00 (BB)
		3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	73,943 (perlu perbaikan)
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	1	Rasio Gini	0,320
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Indeks Desa Membangun	0,7000 (Berkembang)



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,20
		2	Tingkat Kemiskinan	10,00
6	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia	69,00
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1	Indeks Pendidikan	55,83
		2	Indeks Kesehatan	68,99
8	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	1	Pengeluaran Perkapita yang disetarakan	9.700.000
9	Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman	1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	6,50 – 8,00
		2	PDRB/Kapita	55,00
10	Meningkatnya Usaha Perikanan	1	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	28,00
11	Meningkatnya Usaha Pariwisata	1	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	6,41
12	Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi dan Perdagangan	1	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	15,00
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	48,00
14	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	1	Indeks Ketahanan Sosial	0,7100
15	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan	1	Indeks Kesalehan Sosial	67,30
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	1	Angka kriminalitas	105
17	Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,14 (cukup)
18	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	1	Indeks Kualitas Air	56,00
		2	Indeks Kualitas Udara	85,59
		3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	47,56



II.3.2. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2024 telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan serta masih mendasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar agar terwujud Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:



Tabel 2.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 91	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

1. Merencanakan kinerja dan target kinerja;
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan;
3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan;
4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026. Dimana RPJMD terdapat 6 (enam) misi, 7 (tujuh) tujuan, 11 (sebelas) sasaran dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja sasaran. Sesuai dengan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Sasaran

NO.	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKTOR KINERJA SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1.	Misi 1	1	1	4	Sangat Tinggi = 2 Tinggi = 2
2.	Misi 2	1	2	4	Sangat Tinggi = 4 Sangat Rendah = 1



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

3.	Misi 3	1	2	4	Sangat Tinggi = 4
4.	Misi 4	1	3	5	Sangat Tinggi = 1 Tinggi = 2 Rendah = 2
5.	Misi 5	2	2	4	Sangat Tinggi = 3 Sangat Rendah = 1
6.	Misi 6	1	1	4	Sangat Tinggi = 4

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 2.3
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	1	Indeks Reformasi Birokrasi	68,00 (B)	60,55	89,04%
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	75,00	80,74	107,65%
		2	Nilai Sakip Daerah	70,00 (BB)	61,68 (B)	88,11%
		3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	73,943 (perlu perbaikan)	72,3196 (perlu perbaikan)	97,80%
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	1	Rasio Gini	0,320	0,329	102,81%
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	1	Indeks Desa Membangun	0,7000 (Berkembang)	0,719 (Berkembang)	102,71%
5	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,20	2,05	106,82%
		2	Tingkat Kemiskinan	10,00	10,79	92,1%
6	Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia	69,00	71,98%	104,32%
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	1	Indeks Pendidikan	55,83	63,97%	114,58 %
		2	Indeks Kesehatan	68,99	82,83%	120,06%
8	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	1	Pengeluaran Perkapita yang disetarakan	9.700.000	10.235.000	105,52%
9	Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman	1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	6,50 – 8,00	3,33%	51,23%
		2	PDRB/Kapita	55,00	58,29%	105,98%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
10	Meningkatnya Usaha Perikanan	1	Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	28,00	23,83%	85,11%
11	Meningkatnya Usaha Pariwisata	1	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	6,41	3,5%	54,60%
12	Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi dan Perdagangan	1	Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	15,00	13,57%	90,47%
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	48,00	50	104,17%
14	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	1	Indeks Ketahanan Sosial	0,7100	0,7694	108,37%
15	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan	1	Indeks Kesalehan Sosial	67,30	77,87	115,71%
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	1	Angka kriminalitas	105	389	-170,48%
17	Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,14 (cukup)	67,65	102,28%
18	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	1	Indeks Kualitas Air	56,00	52,22	93,25%
		2	Indeks Kualitas Udara	85,59	94,56	110,48%
		3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	47,56	44,39	93,33%



II.3.3. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET DALAM PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Target kinerja dalam RPJMD sama dengan pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan perjanjian kinerja, karena pada dasarnya yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja adalah yang termuat dalam RPJMD.

II.3.4. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET KINERJA .

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 18 (delapan belas) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan Strategis 1

Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah

Tujuan strategis 1 ini merupakan upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2022-2026 yaitu **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Seluruh Perangkat Daerah. Hasil pengukuran perwujudan reformasi birokrasi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 1

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	64,00 (CC)	53,3 (CC)	83,28%	68,00 (B)	60,55	89,04%
Rata-rata Capaian Kinerja				83,28%	Rata-rata Capaian Kinerja		89,04%



1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan proses menata ulang, mengubah, memperbaiki dan menyempurnakan birokrasi agar lebih baik. Capaian indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun 2022 adalah 55,25 %, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 hanya sebesar 53,3%, Pada Tahun 2024 realisasi indeks reformasi birokrasi mengalami kenaikan yakni sebesar 60,55% atau naik sebesar 7,25%, hal ini disebabkan beberapa komponen RB General terhadap indikator penilaian mendapatkan skor atau nilai yang cukup tinggi meskipun masih terdapat beberapa catatan atau rekomendasi perbaikan untuk peningkatan indeks Reformasi Birokrasi pada tahun mendatang.

Tabel 2.5.

Perkembangan capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi	42,70	51,24	55,65	53,3	60,55

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat peningkatan realisasi capaian dari tahun ke tahun terhadap indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kenaikan secara signifikan meskipun terjadi penurunan di tahun 2023 namun kembali naik di tahun 2024.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indeks Reformasi Birokrasi adalah :

1. Membangun unit kerja zona integritas
2. Melakukan langkah strategis untuk bisa mendorong peningkatan tata kelola pengadaan
3. Melakukan penyusunan Rencana Aksi SPAMLAPOR
4. Melakukan penyusunan Rencana Aksi terkait pengentasan kemiskinan
5. Mendorong pelaksanaan SKM pada seluruh UPP, dan
6. Perbaikan terhadap komponen-komponen yang menjadi dasar terhadap survei penilaian integritas.

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi



pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2022-2026 yaitu **“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh seluruh SKPD. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dan hasil pengukuran peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	72,50	78,00	107,59%	75,00	80,74	107,65%
2	Nilai Sakip Daerah	65,00 (B)	61,02 (B)	93,88%	70,00 (BB)	61,68 (B)	88,11%
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72,015 Baik	65,027 Perlu Perbaikan	90,29%	73,943 Perlu Perbaikan	72,3196 Perlu Perbaikan	97,80%
Rata-rata Capaian Kinerja				97,24%	Rata-rata Capaian Kinerja		97,85%

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi capaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 sebesar 80,74 jika dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2023 yakni 78,00%, maka terjadi kenaikan sebesar 2,74 atau masuk dalam kategori Kinerja Layanan “Baik”. hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perangkat daerah yang disurvei melakukan perbaikan layanan meskipun masih ada beberapa perangkat daerah yang masih perlu perbaikan di beberapa unsur layanan juga perlu mempertahankan kinerja positif yang telah dicapai saat ini.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan Indeks Kepuasan masyarakat adalah :

1. Perlunya dilakukan pendampingan kepada beberapa Perangkat Daerah Pelaksana Layanan.



2. Peran aktif dalam hal informasi terhadap Perangkat Daerah terkait batas waktu pelaporan Survey Kepuasan Masyarakat.
3. Perlunya inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan guna meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.
4. Perbaikan pemanfaatan teknologi informasi untuk efektivitas waktu pelayanan melalui aplikasi dan peningkatan inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan/ ide-ide kreatif yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.
5. Pemerintah Daerah perlu melakukan perbaikan terhadap tiga unsur layanan yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur serta kompetensi pelaksana.
6. Kompetensi Pelaksana merupakan salah satu kunci Kualitas Pelayanan, maka perlunya dilaksanakan kegiatan secara berkala yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi layanan.

Nilai Sakip Daerah

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan melihat hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada tahun 2024 sebesar 61,68% dengan predikat “B” terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar 60,21 dengan predikat “B”. Jika dilihat dari tingkat realisasinya terjadi penurunan disebabkan setiap tahunnya terjadi kenaikan terhadap target capaian tersebut.

Tabel 2.7
Perkembangan capaian Nilai SAKIP Kab. Kep. Selayar
Tahun 2020 – 2024

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021 (akhir RPJMD)	Tahun 2022 (awal RPJMD)	Tahun 2023	Tahun 2024
Hasil evaluasi	CC	B	B	B 61,02	B 61,68



akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	58,02	60,21	60,49		
--	-------	-------	-------	--	--

Berdasarkan tabel perkembangan capaian nilai SAKIP tersebut, terjadi peningkatan capaian dari tahun ke tahun. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2024 menunjukkan nilai 61,68 dengan predikat “B”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di dukung dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Lingkungan Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2023 dari 28 Perangkat Daerah yang dievaluasi terdapat 5 (lima) Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP predikat BB, 11 Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP predikat B, 10 Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP predikat CC dan masih terdapat 2 Perangkat daerah yang memperoleh nilai SAKIP predikat C.

Telah dilakukan beberapa upaya perbaikan demi meningkatkan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, adapun upaya yang akan dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi Kemenpan RB , antara lain :

1. Mengunggah dokumen perencanaan turunan seperti Perjanjian Kinerja tahun berjalan seluruh Perangkat Daerah pada esr.menpan.go.id.
2. Memperbaiki kualitas pohon kinerja/*logical framework* dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu mengidentifikasi critical succes factor yang menggambarkan aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dan dibutuhkan dalam



mewujudkan kinerja utama, kemudian pohon kinerja dimanfaatkan menjadi dasar perumusan *cascading* kinerja hingga ke individu.

3. Melakukan revidi dan perbaikan dokumen perencanaan agar sasaran yang digunakan menjadi berorientasi hasil (outcome) dan indikator kinerja memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant and time-bound) dan cukup pada level Pemda maupun Perangkat Daerah.
4. Melakukan revidi dan perbaikan terhadap dokumen perencanaan sehingga sasaran dan indikator pada Renstra, Perjakin dan IKU menjadi selaras.
5. Memastikan setiap indikator kinerja memiliki definisi operasional, formulasi perhitungan, penanggung jawab, dan sumber data yang relevan dan spesifik terhadap kinerja yang akan dicapai.
6. Melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja menggunakan rencana aksi secara berkala.
7. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai salah satu dasar dalam pemberian *reward and punishment*.
8. Menyusun Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah yang komprehensif dan memberikan informasi yang memadai sesuai Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidi atas Laporan Kinerja.
9. Merevidi kembali Laporan Kinerja dengan memastikan bahwa target kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan.
10. Mengoptimalkan pemanfaatan Laporan Kinerja dengan memastikan penetapan target kinerja tahun berjalan lebih tinggi nilainya daripada realisasi kinerja tahun sebelumnya.
11. Mengunggah Laporan Hasil Evaluasi Internal milik seluruh Perangkat Daerah pada esr.menpan.go.id



12. Inspektorat selaku quality assurance dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dapat memberikan catatan dan rekomendasi yang mendalam.
13. Melakukan monitoring secara berkala terhadap rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada masing-masing Perangkat Daerah.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut antara lain:

1. Internal Birokrasi:
 - a. Masih lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD dengan kegiatan-kegiatan yang *project error*;
 - b. Masih rendahnya kapasitas dan komitmen Perangkat Daerah pada proses perencanaan;
 - c. Masih rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*).
2. Internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah:
 - a. Belum mampu menyediakan *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan yang baik, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
 - b. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan;
 - c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan serta pengendalian perencanaan pembangunan.

Adapun alternatif strategi yang dapat dilaksanakan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para aparatur perencana, khususnya terhadap tugas-tugas dibidang perencanaan;



2. Melaksanakan penyusunan perencanaan secara optimal dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah;
3. Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan Kepala Daerah dan bekerja sama dengan SKPD atau pihak yang terkait;
4. Meningkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerja sama.
5. Diperlukan adanya koordinasi yang menyeluruh agar pada tahun mendatang target dapat dicapai.

2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2024 sebesar 72,3196 terjadi kenaikan jika dibandingkan Tahun 2023 yang hanya sebesar 65,027, terjadi kenaikan sebesar 7,2926. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memperbaiki berbagai dimensi yang menjadi indikator penilaian.

Secara keseluruhan, data IPKD Kabupaten Kepulauan Selayar hingga saat ini menggambarkan perjalanan yang penuh tantangan namun juga penuh harapan, Pemerintah Daerah diharapkan untuk terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan agar dapat mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.

Beberapa Dimensi pembentuk Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

1. Dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan.
2. Dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD menunjukkan konsistensi yang baik dalam memenuhi berbagai kewajiban belanja mandatori.
3. Dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah,

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 yang telah disusun dan diserahkan kepada Badan



Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada tanggal 29 Februari 2024 oleh Bapak Bupati Kepulauan Selayar kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilaksanakan pemeriksaan atau diaudit pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang nantinya akan diberikan opini BKP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun Faktor yang dilakukan guna peningkatan pencapaian terhadap indikator pada tahun akan datang adalah :

1. Adanya peraturan perundangan yang berlaku
2. Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah
3. Adanya upaya seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Perangkat Daerah masing-masing.
4. Dari sektor pengawasan, inspektorat berperan penting dalam hal pemeriksaan laporan terhadap seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Faktor yang menghambat peningkatan capaian terhadap indikator tersebut disebabkan masih adanya kelemahan baik pada sistem pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun solusi yang dilakukan di tahun akan datang adalah :

1. Akan menindaklanjuti kelemahan pada sistem pengendalian intern
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.



Tujuan Strategis 2

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Tujuan strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2022-2026 yaitu **“Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan**. Tujuan ini didukung secara terpadu oleh Dinas PUTR, Dinas PMD, Distan KP, DPK, DLH, BPBD, Disdikpora dan Dinkes. Untuk mengukur tujuan kedua ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran pada Tahun 2024. Hasil pengukuran peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 2

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Gini	0,336	0,345	102,68%	0,320	0,329	102,81%
Rata-rata Capaian Kinerja				102,68%	Rata-rata Capaian Kinerja		102,81%

Rasio Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai indeks gini kurang dari 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat, dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada pada ketimpangan tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk kepulauan selayar pada tahun 2024 yang diukur oleh Rasio Gini adalah 0,329, menurun 0,016 poin dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar, 0,345. Ketimpangan pendapatan/pengeluaran yang direfleksikan dengan angka Gini Ratio untuk Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 sebesar 0,329 dan termasuk ketimpangan sedang. Artinya semakin mendekati “Satu” maka dikatakan ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar atau mendekati ketimpangan sempurna, sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan



sempurna.

Perhitungan indeks Gini pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih melalui pendekatan pengeluaran, hal ini disebabkan masih terbatasnya informasi yang didapat disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak ingin mempublikasikan penghasilannya.

Adapun beberapa hal yang mengakibatkan belum tercapainya target yaitu :

4. Perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat perlambatan pertumbuhan berbagai sektor lapangan usaha terutama pada sektor lapangan usaha unggulan yang menyumbang kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
5. Peranan perekonomian secara makro masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengembangkan dan meningkatkan sektor industri pengolahan serta sektor jasa pariwisata yang merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi (12,27%)
7. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang signifikan yang tidak diikuti oleh penurunan angka kemiskinan yang signifikan
8. Pemanfaatan sumber daya alam terutama sektor perikanan dan pariwisata belum optimal

Berikut beberapa upaya yang dilakukan guna mengatasi pencapaian target, yaitu :

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan pengembangan potensi ekonomi lokal daerah melalui hilirisasi dan investasi pada sektor pariwisata, kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan peranan sektor-sektor dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru dan distribusi pemerataan pendapatan masyarakat.



3. Diperlukan intervensi pemerintah untuk memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur yang memadai bagi perkembangan investasi, pariwisata dan kelancaran arus barang dan orang.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran kedua ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **102,71%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Desa Membangun	0,6650 (Berkembang)	0,6953	104,56	0,7000 (Maju)	0,719	102,71
Rata-rata Capaian Kinerja				104,56%	Rata-rata Capaian Kinerja		102,71%

Realisasi capaian Indeks Desa Membangun pada Tahun 2023 sebesar 0,6953% terjadi peningkatan bila dilihat dari target yang ditentukan sebesar 0,6650% dengan sebutan “berkembang”, jika dibandingkan dengan target capaian pada Tahun 2022, Indeks Desa Membangun sebesar 0,6670% dengan sebutan “berkembang”.

Dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun melibatkan beberapa



Perangkat Daerah, Adapun upaya dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian peningkatan Indeks Desa Membangun adalah :

1. Identifikasi IDM yang akan menaikkan indeks
2. Memetakan hasil identifikasi yang akan dinaikkan indeksnya agar rekomendasi dapat dijalankan oleh Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Desa sesuai kewenangan lokal desa
3. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait setelah hasil pemetaan didapatkan dengan tujuan agar Perangkat daerah dapat mengintervensi rekomendasi IDM tersebut.
4. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Multi Stakeholder (Tenaga Ahli, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa) agar pemetaan rekomendasi IDM dapat dimaksimalkan dalam bentuk kegiatan di Perangkat Daerah dan Desa.

Peningkatan status desa pada tahun 2024 diketahui terjadi peningkatan secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

3. Status Desa Sangat Tertinggal pada tahun 2024 sudah tidak ada
4. Status Desa Tertinggal pada tahun 2023 sebanyak 12 desa, terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi 6 desa
5. Status Desa Berkembang pada tahun 2024 sebesar 36 desa, pada tahun sebelumnya, jumlah desa berkembang sebanyak 42 desa, terdapat 2 desa tertinggal yang meningkat statusnya, dari tertinggal ke berkembang dan terdapat 4 desa berkembang yang meningkat statusnya menjadi desa maju dan desa mandiri.
6. Status Desa Maju pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yakni sebesar 17 desa dikarenakan 4 desa maju di tahun 2023 diantaranya meningkat statusnya menjadi desa mandiri, serta terdapat tambahan 4 desa baru dengan status berkembang di tahun 2023 menjadi desa maju di tahun 2024.
7. Status Desa Mandiri pada tahun 2024 melampaui target, dimana untuk tahun ke empat periode RPJMD ditargetkan 6 desa mandiri, namun dengan adanya program gerbangsari, untuk saat ini di Kabupaten Kepulauan Selayar, desa mandiri meningkat menjadi 22 desa.



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Perdesaan

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah. Untuk mengukur sasaran ketiga ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **99,46%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kemiskinan	10,54	12,27	116,41%	10,00	10,79	92,10%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,33	1,98	248,02%	2,20	2,05	106,82%
Rata-rata Capaian Kinerja				182,22%	Rata-rata Capaian Kinerja		99,46%

1. Tingkat Kemiskinan

Presentase penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2024 sebesar 10,79%, terjadi penurunan sebesar 1,48% poin dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 12,27%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Maret 2024 sebesar 14,94 ribu jiwa, turun sebanyak 1.950 jiwa terhadap Maret 2023.

Berdasarkan data BPS, total penduduk pada tahun 2024 berjumlah 142,46 ribu jiwa. Dari total jumlah penduduk tersebut, jumlah penduduk miskin di kabupaten kepulauan selayar pada Maret 2024 sebesar 14,94 ribu jiwa, jumlah tersebut turun 1.950 jiwa terhadap Maret 2023 (16,89 ribu jiwa) dan menurun 1.800 jiwa terhadap Maret 2022 (16,74 ribu jiwa).



Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan turunnya angka kemiskinan, diantaranya seperti :

8. Pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan terbukanya Lapangan Kerja Baru
9. Penyaluran bantuan yang tepat sasaran
10. Terjadi peningkatan terhadap pendapatan masyarakat, dan
11. Penurunan beban pengeluaran masyarakat

Jika dilihat dari target awal RPJMD maka persentase penduduk miskin mengalami penurunan dengan target awal sebesar 11,34. Adapun Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan adalah :

1. Setiap tahun dilakukan update data keluarga miskin agar penanganan kemiskinan dapat tersalurkan secara tepat sasaran.
2. Melalui Dinas Sosial dilakukan beberapa kegiatan antara lain :
 - Pemberian santunan hidup terhadap lanjut usia non potensial/ jompo terlantar, penyandang disabilitas dan anak yatim piatu.
 - Program nasional berupa pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan nasional
 - Program keluarga Harapan (PKH)
 - Program Nasional Sembako atau yang dikenal dengan BPNT Bantuan Pangan Non Tunai
 - Bantuan Langsung Tunai - Bahan Bakar Minyak (BLT - BBM)
3. Dinas Perumahan dan Permukiman melakukan bantuan penanganan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang sampai dengan tahun 2024 sudah tertangani sebanyak 22.599 unit.
4. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga memberikan bantuan Peralatan yang diharapkan dapat mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar berupa bantuan Pengadaan perlengkapan/aksesoris rias pengantin sebanyak 130 unit, Pengadaan rental komputer sebanyak 4 unit, Pengadaan pertukangan sebanyak 18 unit, Pengadaan perbengkelan sebanyak 10 unit, Pengadaan air kemasan 2 layer sebanyak 1 unit, Pengadaan mesin-mesin parut kelapa komplit sebanyak 2 unit.



2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah orang yang memiliki kualifikasi cukup tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, biasanya hal tersebut didapatkan pada masyarakat khususnya lulusan baru perguruan tinggi.

Realisasi indikator tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 adalah sebesar 2,05 persen terjadi penurunan sebesar 0,07 persen jika dibandingkan realisasi pada tahun 2023 yang sebesar 1,98 persen.

Angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 74,97 orang turun 4.087 orang dibanding Agustus 2023. Sejalan dengan menurunnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan sebesar 4,65 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian (2,09 persen poin), sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor Manufaktur (-3,61 persen poin).

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka adalah :

1. Ketidakselarasan antara keahlian pekerja dengan kebutuhan perusahaan
2. Minimnya pengalaman dari pencari kerja
3. Perubahan Industri
4. Kondisi ekonomi yang terjadi, dan
5. Isu diskriminasi

Beberapa upaya untuk mengatasi pengangguran terbuka diantaranya sebagai berikut :

1. Mendorong investasi di sektor-sektor yang menjanjikan peluang kerja baru.
2. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Memberikan insentif bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja baru.
4. Memperluas kesempatan kerja di sektor informal.



5. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja.
6. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pengangguran.

Tujuan Strategis 3

Meningkatkan fasilitas pembangunan Sumber Daya Manusi

Tujuan strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”**. Untuk mengukur tujuan ketiga ini terdapat 1 (satu) indikator tujuan dengan capaian kinerja tujuan pada Tahun 2024 adalah sebesar **104,32%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Sasaran ini didukung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hasil pengukuran peningkatan fasilitas pembangunan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 3

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,60	71,13	103,69	69,00	71,98	104,32
Rata-rata Capaian Kinerja				103,69%	Rata-rata Capaian Kinerja		104,32%

Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup



sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2024 mencapai 71,98 naik 0,85 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya yaitu 71,13. IPM Kabupaten Kepulauan Selayar rata-rata tumbuh secara signifikan setiap tahunnya. Peningkatan IPM 2024 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya, baik kualitas kesehatan, pendidikan maupun pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Hal ini sejalan dengan kondisi tahun sebelumnya.

Pada dimensi pendidikan, pada tahun 2024 penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah atau dapat menjalani pendidikan formal selama 12,62 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma 1. Angka ini menurun 0,07 % dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 12,69 tahun. Sementara, rata-rata lama Sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,14 % dari 8,35 tahun menjadi 8,49 tahun pada tahun 2024.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bagi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,48 tahun atau lebih lama 0,21 poin dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Sasaran strategis 4 ini juga merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Untuk mengukur sasaran keempat ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan



rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **117,32%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pendidikan	54,19%	63,08%	116,41%	55,83	63,97	114,58%
2	Indeks Kesehatan	81,95%	68,81%	83,96%	68,99	82,83	120,06%
Rata-rata Capaian Kinerja				100,19%	Rata-rata Capaian Kinerja		117,32%

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM.

Berdasarkan data statistik, Indeks Pendidikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2024 sebesar 63,97% terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan indeks pendidikan tahun 2023 yang hanya sebesar 63,08%.

Beberapa upaya yang diharapkan dapat meningkatkan indeks pendidikan adalah :

1. Memberikan motivasi dan dorongan bagi orangtua dan siswa akan pentingnya pendidikan dasar 9 tahun.
2. Dari segi tenaga pengajar (guru) di tunjang dengan penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
3. Memberikan peningkatan dan pengembangan Teknologi informasi dan komunikasi pendidikan bagi tenaga pendidik.
4. Pemenuhan rumah layak huni bagi keluarga siswa sehingga siswa dapat lebih fokus belajar dan hidup lebih tenang tanpa ada gangguan.



5. Dari segi kesehatan diperlukan partisipasi tenaga medis dengan mengunjungi sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan bagi siswa.

2. Indeks Kesehatan

Realisasi indikator kinerja terhadap indeks kesehatan tahun 2024 sebesar 82,83%, naik 7,39%, jika dibandingkan tahun 2023 yakni sebesar 75,44%. Jika Indeks Kesehatan Masyarakat terjadi kenaikan dari target yang telah ditentukan maka derajat kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih perlu perhatian khusus. Hal ini menjadi tugas Dinas Kesehatan untuk perbaikan peningkatan pada tahun akan datang.

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal peningkatan capaian dan realisasi kegiatan di bidang kesehatan antara lain:

1. Menyediakan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas;
2. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang upaya pemeliharaan kesehatan;
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung dan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang maksimal.
4. Membentuk Kader disetiap Desa untuk mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan

Adapun faktor – faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian indeks kesehatan antara lain ;

- Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat menjadi salah satu penyebab meningkatnya Usia harapan Hidup
- Pelaksanaan aktifkan posyandu dan vaksinasi bersama mitra/kelompok masyarakat.
- Pelaksanaan upaya deteksi dini
- Kampanye PHBS, Germas dan Program kesehatan lainnya.
- Adanya layanan upaya berhenti merokok (UBM)



- Penyebar luasan media informasi kesehatan melalui media promosi kesehatan
- Adanya dukungan dana dari berbagai sumber anggaran (APBD dan DAK Non Fisik).

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, . Untuk mengukur sasaran kelima ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **105,52%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi** Hasil pengukuran peningkatan daya beli masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

No	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengeluaran perkapita yang disetarakan	9.450.000	9.830.000	104,02	9.700.000	10.235.000	105,52 %
Rata-rata Capaian Kinerja				104,02 %	Rata-rata Capaian Kinerja		105,52 %

1. Pengeluaran Perkapita yang disetarakan

Pada tahun 2024 pengeluaran perkapita yang disetarakan mencapai 10.235.000 mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 9.830.000 atau 0,96 %. Dengan rata-rata capaian pada tahun 2024 yakni 105,52%. Hal ini berarti pengeluaran rata-rata rumah tangga yang ada di Kepulauan Selayar meningkat.

Pengeluaran Rumah tangga memberi sumbangsi besar dalam peningkatan pengeluaran perkapita. Rumah tangga merupakan



konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

Tujuan Strategis 4

Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman

Tujuan strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2022 yaitu **“Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman”**. Untuk mengukur tujuan keempat ini terdapat 2 (dua) indikator tujuan sasaran yang didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Dinas Perikanan. Untuk mengukur tujuan keempat ini terdapat 2 (dua) indikator tujuan dengan capaian kinerja tujuan pada Tahun 2024 adalah sebesar **78,61%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran tujuan optimalisasi pemanfaatan potensi kemaritiman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 4

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	5,27 – 7,03	3,67%	60,92%	6,50-8,00	3,33%	51,23%
2	PDRB /kapita	53,50	56,57%	105,74%	55,00	58,29%	105,98%
Rata-rata Capaian Kinerja				83,33%	Rata-rata Capaian Kinerja		78,61%

1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Berdasarkan data Rilis BPS, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar sepanjang tahun 2024 terhadap Tahun 2023 tumbuh sebesar 3.33%, capaian ini sedikit melambat jika dibandingkan tahun 2023



sebesar 3,67 %. Pada periode yang sama, ekonomi nasional tumbuh 5,03%, sementara ekonomi sulawesi selatan tumbuh 5,02%.

Pertumbuhan terjadi pada sektor jasa lainnya yang memiliki kontribusi terbesar yakni 11,72% terhadap perekonomian Kepulauan Selayar, sektor industri pengolahan tumbuh 8,60%, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 9,31% sementara administrasi pemerintahan, pertahanan dan sosial wajib tumbuh 8,06%.

Tabel 3.12.1
Perkembangan capaian Nilai Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kep. Selayar
Tahun 2020 - 2023

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi	-1,78%	4,02%	3,67%	3,67%	3,33%

Berdasarkan tabel perkembangan capaian nilai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikatakan tumbuh melambat di setiap tahunnya.

2. PDRB/kapita

Pendapatan perkapita penduduk (income perkapita) adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah yang diperoleh dari hasil pembagian antara pendapatan Daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDRB perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya maka semakin besar juga kemungkinan daerah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Data Badan Pusat Statistik Tahun 2024 menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 Income perkapita penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar 58,29 juta,- sedangkan Tahun 2023 sebesar 56,57 juta,-. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan penduduk Kabupaten



Kepulauan selayar setiap tahunnya. Income perkapita penduduk sering diring digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah; semakin besar Income perkapita penduduknya maka semakin makmur daerah tersebut. Adapun pencapaian indikator tersebut di dukung oleh:

1. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan perkapita melalui berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain senantiasa meningkatkan koordinasi baik di tingkat kecamatan, sidak ke pasar, toko dan gudang sembako yang ada, kemudian peningkatan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi BBM, gas LPG.
2. Laju pertumbuhan ekonomi yang mana penunjang utamanya adalah konsumsi rumah tangga disamping konsumsi makanan dan minuman, kesehatan, transportasi, komunikasi dll.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Usaha Perikanan

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa OPD yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Dinas Perikanan. Untuk mengukur sasaran keenam ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **85,11%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan usaha perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase kontribusi sektor perikanan	27,00%	27,09%	100,33%	28,00	23,83%	85,11%



	terhadap PDRB						
Rata-rata Capaian Kinerja				100,33%	Rata-rata Capaian Kinerja		85,11%

Realisasi Presentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar 23,83% jika dilihat realisasi tahun 2023 yakni 27,09% maka terjadi penurunan terhadap realisasi presentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB.

Adapun upaya – upaya yang dilakukan agar laju pertumbuhan PDRB subsektor perikanan lebih meningkat dan stabil dengan menetapkan arah kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat perikanan melalui kegiatan penguatan sarana prasarana produksi, pengembangan fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan penguatan kapasitas dan pemebrdayaan kelompok

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Usaha Pariwisata

Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa OPD yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk mengukur sasaran ketujuh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **54,60%** dengan kategori predikat **Rendah**. Hasil pengukuran Peningkatan usaha pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase kontribusi PAD	5,59%	3,39%	60,64%	6,41%	3,5%	54,60%



	sektor Pariwisata terhadap PAD						
Rata-rata Capaian Kinerja				60,64%	Rata-rata Capaian Kinerja		54,60%

Presentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD

Salah satu sumber potensial PAD adalah sektor Pariwisata, Keberadaan obyek wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan alam dan lingkungan serta memupuk rasa cinta tanah air.

Realisasi capaian terhadap presentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2024 sebesar 3,5% terjadi kenaikan realisasi capaian jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 3,39%. Realisasi capaian tersebut masih jauh dari target yang ditentukan.

Adapun faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah :

1. Belum maksimalnya pengelolaan tempat destinasi dengan baik
2. Belum adanya bentuk kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Bumdes Bontomarannu terkait pengelolaan Puncak tanadoang.
3. Akses menuju lokasi destinasi masih kurang baik
4. Fasilitas daya tarik wisata masih kurang baik
5. Masyarakat kurang aktif dalam membantu pengembangan pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berupaya penuh dalam meningkatkan PAD melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, adapun upaya yang akan dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kerjasama antara para pelaku wisata
2. Memberikan kemudahan-kemudahan untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya.
3. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab dalam menjaga kelestarian lingkungan
4. Pengembangan pariwisata pada masyarakat khususnya yang berada dekat dengan lokasi tempat rekreasi.



5. Mengembangkan Daya tarik dan destinasi unggulan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Meningkatkan pemasaran pariwisata, dan
7. Mengembangkan SDM dan Ekonomi kreatif.

Sasaran Strategis 8

Meningkatnya Usaha Industri, Transportasi dan Perdagangan

Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk mengukur sasaran kedelapan ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **90,47%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan usaha industri, transportasi dan perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	14%	13,25	94,64%	15%	13,57	90,47%
Rata-rata Capaian Kinerja				94,64%	Rata-rata Capaian Kinerja		90,47%

Realisasi terhadap indikator presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2024 sebesar 13,57% terjadi kenaikan jika dibandingkan realisasi tahun 2023 yang hanya sebesar 13,25 persen.

Peningkatan sektor transportasi disebabkan adanya perbaikan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten



Kepulauan Selayar terutama pada pelayanan parkir ditepi jalan dan kawasan kuliner, penyediaan dan perbaikan fasilitas perlengkapan jalan serta layanan perizinan seperti penerbitan rekomendasi penutupan jalan dan rekomendasi pemuatan BBM untuk kapal laut motor yang menuju kewilayah kepulauan serta layanan sarana dan prasarana seperti pada terminal benteng dan fasilitas darat pada pelabuhan pematata.

Untuk meningkatkan sektor perdagangan di Kabupaten Kepulauan Selayar maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan adanya investasi. Dengan dilakukannya investasi pada sektor perdagangan maka diharapkan sektor perdagangan dapat berkembang lebih baik lagi di masa akan datang.

Faktor penyebab sehingga tidak tercapainya target dari sektor perdagangan melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu :

1. Belum tersebarnya investasi pada master plan pengembalian investasi di kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Sektor /lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya berada pada sektor sekunder dan tersier, masih minim minat investor untuk menanamkan usahanya pada sektor primer misalnya di sektor pertanian dan perkebunan.
3. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara rutin
4. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN masih belum optimal disebabkan ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan diantaranya disebabkan tidak adanya regulasi yang mewajibkan penyampaian LKPM yang bersifat memaksa.

Beberapa solusi dari sektor perdagangan melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan usaha kecil dan menengah yaitu :

1. Melakukan peningkatan sarana distribusi perdagangan melalui kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.



2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi sarana distribusi perdagangan (pasar rakyat) di seluruh kecamatan dengan memastikan seluruh sarana perdagangan yang telah dibangun telah dipergunakan.

Tujuan Strategis 5

Meningkatkan Aktualisasi nilai budaya

Tujuan strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hasil pengukuran peningkatan aktualisasi nilai budaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	44	79	179,55%	48	50	104,17%
Rata-rata Capaian Kinerja				179,55%	Rata-rata Capaian Kinerja		104,17%

Realisasi terhadap indeks pembangunan kebudayaan pada tahun 2024 sebesar 50%, terjadi penurunan jika dilihat dari capaian realisasi tahun 2023 yang sebesar 79%.

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan salah satu instrumen yang didesain untuk melihat sinergitas kontribusi unsur kebudayaan dalam mendukung pembangunan.

Pembinaan warisan budaya benda dan tak benda harus dilakukan agar kebudayaan daerah di Kepulauan Selayar tetap lestari dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari, minimal ada yang dapat dilihat oleh anak cucu dikemudian hari karena masih tersimpan dan terawat utuh dalam bentuk dokumen, gambar, benda atau manuskrip kuno.



Kekayaan budaya Indonesia sesungguhnya luar biasa, namun sayang belum terkelola dengan baik, begitu pula dengan kekayaan budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan diperlukan :

1. Pembinaan warisan budaya benda dan tan benda agar kebudayaan daerah di Kepulauan Selayar tetap lestari dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari.
2. Diperlukan pengawasan cagar alam dan cagar budaya.
3. Pemeliharaan cagar budaya agar tetap terjaga keasliannya.

Sasaran Strategis 9

Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial

Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mengukur tujuan kelima ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **108,36%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Ketahanan Sosial	0,7000	0,7592	108,46	0,7100	0,7694	108,36%
Rata-rata Capaian Kinerja				108,46%	Rata-rata Capaian Kinerja		108,36%



Realisasi indeks ketahanan sosial pada tahun 2024 sebesar 0,7694 terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 0,7592, hal ini disebabkan target yang ditentukan pada tahun 2023 lebih besar dari tahun sebelumnya. Kenaikan indeks ketahanan sosial dipengaruhi oleh beberapa dimensi diantaranya dimensi modal sosial, dimensi kesehatan dan dimensi pendidikan.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan indeks ketahanan sosial yaitu :

1. Toleransi tinggi terhadap suku, ras dan agama.
2. Aman dalam beribadah.
3. Terpenuhinya kebutuhan dari sandang, pangan dan papan.
4. Pemberian pelayanan kesehatan pada masyarakat dengan kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan baik di Rumah Sakit, PKM ataupun Pustu.
5. Keinginan masyarakat untuk berobat di layanan kesehatan seperti Rumah Sakit, PKM maupun Pustu.
6. Pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk berobat dengan layanan jaminan kesehatan seperti KIS, BPJS Kesehatan.
7. Pemerintah menyediakan sekolah baik tingkat dasar dan menengah, mulai dari kecamatan daratan yang dapat dijangkau hingga kecamatan kepulauan yang sulit dijangkau.
8. Pemerintah memudahkan perizinan pembukaan lembaga pendidikan non formal, seperti pusat bimbingan belajar, les bahasa inggris dan lainnya.

Tujuan Strategis 6

Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan keagamaan

Tujuan strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik. Untuk mengukur tujuan keenam ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-



rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **115,71%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kapasitas kelembagaan keagamaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kesalehan Sosial	65,15	76,87	117,99	67,30	77,87	115,71
Rata-rata Capaian Kinerja				117,99%	Rata-rata Capaian Kinerja		115,71%

Indeks Kesalehan Sosial

Hasil perhitungan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2024 sebesar 77,87 terjadi kenaikan dibandingkan Tahun 2023 yang hanya sebesar 76,87, mengalami kenaikan sebesar 1,00 poin.

Terdapat 5 dimensi pembentuk IKS yaitu :

1. Solidaritas Sosial = 65,62%
2. Kerjasama/ mutualitas = 66,32%
3. Toleransi = 87,81%
4. Keadilan = 84,03%
5. Ketertiban Umum (stabilitas) = 85,55

Secara umum, tingkat Kesalehan Sosial masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar cukup baik berdasarkan skor atau nilai pada masing-masing dimensi, dari lima dimensi pembentuk IKS, dimensi Toleransi mencatat skor tertinggi (87,81) hal ini menunjukkan sikap masyarakat yang menghargai keberagaman dan kebersamaan, sebaliknya dimensi solidaritas sosial (65,62) dan kerjasama/ mutualitas (66,32) memperoleh skor terendah yang mengindikasikan masih perlunya penguatan nilai-nilai kebersamaan dan kontribusi kolektif.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Kesalehan Sosial adalah :



1. Memaksimalkan program/ kegiatan seperti program sikamaseang (satu menanggung satu), fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat, program berbagi berbasis lingkungan setempat dan program sedekah jumat untuk meningkatkan dimensi sosial dan kerjasama.
2. Peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam menjaga dan mengembangkan kerifan lokal masyarakat selayar, seperti annyorong lopi, angngangka sapo, akrera, aklampareng dan akmuhakka.
3. Mendorong dan memberdayakan lembaga keagamaan seperti, masjid, musholah, majelis taklim, dll untuk menjadi pusat pembinaan kesalehan sosial.
4. Meningkatkan kualitas data dan melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk mengukur dan mengevaluasi perkembangan kesalehan sosial di daerah, serta mengidentifikasi masalah-masalah dan tantangan-tantangan yang dihadapi.

Sasaran Strategis 10

Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar. Untuk mengukur sasaran kesepuluh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **-170,48%** dengan kategori predikat **Sangat Kurang**. Hasil pengukuran peningkatan toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan adalah sebagai berikut:



Tabel 3.19
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka Kriminalitas	115 kasus	237 kasus	-6,087%	105 kasus	389 kasus	- 170,48%
Rata-rata Capaian Kinerja				-6,087%	Rata-rata Capaian Kinerja		- 170,48%

Realisasi capaian pada tahun 2022 terhadap kasus kriminalitas adalah sebanyak 203 kasus, sedangkan pada tahun 2023 jumlah kasus kriminalitas meningkat menjadi 237 kasus, jika dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi kenaikan tingkat kejahatan sebanyak 389 kasus, berdasarkan jumlah tersebut perilaku kriminalitas yang paling banyak terjadi di Kecamatan Benteng. Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban, selain itu pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku belum optimal sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar hukum, baik pelanggaran berat maupun ringan.

Upaya yang dilakukan agar tindak kriminalitas berkurang/diminimalisir yaitu :

1. Melakukan trantibum secara rutin
2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan trantibum
3. Menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan poskamling/ronda

Tabel 3.19.1
Angka Kriminalitas Tahun 2020-2024
Data Angka Kriminal per Kecamatan

No	KEPOLISIAN SEKTOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pasimarannu	-	9	3	4	2
2	Pasilambena	-	-	-	9	-
3	Pasimasunggu	5	7	7	10	5
4	Takabonerate	-	4	7	10	2
5	Pasimasunggu Timur	-	-	-	-	-
6	Bontosikuyu	2	9	11	12	19



7	Bontoharu	1	-	-	-	-
8	Benteng	133	153	273	310	315
9	Bontomanai	1	-	5	5	16
10	Bontomatene	4	3	11	7	29
11	Buki	-	-	-	-	1
	JUMLAH	146	185	317	367	389

Sumber: Selayar dalam angka Tahun 2025 (Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Selayar)

Tujuan Strategis 7

Meningkatkan Pelestarian lingkungan hidup

Tujuan strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Untuk mengukur tujuan ketujuh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **102,28%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Pengukuran Capaian Tujuan Strategis 7

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	64,80 cukup baik	64,25 sedang	99,15	66,14 Cukup baik	67,65	102,28
Rata-rata Capaian Kinerja				99,15%	Rata-rata Capaian Kinerja		102,28%

Realisasi indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2024 sebesar 67,65 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2023 sebesar 64,25. Dengan kata lain Indeks kualitas lingkungan hidup daerah di kabupaten kepulauan selayar termasuk kategori “Sedang” atau tergolong baik.



Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam peningkatan pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup daerah antara lain :

1. Diperlukan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air seperti patroli air.
2. Melakukan koordinasi antar pusat, provinsi dan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan mutu air.
3. Peningkatan peran dunia usaha untuk melaksanakan pengelolaan air limbah.
4. Pembangunan sarana dan prasarana pengolahan air limbah terutama IPAL dan USK.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kajian lingkungan hidup strategis.
6. Meningkatkan aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, limbah B3.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup.

Sasaran Strategis 11

Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan

Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Untuk mengukur sasaran kesebelas ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2024 adalah sebesar **99,02%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:



Tabel 3.21
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11

No.	Indikator	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kualitas Air	54,00	51,18	94,78	56,00	52,22	93,25%
2	Indeks Kualitas Udara	85,49	90,71	106,11	85,59	94,56	110,48%
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	45,06	37,76	83,79	47,56	44,39	93,33%
Rata-rata Capaian Kinerja				94,89%	Rata-rata Capaian Kinerja		99,02%

1. Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air pada Tahun 2024 berada pada angka 52,22 dari target yang direncanakan sebesar 56,00 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93,25%, terjadi kenaikan sebesar 1,04% jika dibandingkan realisasi pada tahun 2023 sebesar 51,18%. Indeks Kualitas Air jika dibandingkan dengan IKA tingkat provinsi dan pusat maka IKA Kabupaten Kepulauan Selayar masih dalam kategori Cukup Baik.

Untuk meningkatkan capaian kinerja indeks kualitas air pada tahun berikutnya maka dilakukan upaya sebagai berikut :

- Penambahan frekuensi pemantauan dengan lokasi pemantauan yang mewakili kondisi tercemar, agak tercemar dan tidak tercemar.
- Waktu pemantauan juga mewakili musim kemarau dan penghujan sehingga diperoleh data yang berbeda karena kemampuan air sungai untuk mengencerkan bahan pencemar yang masuk ke badan sungai.
- Perlu pengendalian pencemaran melalui edukasi dan peran aktif masyarakat melalui penggunaan bahan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara menurunkan beban pencemar pada sumber pencemar.
- Pemulihan kualitas air di badan air (pemurnian kualitas air dan perbaikan hidromorfologi).
- Peningkatan peran dunia usaha untuk pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai perizinan yang telah ditetapkan



- f. Peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan air limbah industri, domestik dan Usaha Skala Kecil (USK).
- g. Perlunya mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengelola limbah cair rumah tangga melalui IPAL komunal.
- h. Penegakan hukum terhadap industri-industri sepanjang sungai yang belum mempunyai IPAL.
- i. Mendorong dunia usaha untuk peduli melalui CSR dan mendorong pelaksanaan mengikuti kaidah-kaidah pelestarian LH.
- j. Perlu sosialisasi yang secara terus menerus kepada publik tentang pentingnya menjaga kualitas air melalui kampanye dan gerakan hemat air.
- k. Mencegah aliran air permukaan (*run off*) langsung ke sungai dan laut.

2. Indeks Kualitas Udara

Nilai Indeks Kualitas Udara tahun 2024 sebesar 94,56 persen, terjadi peningkatan sebesar 3,85 % dibandingkan tahun 2023 yakni 90,71%, hal ini menunjukkan indeks kualitas udara di Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong baik.

Indeks Kualitas Udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemaran utama yaitu oksidan /ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (Co), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun saat ini perhitungan indeks kualitas udara hanya menggunakan dua parameter saja yaitu NO₂ dan SO₂.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan di tahun akan datang yaitu :

- 1. Penyusunan rencana pengendalian pencemaran udara melalui penyusunan inventarisasi emisi untuk mengetahui pemetaan dan roadmap sumber-sumber emisi dan beban emisi
- 2. Pengendalian sumber-sumber emisi yang berasal dari:
 - b. Sumber bergerak:
 - Manajemen transportasi dan peningkatan transportasi massal
 - Kegiatan uji emisi secara berkala



- Peningkatan biaya parkir
- Perda terkait kendaraan bermotor
- Pembatasan usia dan jenis kendaraan di area tertentu
- Hari bebas kendaraan bermotor
- c. Sumber tidak bergerak:
 - Penaatan baku mutu industri
 - Pengawasan implementasi izin lingkungan dan pembinaan perizinan lingkungan
- 3. Pemantauan kualitas udara ambien secara kontinyu dan manual
- 4. Upaya lainnya:
 - a. Penanganan kebakaran hutan dan lahan
 - b. Penyediaan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - c. Penyediaan dan pengembangan jalur pejalan kaki serta jalur sepeda yang aman dan nyaman
 - d. Peraturan terkait kawasan bebas asap rokok (KTR) dan
 - e. Penggunaan energi ramah lingkungan

Hal-hal yang menyebabkan terjadinya pencemaran kualitas udara adalah:

1. Kawasan Industri (PLTD Tangkak) yang menggunakan diesel dengan solar sebagai bahan bakar sehingga kandungan SO₂ besar dan lebih tinggi dari NO₂.
2. Kawasan perkantoran, kandungan SO₂ lebih tinggi dari NO₂ dikarenakan tepat disamping kawasan tersebut merupakan akses keluar masuk truk ke pertambangan dengan aktivitas pengangkutan yang tinggi, juga ruas jalan di depan kawasan perkantoran juga merupakan jalur untuk kendaraan truk dan kendaraan besar lainnya.
3. Kawasan permukiman khususnya jalan sudirman, kandungan SO₂ hampir sama tinggi dengan No₂. Hal ini dapat terjadi karena merupakan titik ramai lalu lintas dengan 5 arah lalu lintas, tanpa lampu merah dan merupakan batas kendaraan besar seperti truk untuk tidak masuk ke kota sehingga hal ini membuat lalu lintas padat sehingga terjadi peningkatan emisi gas buang kendaraan.



4. Kandungan SO₂ besar dan lebih tinggi dari NO₂ pada kawasan transportasi khususnya terminal benteng, hal ini dikarenakan angkutan penumpang yang menggunakan solar lebih banyak dibandingkan dengan bensin dan umur kendaraan banyak di atas lima tahun.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Realisasi indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2024 sebesar 44,39 terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 37,76. Hal ini menunjukkan indeks tutupan lahan kabupaten kepulauan selayar masih tergolong kurang baik. Untuk mencapai target pencapaian tersebut maka diperlukan inventarisasi data ruang terbuka hijau (RTH) secara menyeluruh sebagai salah satu indikator yang disyaratkan dalam IKL.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan IKL dengan meningkatkan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka, juga meningkatkan tutupan vegetasi dengan melakukan penghijauan dan reboisasi yang dilaksanakan di 10 Kecamatan, yang mana pelaksanaannya dalam bentuk penyediaan bibit tanaman, baik tanaman kayu-kayuan maupun tanaman yang sifatnya multi purpose treespecies (MPTS).

Dalam rangka mencapai target kinerja sebanyak 25 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat pada rincian realisasi anggaran berikut ini:

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	40.000.000	37.874.300	94,69%
2	Meningkatnya kepercayaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	533.000.000	522.048.875	97,94%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
	masyarakat terhadap pelayanan	Nilai Sakip Daerah	7.000.000	6.387.200	91,25%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	155.315.086.242	145.741.959.016	93,84%
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	8.746.292.700	6.740.833.275	77,07%
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	1.430.000.000	1.421.964.800	99,44%
5	Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas Perekonomian Pedesaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	880.202.000	837.554.100	95,15%
		Tingkat Kemiskinan	2.775.980.000	2.743.765.100	98,84%
6	Meningkatkan fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	907.071.300	879.250.275	96,93%
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Pendidikan	92.849.985.680	86.611.893.850	93,28%
		Indeks Kesehatan	83.696.759.088	68.272.403.262	81,57%
8	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang disetarakan	3.990.805.800	3.955.214.500	99,11%
9	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	2.329.160.500	2.310.842.464	99,21%
		PDRB/Kapita	818.097.000	655.569.608	80,13%
10	Meningkatnya usaha perikanan	Presentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3.166.405.200	3.115.940.135	98,41%
11	Meningkatnya usaha pariwisata	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	2.648.124.800	2.630.587.803	99,34%
12	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	Presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	1.738.384.500	1.479.396.455	85,10%
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	888.861.800	883.988.082	99,45%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
14	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan sosial	375.858.300	369.108.700	98,20%
15	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	Indeks Kesalehan sosial	350.000.000	344.412.675	98,40%
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka Kriminalitas	1.055.032.700	1.034.787.188	98,08%
17	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup daerah	6.305.157.300	6.274.793.844	99,52%
18	Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks Kualitas Air	1.049.643.900	1.037.506.815	98,84%
		Indeks Kualitas Udara	1.558.416.800	1.549.399.460	99,42%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	3.697.096.600	3.687.887.569	99,75%

II.3.5. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA DIKAITKAN DENGAN HASIL (KINERJA) YANG TELAH DICAPAI

Tingkat efektifitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan, sedangkan efisiensi merupakan penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang maksimum. Berikut ini perbandingan antara tingkat efektifitas dan efisiensi sumber daya terhadap perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang terdiri atas 25 (dua puluh lima) sasaran.

Tabel 3.23
Tingkat Efektivitas sumber daya Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat efisiensi
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	98,84%	89,04%	-9,8%



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat efisiensi
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,94%	107,65%	9,71%
		Nilai Sakip Daerah	91,25%	88,11%	-3,14%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	93,84%	97,80%	3,96%
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	77,07%	102,81%	25,74%
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	99,44%	102,71%	3,27%
5	Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitas Perekonomian Pedesaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	95,15%	106,82%	11,67%
		Tingkat Kemiskinan	98,84%	92,10%	-6,74%
6	Meningkatkan fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	96,93%	104,32%	7,39%
7	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Indeks Pendidikan	93,28%	114,58%	21,3%
		Indeks Kesehatan	81,57%	120,06%	38,49%
8	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita yang disetarakan	99,11%	105,52%	6,41%
9	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	99,21%	51,23%	-47,98%
		PDRB/Kapita	80,13%	105,98%	25,85%
10	Meningkatnya usaha perikanan	Presentase Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	98,41%	85,11%	-13,3%
11	Meningkatnya usaha pariwisata	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	99,34%	54,60%	-44,74%
12	Meningkatnya usaha industri, transportasi, dan perdagangan	Presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	85,10%	90,47%	5,37%
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	99,45%	104,17%	4,72%
14	Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan sosial	98,20%	108,36%	10,16%
15	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	Indeks Kesalehan sosial	98,40%	115,71%	17,31%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat efisiensi
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka Kriminalitas	98,08%	-170,48%	-268,56%
17	Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup daerah	99,52%	102,28%	2,76%
18	Menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan	Indeks Kualitas Air	98,84%	93,25%	-5,59%
		Indeks Kualitas Udara	99,42%	110,48%	11,06%
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	99,75%	93,33%	-6,42%

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 25 (dua puluh lima) sasaran dan yang diperjanjikan dalam RPJMD, terdapat 16 (enam belas) sasaran dengan tingkat efisiensi cukup baik dengan rata-rata capaian tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebesar 12,82%. Selain itu terdapat 9 sasaran dengan tingkat efisiensi kurang baik. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap pencapaian kinerja misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini digambarkan hubungan antara sasaran, indikator kinerja dengan program yang mendukung pencapaian indikator tersebut serta OPD penanggung jawab.



Tabel 3.24
Keterkaitan Sasaran Strategis, IKU dan Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah,
2	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretariat Daerah, Bappelitbangda
		Nilai Sakip Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP)	Sekretariat Daerah,
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Program penyelenggaraan pengawasan 2. Program pengelolaan keuangan daerah 3. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Program penelitian dan pengembangan daerah	Inspektorat, BPKPD, Bappelitbangda
3	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Rasio Gini	1. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian 2. Program pembinaan perpustakaan 3. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia kesehatan	Distan KP, DPK, Disdikpora, Dinkes
4	Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan	Indeks Desa Membangun	1. Program Administrasi Pemerintahan 4. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Dinas Pemerintahan dan Desa
5	Meningkatnya kapasitas SDM dan fasilitasi Perekonomian Perdesaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. 2. Program penempatan tenaga kerja	Disperinaker
		Tingkat Kemiskinan	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program perlindungan dan jaminan sosial	Dinsos
6	Meningkatnya Fasilitas pembangunan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	1. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 2. Program penelitian dan pengembangan daerah	Bappelitbangda



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

7	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Indeks Pendidikan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidikan dan tenaga kependidikan	Disdikpora
		Indeks Kesehatan	1. Program pemenuhan upaya-upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 2. Program peningkatan kapasitas Sumber daya manusia Kesehatan 2. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Dinkes
8	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran perkapita yang disetarakan	1. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Stabilitas harga barang kebutuhan pokok barang penting 3. Pengembangan Ekspor 4. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 5. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi 6. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi 3. Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Disdag KUKM
9	Mengoptimalkan pemanfaatn potensi kemaritiman	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	1. Program Perekonomian dan Pembangunan 7.	Setda
		PDRB/kapita	1. <i>Program promosi penanaman modal</i> 2. <i>Program pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i> 3. <i>Program pelayanan penanaman modal</i> 2. <i>Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal</i>	Dinas PMPTSP
10	Meningkatnya usaha perikanan	Presentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	1. Program pengelolaan perikanan tangkap 2. Program pengelolaan perikanan budidaya 3. Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 1. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan
11	Meningkatnya usaha pariwisata	Persentase kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi pariwisata 2. Pemasaran Pariwisata 3. Pengembangan Sumber daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi kreatif 4. Pengembangan Kebudayaan 5. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

			4. Pengeloan permuseuman	
12	Meningkatnya usaha industri, transportasi dan perdagangan	Presentase kontribusi sektor industri pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	1. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) 2. Program pengelolaan pelayaran 3. Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal 6. Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Dinas Perhubungan Dinas PMPTSP
13	Meningkatkan aktualisasi nilai budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	4. Program pengembangan kebudayaan	Disparbud
14	Meningkatnya usaha pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial	Indeks Ketahanan Sosial	1. Program Administrasi Pemerintahan 5. Program pengembangan kebudayaan	Dinas PMD, Dinas Pariwisata dan kebudayaan
15	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan	Indeks Kesalehan sosial	2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
16	Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan	Angka kriminalitas	3. Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP dan damkar
17	Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1. Program perencanaan lingkungan hidup 2. Program pembinaan dan pengawasan terhadap zin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 3. Program penanganan pengaduan kegiatan Lingkungan Hidup 4. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 5. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) 6. Program pengendalian Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (B3) 7. Program Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (Mha), kearifan lokal dan hak Mha yang terkait dengan PPLH 8. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan	Dinas Lingkungan Hidup



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024

			penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 9. Program penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat 4. Program Pengelolaan persampahan	
--	--	--	--	--



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sesuai definisinya Tugas Pembantuan merupakan salah satu azas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berfungsi untuk mendistribusikan tugas dari pemerintah kepada pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau penugasan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi atas dasar prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaran pemerintahan.

3.1. IDENTIFIKASI TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PUSAT ATAU PROVINSI

1. BIDANG URUSAN PERTANIAN

1.1. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian

a. Dasar Hukum

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Perubahan ke 8
Nomor : 018.08.4.199133/2025, tanggal 7 Agustus 2025.
- b. Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran kinerja
Tahun Anggaran 2025

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diterima dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Total



anggaran yang diberikan Rp. 201.630.000,- (Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) . Dengan Realisasi sebesar Rp. 183.580.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), atau sebesar 91,05 %.

c. Program dan Kegiatan

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan :

a) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida.

- Fokus utama Tugas Pembantuan ini diarahkan pada fasilitas pupuk dan pestisida, yang mencakup kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi penerima pupuk bersubsidi. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi disalurkan secara tepat sasaran kepada petani yang berhak melalui proses pendataan berbasis sistem, sehingga meningkatkan akurasi data penerima dan mengurangi potensi penyimpangan penyaluran. Dukungan anggaran dialokasikan untuk belanja bahan, honorarium tim pendataan dan verifikasi, serta perjalanan dinas pengawalan dan koordinasi di lapangan.
- Selain itu, Tugas Pembantuan juga mencakup pengawasan peredaran pupuk dan pestisida, yang diwujudkan melalui kegiatan monitoring, pembinaan, serta penyusunan laporan pengawasan. Kegiatan ini berperan penting dalam menjaga ketersediaan pupuk dan pestisida sesuai ketentuan serta melindungi petani dari peredaran sarana produksi pertanian yang tidak memenuhi standar. Output kegiatan ini berupa laporan pengawasan yang menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat dan provinsi. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis tersebut, dialokasikan pula anggaran Dukungan Manajemen,



khususnya layanan manajemen keuangan. Dukungan ini meliputi honorarium pengelola keuangan, belanja operasional, serta koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat. Dukungan manajemen ini memastikan bahwa pelaksanaan Tugas Pembantuan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi keuangan negara. Program Dukungan Manajemen

2. Program Dukungan Manajemen

a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP.

- Program ini meliputi layanan manajemen keuangan. Dukungan ini meliputi honorarium pengelola keuangan, belanja operasional, serta koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat. Dukungan manajemen ini memastikan bahwa pelaksanaan Tugas Pembantuan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi keuangan negara

d. Anggaran

APBN dengan jumlah dana : Rp. 155.330.000,-(Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

e. Tahapan pelaksanaan kegiatan

1. kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi penerima pupuk bersubsidi.
 - Kelompok tani yang memenuhi kriteria CPCL mengusulkan permohonan bantuan pemerintah kepada Dinas Pertanian Kabupaten melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)/Petugas Lapangan dengan melengkapi Identitas Ketua dan Anggota Poktan disertai NIK, alamat jelas, jenis dan luas lahan, komoditas yang diusahakan, kebutuhan pupuk dan informasi lainnya yang dibutuhkan. Dinas Pertanian Kabupaten/kota melakukan



verifikasi atas usulan CPCL. Hasil verifikasi ditetapkan dalam bentuk SK CPCL oleh kepala Dinas Pertanian Kab/Kota. Proposal dan CPCL tersebut diusulkan melalui e-proposal.

2. Data CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) yang telah dikumpulkan disusun dan diinput ke dalam system pengelolaan pupuk bersubsidi (e- RDKK).
3. Dinas membentuk Tim Pendataan, Verifikasi, dan Validasi sampai tingkat kecamatan/desa.
4. Dinas melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual serta melakukan validasi sesuai kewenangan yang didelegasikan.
5. Kabupaten berkoordinasi secara berjenjang dengan provinsi sebagai pembina teknis.
6. Kementerian/Lembaga melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan.
7. Data hasil validasi menjadi dasar penetapan alokasi pupuk bersubsidi.
8. Penyaluran dilakukan melalui kios resmi, termasuk mekanisme Kartu Tani.
9. Dinas melaksanakan pengawasan lapangan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi.
10. Dinas wajib menyusun laporan fisik dan keuangan secara berkala.
11. Laporan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga pemberi tugas melalui provinsi.

f. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

1. Target Kinerja

a. Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

1. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - a. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida.



- Penerima Pupuk Bersubsidi yang diverifikasi Pendataan Penerimaan Pupuk Bersubsidi. - Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi.
- Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida - Persiapan Monev dan Pelaporan - Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dari Ditjen Prasarana dan Sarana

2. Program dukungan manajemen

- a. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen PSP
- b. Layanan Manajemen Keuangan
- b. Target anggaran sebesar Rp. 201.630.000,- (Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

2. Realisasi

- a. Capaian realisasi program/kegiatan sebesar 91,05% dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

a) Fasilitas Pupuk dan Pestisida

(1) Penerima Pupuk Bersubsidi yang diverifikasi :

- Pendataan Penerimaan Pupuk Bersubsidi.
- Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi.

b) Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida:

- Persiapan Monev dan Pelaporan
- Pelaksanaan Kegiatan

2. Program dukungan manajemen:



- a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen PSP
 - (1) Layanan Manajemen Keuangan
- b. Realisasi anggaran sebesar Rp. 183.580.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 91,05 %.



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

Tabel 3.1.
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Pertanian

NO.	BIDANG URUSAN	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Prasarana dan Sarana Pertanian	Peraturan Menteri Pertanian No.29/2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah	PROGRAM KETERSEDIAAN AKSES DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS	Kabupaten Kepulauan Selayar	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	155.330.000	146.279.500	94,17 %		100	
			FASILITASI PUPUK DAN PESTISIDA			155.330.000	146.279.500	94,17 %			
			Penerima Pupuk Bersubsidi yang di validasi dan diverifikasi			125.330.000	118.349.500	94,43 %			
			Pendataan Penerimaan Pupuk Bersubsidi			31.170.000	30.540.000	97,97 %			
			Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi			94.160.000	87.810.000	93,26 %			
			Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida			30.000.000	30.000.000	93,01 %			
			Persiapan Monev dan Pelaporan			4.000.000	2.000.000	50 %			
			Persiapan Monev dan Pelaporan			26.000.000	25.930.000	99,74 %			



3.2. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Terjadi perubahan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat akibat keterbatasan jumlah pupuk yang tersedia secara nasional, sehingga alokasi yang diterima Kabupaten Kepulauan Selayar lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan riil berdasarkan data CPCL/RDKK yang telah disusun.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dilakukan beberapa upaya dan tindak lanjut yaitu :

- a. Penyesuaian data CPCL/RDKK sesuai alokasi terbaru yang ditetapkan.
- b. Penetapan skala prioritas penerima pupuk bersubsidi berdasarkan luas lahan, komoditas prioritas, dan musim tanam.
- c. Sosialisasi kepada kelompok tani terkait penyesuaian alokasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.

Satuan Kerja harus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan tetap mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan Kementerian/Lembaga pemberi penugasan.

Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar agar tetap berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk terlaksananya program/kegiatan pembangunan pertanian.



BAB IV

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Penyusunan Laporan tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar ini, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada penyelenggaraan SPM bidang Pendidikan.

Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan serta pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak diperlukan adanya suatu Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada penyelenggaraan SPM bidang pendidikan, terdiri atas :

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar, yang terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
3. Pendidikan Kesetaraan



2. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 :

Tabel 4.1

Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Indikator Kinerja						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Anak Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	100%	2025	Angka Partisipasi Sekolah	100%	2025	
					Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100%	2025	
					Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	100%	2025	
2	a. Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	2025			2025	
	Sekolah Dasar (SD)				Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun)	100%	2025	
					Kemampuan Literasi	100%	2025	
					Kemampuan Numerasi	100%	2025	
					Indeks Iklim Keamanan	100%	2025	
					Indeks iklim kebinekaan	100%	2025	
					Indeks iklim inklusivitas	100%	2025	
	b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)				Angka Partisipasi Sekolah (13-15 tahun)	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Indikator Kinerja						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kemampuan Literasi	100%	2025	
					Kemampuan Numerasi	100%	2025	
					Indeks Iklim Keamanan	100%	2025	
					Indeks iklim kebinekaan	100%	2025	
					Indeks iklim inklusivitas	100%	2025	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Anak Usia 7 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	2025	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 Tahun)	100%	2025	

3. Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 adalah sebesar Rp.15.062.235.550,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan memiliki Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) sebagai berikut :

a) Pendidikan

- Strata dua (S2) : 7 Orang
- Strata satu (S1) : 21 Orang
- D3 : 1 Orang
- D2 : 1 Orang
- SLTA dan sederajat : 9 Orang
- SMP/Sederajat : 1 Orang



b) Pangkat dan golongan

- Golongan IV : 3 Orang
- Golongan III : 27 Orang
- Golongan II : 7 Orang
- Golongan I : 1 Orang

c) Eselon

- Eselon II : 1 Orang
- Eselon III : 5 Orang
- Eselon IV : 9 Orang
- Staf :
- Fungsional Umum : Orang
- Fungsional Tertentu : 3 Orang
- Kontrak Daerah/PHL : 166 Orang

d) Kelompok Jabatan Fungsional UPT:

- Guru ASN/PPPK TK/RA : 370 Orang
- Guru ASN/PPPK SD/MI : 629 Orang
- Guru ASN/PPPK SMP/MTS : 253 Orang
- Pengawas Sekolah : 18 Orang

5. Hasil Capaian

Adapun hasil capaian penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Realisasi SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Anak Usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	100%	89,12 %	2025	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)	100%	96,77%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100%	94,14%	2025	
						Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	100%	94,44%	2025	
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	93,08 %	2025					
	a. Sekolah Dasar (SD)					Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun)	100%	101,10 %	2025	
						Kemampuan Literasi	100%	95,43%	2025	
						Kemampuan Numerasi	100%	94,38%	2025	
						Indeks Iklim Keamanan	100%	98,74%	2025	
						Indeks iklim kebinekaan	100%	98,51%	2025	
						Indeks iklim inklusivitas	100%	95,67%	2025	
	b. Sekolah Menengah Pertama					Angka Partisipasi Sekolah (7-12 tahun)	100%	94,82%	2025	
						Kemampuan Literasi	100%	98,24%	2025	
						Kemampuan Numerasi	100%	97,46%	2025	
						Indeks Iklim Keamanan	100%	97,86%	2025	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Indeks iklim kebinekaan	100%	98,52%	2025	
						Indeks iklim inklusivitas	100%	95,84%	2025	
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Anak Usia 7 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	100%	97,66%	2025	Angka Partisipasi Sekolah (7-18 tahun)	100%	85,50%	2025	

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka permasalahan penerapan SPM bidang Pendidikan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3

Permasalahan Yang Mempengaruhi Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2025

No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
1	SPM PAUD SPM Pendidikan Dasar masih 98,88%.	Belum optimalnya pemenuhan layanan PAUD sesuai Standar Pelayanan Minimal, terutama dalam menjangkau seluruh anak usia dini yang menjadi sasaran layanan pendidikan. Masih terdapat sebagian kecil layanan Pendidikan Dasar yang belum memenuhi indikator Standar Pelayanan Minimal secara menyeluruh	- Masih adanya keterbatasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar di beberapa satuan pendidikan - Keterbatasan ketersediaan dan pemerataan satuan PAUD, terutama di wilayah tertentu. - Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini.



No	Masalah	Masalah Pokok	Akar Masalah
2	SPM Kesetaraan masih 56,70%.	- Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik masih terbatasnya jumlah tutor/pendidik - Partisipasi masyarakat yang masih rendah karena masih adanya stigma negative terhadap pendidikan kesetaraan dan minimnya motivasi peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan	- Tenaga pendidik yang ada khususnya kesetaraan masih berstatus tenaga guru honorer - Kesadaran Masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan masih rendah.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, tetapi juga merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Mengingat karakteristik pelayanan kesehatan yang bersifat mendasar, strategis, kompleks, serta adanya perbedaan kapasitas sumber daya antar daerah di Indonesia, maka diperlukan suatu standar yang menjadi acuan bersama melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

SPM menegaskan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan dasar sesuai haknya. Dalam hal ini, SPM merupakan ketentuan yang mengatur jenis dan mutu pelayanan dasar yang secara minimal harus diterima oleh setiap warga negara.

Sebagai landasan teknis pelaksanaannya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan telah diterbitkan untuk mengatur 12 jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Regulasi ini telah mengadopsi paradigma baru SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Perubahan konsep tersebut cukup mendasar dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Jika pada SPM terdahulu pencapaian target lebih dipandang sebagai keberhasilan program kesehatan, maka dalam konsep yang baru, pencapaian target



SPM lebih ditekankan pada kewenangan, tanggung jawab, serta kinerja Pemerintah Daerah dalam menjamin terpenuhinya pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d) Pelayanan kesehatan balita
- e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi
- l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

2. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 :

Tabel 4.4
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai	100%	2025	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		standar.						
					Tablet tambah darah	100%	2025	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	100%	2025	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	100%	2025	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	100%	2025	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	100%	2025	
					Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	100%	2025	
					Kartu ibu/rekam medis ibu	100%	2025	
					Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	2025	
					Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2025	
					Gel USG	100%	2025	
					Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2025	
					Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(K6)			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100%	2025	Formulir partograf	100%	2025	
					Kartu ibu/rekam medis ibu	100%	2025	
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	2025	
					Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2025	
					Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2025	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	2025	Vaksin hepatitis B dosis tunggal <i>(prefilled syringe)</i>	100%	2025	
					2. Vitamin K1 injeksi	100%	2025	
					Salep/tetes mata antibiotik	100%	2025	
					Formulir bayi baru lahir	100%	2025	
					Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	100%	2025	
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	2025	
					Media Promosi	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)			
					Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2025	
					Kader Kesehatan	100%	2025	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	2025	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	100%	2025	
					Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	100%	2025	
					Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	2025	
					Vitamin A Biru	100%	2025	
					Vitamin A Merah	100%	2025	
					Vaksin imunisasi dasar: BCG	100%	2025	
					Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	100%	2025	
					Vaksin imunisasi dasar: IPV	100%	2025	
					Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB- Hib	100%	2025	
					Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	100%	2025	
					Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					-Hib			
					Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	100%	2025	
					Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	100%	2025	
					Peralatan Anafilaktik	100%	2025	
					Formula Terapi Gizi Buruk	100%	2025	
					Tenaga medis: Dokter	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2025	
					Guru PAUD	100%	2025	
					Kader Kesehatan	100%	2025	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	2025	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	100%	2025	
					Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	100%	2025	
					Kuesioner skrining kesehatan	100%	2025	
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	100%	2025	
					Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	100%	2025	
					Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					usia 12-17 tahun diluar sekolah			
					Alat Pemeriksaan Hb	100%	2025	
					Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	100%	2025	
					Media promosi kesehatan	100%	2025	
					Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	100%	2025	
					Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2025	
					Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kealifikasi tertentu : Guru	100%	2025	
					Tenaga Non Kesehatan terlatih atau mempunyai kealifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peerconselor	100%	2025	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	2025	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2025	
					Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Atas (LILA)			
					Alat: Tensimeter	100%	2025	
					Alat: Glukometer	100%	2025	
					Alat: Alat Pemeriksa Hb	100%	2025	
					Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	100%	2025	
					Alat: KIT IVA Tes	100%	2025	
					Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	100%	2025	
					Kit Ophthalmologi Komunitas	100%	2025	
					Kuesioner PUMA	100%	2025	
					Alat Pelayanan KB	100%	2025	
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	100%	2025	
					Vaksin Tetanus Difteri (td)	100%	2025	
					Tenaga medis: Dokter	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2025	
					Kader Kesehatan terlatih dan mempunyai kealifikasi tertentu	100%	2025	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	2025	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	100%	2025	
					Glukometer/alat pemeriksaan gula	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					darah			
					Alat pemeriksaan kolesterol	100%	2025	
					Bahan Medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	100%	2025	
					Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / <i>Activity Daily Living</i> (ADL Barthel)	100%	2025	
					Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	100%	2025	
					Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2025	
					Tenaga medis: Dokter	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2025	
					Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	100%	2025	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	2025	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100%	2025	
					Obat Hipertensi	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tensimeter	100%	2025	
					Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	100%	2025	
					Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2025	
					Tenaga medis: Dokter	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2025	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	2025	Obat Diabetes Melitus	100%	2025	
					Fotometer atau Glukometer	100%	2025	
					BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	100%	2025	
					Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)			
					Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2025	
					Tenaga medis: Dokter	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	100%	2025	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	2025	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	100%	2025	
					Penyediaan Psikofarmaka	100%	2025	
					Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	100%	2025	
					Penyediaan	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan			
					Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Dokter	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	100%	2025	
					Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	100%	2025	
					Tenaga profesional lainnya	100%	2025	
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standard	100%	2025	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2025	
					Reagen Zn TB	100%	2025	
					Masker bedah dan Masker N95	100%	2025	
					Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	100%	2025	
					Katrid tes cepat molekuler	100%	2025	
					Formulir pencatatan dan pelaporan	100%	2025	
					Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	2025	
					Tuberkulin	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Radiografer	100%	2025	
					Kader Kesehatan	100%	2025	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	100%	2025	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	2025	
					Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	100%	2025	
					Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	100%	2025	
					Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Bidan	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Perawat	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	100%	2025	
					Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	100%	2025	
					Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	100%	2025	

3. Anggaran

Dalam pengalokasian anggaran Dinas Kesehatan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum dialokasikan secara khusus, namun Dinas Kesehatan dalam mengalokasikan anggaran terkait SPM didasarkan pada anggaran kegiatan yang berhubungan dengan tiap item indikator kinerja SPM dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Indikator SPM)	Alokasi Anggaran Tahun 2025
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 663.461.000
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 229.450.000
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp. 19.200.000
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 26.100.000
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Rp. 675.000.000
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Rp. 174.758.500



7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Rp. 319.500.000
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp. 500.575.250
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp. 500.575.250
10.	Pelayanan Kesehatan ODGJ berat	Rp. 136.500.000
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	Rp. 558.952.000
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp. 83.000.000

4. Dukungan Personil

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 1.602 orang.

Berdasarkan golongan/ruang, untuk pegawai ASN Dinas Kesehatan didominasi oleh golongan/ruang IV sebanyak 119 pegawai (7,4%), golongan III sebanyak 503 pegawai (31,4%), golongan II sebanyak 35 pegawai (2,2%), golongan I sebanyak 3 pegawai (0,2%) dan PPPK sebanyak 145 pegawai (9,1%) serta PPPK Paruh Waktu sebanyak 797 pegawai (49,8%) dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2025

No.	Golongan/Ruang	Jumlah	Persentase (%)
1.	IV	119	7,4
2.	III	503	31,4
3.	II	35	2,2
4.	I	3	0,2
5.	PPPK	145	9,1
6.	PPPK Paruh Waktu	797	49,8

Dari sisi kedudukan dalam Organisasi, dari 1.602 pegawai ASN terdapat 1 pegawai (0,1%) yang menduduki Eselon II, 9 pegawai (0,6%) yang menduduki Eselon III, 13 Pegawai (0,8%) yang menduduki Eselon IV, 592 pegawai (37%) yang termasuk dalam kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, serta 45 pegawai (2,8%) yang termasuk dalam Jabatan Fungsional



Umum, 145 pegawai yang termasuk PPPK (9,1%) serta 797 pegawai yang termasuk dalam kelompok PPPK Paruh Waktu dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Jumlah Pegawai ASN yang Menduduki Jabatan Tahun 2025

No.	Jabatan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Eselon II	1	0,1
2.	Eselon III	9	0,6
3.	Eselon IV	13	0,8
4.	Jabatan Fungsional Tertentu	592	37
5.	Jabatan Fungsional Umum	45	2,8
6.	PPPK	145	9,1
7.	PPPK Paruh Waktu	797	49,8

Selain itu, SDM Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar juga memiliki tenaga kesehatan yang tersebar di 15 Puskesmas dan 2 Rumah Sakit sebagai berikut :

Tabel 4.7
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2025

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Dokter Spesialis	10	0,67
2.	Dokter Umum	53	3,56
3.	Dokter Gigi	19	1,28
4.	Perawat	520	34,9
5.	Bidan	590	39,6
6.	Kesehatan Masyarakat	39	2,62
7.	Kesehatan Lingkungan	41	2,75
8.	Gizi	38	2,55
9.	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	49	3,29
10.	Tenaga Teknis Kefarmasian	61	4,09
11.	Apoteker	28	1,88
12.	Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	6	0,4
13.	Keterampilan Fisik	4	0,27
14.	Keteknisian Medis	32	2,15



5. Hasil Capaian

Adapun hasil capaian penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator Mutu	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayana n Kesehata n Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	100%	86,13 %	2025	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	100%	86,13 %	2025	
						Tablet tambah darah	100%	86,13 %	2025	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	100%	100 %	2025	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	100%	100 %	2025	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	100%	100 %	2025	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	100%	100 %	2025	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	100%	100 %	2025	
						Kartu ibu/rekam medis ibu	100%	100 %	2025	
						Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	86,13 %	2025	
						Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100 %	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator Mutu	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG	100%	86,58 %	2025	
						Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100 %	2025	
						Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	100%	88,30 %	2025	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	100%	88,75%	2025	Formulir partograf	100%	88,75 %	2025	
						Kartu ibu/rekam medis ibu	100%	100 %	2025	
						Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	88,75 %	2025	
						Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100%	2025	
						Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	100%	100%	2025	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100%	2025	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100%	2025	
						Tenaga	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator Mutu	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						kesehatan: Tenaga Kefarmasian				
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100%	2025	
3	Pelayana n Kesehata n Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	87,24%	2025	Vaksin hepatitis B dosis tunggal <i>(prefilled syringe)</i>	100%	87,24 %	2025	
						Vitamin K1 injeksi	100%	87,24 %	2025	
						Salep/tetes mata antibiotik	100%	87,24 %	2025	
						Formulir bayi baru lahir	100%	87,24 %	2025	
						Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	100%	87,24 %	2025	
						Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	87,24 %	2025	
						Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100%	2025	
						Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	100%	100%	2025	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100%	2025	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100%	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	100%	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	100%	100%	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator Mutu	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kader Kesehatan	100%	100%	2025	
4	Pelayana n Kesehata n Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	50,64%	2025	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	100%	50,64 %	2025	
						Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	100%	50,64 %	2025	
						Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	100%	50,64 %	2025	
						Vitamin A Biru	100%	50,64 %	2025	
						Vitamin A Merah	100%	50,64 %	2025	
						Vaksin imunisasi dasar: BCG	100%	50,64 %	2025	
						Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	100%	50,64 %	2025	
						Vaksin imunisasi dasar: IPV	100%	50,64 %	2025	
						Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB- Hib	100%	50,64 %	2025	
						Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	100%	50,64 %	2025	
						Vaksin imunisasi lanjutan: DPT - HB -Hib	100%	50,64 %	2025	
						Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	100%	50,64 %	2025	
						Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	100%	50,64 %	2025	
						Peralatan Anafilaktik	100%	100%	2025	
						Formula Terapi Gizi Buruk	100%	100%	2025	
						Tenaga medis: Dokter	100%	100%	2025	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100%	2025	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator Mutu	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100%	2025	
						Guru PAUD	100%	100%	2025	
						Kader kesehatan	100%	100%	2025	
5	Pelayana n Kesehata n Pada Usia Pendidika n Dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	100%	2025	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	100%	100 %	2025	
						Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	100%	100 %	2025	
						Kuesioner skrining kesehatan	100%	100 %	2025	
						Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	100%	100 %	2025	
						Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	100%	100 %	2025	
						Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	100%	100 %	2025	
						Alat Pemeriksaan Hb	100%	100 %	2025	
						Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	100%	100 %	2025	
						Media promosi kesehatan	100%	100 %	2025	
						Vaksin Campak	100%	100 %	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator Mutu	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)				
						Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesahatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	100 %	2025	
						Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	100%	100 %	2025	
						Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Kader kesehatan/dokter kecil/ <i>peer conselor</i>	100%	100 %	2025	
6	Pelayana n Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	63,93%	2025	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100 %	2025	
						Alat: dalam melakukan	100%	100 %	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator Mutu	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						skrining: Alat ukut berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)				
						Alat: Tensimeter	100%	100 %	2025	
						Alat: Glukometer	100%	100 %	2025	
						Alat: Alat Pemeriksa Hb	100%	100 %	2025	
						Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	100%	100 %	2025	
						Alat: KIT IVA Tes	100%	100 %	2025	
						Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	100%	100 %	2025	
						Kit Ophthalmologi Komunitas	100%	100 %	2025	
						Kuesioner PUMA	100%	63,93 %	2025	
						Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	100%	100 %	2025	
						Vaksin Tetanus Difteri (td)	100%	100 %	2025	
						Tenaga medis: Dokter	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	100 %	2025	
						Kader kesehatan	100%	100 %	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator Mutu	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu				
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	100%	70,81%	2025	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	100%	100 %	2025	
						Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	100%	100 %	2025	
						Alat pemeriksaan kolesterol	100%	100 %	2025	
						Bahan Medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	100%	100 %	2025	
						Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / <i>Activity Daily Living</i> (ADL Barthel)	100%	100 %	2025	
						Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	100%	70,81 %	2025	
						Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100 %	2025	
						Tenaga medis: Dokter	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100 %	2025	
						Tenaga	100%	100 %	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator Mutu	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						kesehatan: Perawat				
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	100 %	2025	
						Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	100%	100 %	2025	
8	Pelayana n Kesehata n Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	100%	2025	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	100%	100 %	2025	
						Obat Hipertensi	100%	100 %	2025	
						Tensimeter	100%	100 %	2025	
						Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	100%	100 %	2025	
						Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100 %	2025	
						Tenaga medis: Dokter	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	100%	100 %	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator Mutu	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	100 %	2025	
9	Pelayana n Kesehata n Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	100%	2025	Obat Diabetes Melitus	100%	100 %	2025	
						Fotometer atau Glukometer	100%	100 %	2025	
						BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	100%	100 %	2025	
						Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	100%	100 %	2025	
						Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100 %	2025	
						Tenaga medis: Dokter	100%	100 %	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator Mutu	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	100%	100 %	2025	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	69,34 %	2025	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	100%	100 %	2025	
						Penyediaan Psikofarmaka	100%	100 %	2025	
						Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	100%	69,34 %	2025	
						Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	100%	69,34 %	2025	
						Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100 %	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator Mutu	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tenaga kesehatan: Dokter	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	100%	100 %	2025	
						Tenaga profesional lainnya	100%	100 %	2025	
						Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	100%	100 %	2025	
11	Pelayana n Kesehata n orang terduga tuberkulo sis; dan	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standard	100%	100%	2025	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100 %	2025	
						Reagen Zn TB	100%	100 %	2025	
						Masker bedah dan Masker N95	100%	100 %	2025	
						Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	100%	100 %	2025	
						Katrid tes cepat molekuler	100%	100 %	2025	
						Formulir pencatatan dan pelaporan	100%	100 %	2025	
						Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	100%	100 %	2025	
						Tuberkulin	100%	100 %	2025	
						Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	100%	100 %	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator Mutu	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Radiografer	100%	100 %	2025	
						Kader Kesehatan	100%	100 %	2025	
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	100%	100%	2025	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	100%	100 %	2025	
						Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	100%	100 %	2025	
						Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	100%	100 %	2025	
						Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan	100%	100 %	2025	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator Mutu	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK				
						Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Bidan	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Perawat	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	100%	100 %	2025	
						Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	100%	100 %	2025	
						Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	100%	100 %	2025	

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Selayar merupakan daerah kepulauan dengan beberapa pulau kecil yang berpenghuni yang menyebar di wilayah kepulauan dengan jarak antar pulau yang jauh yang menghambat distribusi layanan Kesehatan yang merata.
2. Anggaran yang tidak mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan.



3. Masih banyak ibu hamil yang melakukan persalinan di luar wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
 4. Masih banyak warga yang tidak antusias membawa balita ke Posyandu.
 5. Kegiatan penjangkaran anak sekolah dilakukan pada saat tahun ajaran baru (triwulan 3) sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.
 6. Para lansia masih kurang menyadari pentingnya Kesehatan, masih kurang motivasi untuk melakukan skrining ke Posbindu.
 7. Pelayanan untuk pemeriksaan spesimen dahak di Laboratorium Puskesmas atau Laboratorium TCM terutama di desa-desa terpencil di wilayah kepulauan terhambat oleh akses, sehingga banyak yang terduga TBC di desa-desa terpencil tidak mendapatkan pelayanan kesehatan.
 8. Pulau-pulau kecil yang masuk dalam 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) dari segi infrastruktur sangat terbatas terutama transportasi, komunikasi, listrik, menyulitkan distribusi obat, vaksin dan peralatan medis.
 9. Terbatasnya tenaga Kesehatan di daerah terpencil serta kurangnya motivasi untuk bertugas di daerah terpencil.
- b. Solusi
1. Mengoptimalkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (Posyandu dan Posbindu).
 2. Mengotimalkan pelayanan Kesehatan bergerak, yaitu program untuk melayani Kesehatan Masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
 3. Mengembangkan Rumah Sakit Pratama untuk meningkatkan akses di pulau-pulau kecil dan meningkatkan kapasitas puskesmas yang ada.
 4. Pelayanan Kesehatan secara mobile dan terpadu terutama untuk pulau pulau kecil melalui kegiatan puskesmas keliling.
 5. Pemenuhan SDM Kesehatan.
 6. Pemenuhan Alat Kesehatan, Obat dan Bahan Medis Habis Pakai.



7. Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan.
8. Dukungan dana dari pemerintah daerah yang belum optimal karena beberapa pembiayaan untuk mendukung program yang masuk dalam SPM khususnya dalam upaya penemuan kasus di Masyarakat masih kurang.

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Bidang Urusan Pekerjaan Umum memiliki 2 (dua) Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pengolahan air limbah domestik.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Urusan Pekerjaan Umum memiliki 2 jenis pelayanan dasar, yakni :

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pengolahan air limbah domestik.

2. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 :

Tabel 4.9

Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase jumlah WN yang harus dilayani	100%	2025				
					A. Jaringan Perpipaan			
					- Kuantitas SPAM, Jumlah Rumah Tangga yang	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)			
					- Kualitas SPAM, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	100%	2025	
					B. Bukan Jaringan Perpipaan			
					- Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	100%	2025	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Persentase jumlah WN yang harus dilayani	100%	2025	- Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	100%	2025	
					- Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota			
					- Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	100	2025	

3. Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah sebesar Rp. 1.849.327.454,13,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum memiliki Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) sebagai berikut :

Tabel 4.10
Jumlah Personil ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Jumlah Pegawai	Pangkat dan Golongan
1	1 Orang	Pembina Utama Muda, IV/c
2	2 Orang	Pembina Tk. I, IV/b



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No.	Jumlah Pegawai	Pangkat dan Golongan
3	4 Orang	Pembina, IV/a
4	8 Orang	Penata Tk. I, III/d
5	6 Orang	Penata, III/c
6	12 Orang	Penata Muda Tk.I, III/b
7	10 Orang	Penata Muda, III/a
8	3 Orang	Pengatur Tk. I, II/d
9	3 Orang	Pengatur, II/c
10	6 Orang	Golongan IX
11	5 Orang	Golongan V

Tabel 4.11
Jumlah Personil Non ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Jumlah Pegawai Non PNS	Kualifikasi Pendidikan	Keterangan
1	-	Pascasarjana	
2	50	S1	
3	55	D3	
4	13	SMA	

5. Hasil Capaian

Tabel 4.12
Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase jumlah WN yang harus dilayani	100%	100%	2025					
						A. Jaringan Perpipaan				
						- Kuantitas SPAM, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok	-	-	2025	Tutup Mutu



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)				
						- Kualitas SPAM, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	-	-	2025	Tutup Mutu
						B. Bukan Jaringan Perpipaan				
						- Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	100%	100 %	2025	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Persentase jumlah WN yang harus dilayani	100%	100%	2025	- Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	100%	100 %	2025	
						- Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota				
						- Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	100%	100 %	2025	

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka permasalahan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :



a. Permasalahan

1. Belum adanya Data Konfrehensif terkait Jumlah RUmah Tangga yang belum mempunyai Sarana Air Bersih yang baik yang bersumber dari PDAM, Sumur Gali, Sumur Bor/ dalam atau Sumber Air Bersih. Terkait data Jumlah Unit pengolahan setempat Komunal belum tersedia. Pengumpulan data Real BNBA Terkendala masalah Anggaran
2. Terbatasnya anggaran pada tiap indikator menyebabkan target-target yang ditetapkan belum tercapai.
3. Untuk kegiatan SPAM (Sistem Penyedia Air Minum) yang dibangun dengan belanja modal, belum/tidak tersedia anggaran pemeliharannya.
4. Sinergi yang belum maksimal antara seluruh stakeholder pengelola pelayanan dasar sanitasi dan air minum (perangkat daerah, BUMD, kementerian terkait dan kelompok pengelola).
5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait pengelolaan sanitasi dan air minum.

b. Solusi

1. Melakukan Sodialisasi di Masyarakat tentang pentingnya hidup sehat.
2. Diperlukan alokasi dana yang memprioritaskan terlaksananya program-program/ indikator SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Anggaran pemeliharaan diperlukan untuk menjaga nilai guna sarana prasarana air bersih dan sanitasi.
4. Anggaran untuk pendataan BNBA Sarana Prasarana Air Bersih
5. Membangun sinergi dengan arah, tujuan dan keinginan serta perilaku yang nyata dalam meningkatkan pelayanan dasar bidang sanitasi dan air minum.
6. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pelatihan formal maupun non formal.



D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sangat penting dan mendasar karena dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun. Meskipun tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM, Hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing-masing perangkat daerah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada bidang Perumahan Rakyat ada dua yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten.

Layanan ini merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, dengan ketentuan :

- a. Pada saat masa pasca bencana;
 - b. Surat penetapan bencana dari Bupati;
 - c. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten. Merupakan jenis layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung :
 - a. Pengurangan kawasan kumuh 5 - 10 Ha; dan/atau
 - b. Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.

Dalam hal tidak terjadi bencana, untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan rutin seperti melakukan pengumpulan data dan pendataan identifikasi perumahan. Oleh karena itu, untuk capaian SPM dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan diluar dua jenis layanan sesuai dengan pelaporan e-SPM di aplikasi Kementerian Dalam Negeri dengan memenuhi atau mengisi Form A, B dan C yaitu form Pendataan, Penghitungan Kebutuhan dan Perencanaan.



2. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 :

Tabel 4.13

Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	2025	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	100%	2025	
					Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	100%	2025	
					Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	100%	2025	
					Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	100%	2025	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	2025	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	100%	2025	
					Subsidi uang sewa	100%	2025	
					Penyediaan rumah layak huni	100%	2025	



Dalam hal tidak terjadi bencana, untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan rutin seperti melakukan pengumpulan data dan pendataan identifikasi perumahan.

3. Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2025 dialokasikan untuk kegiatan identifikasi dan pendataan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar.

4. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat memiliki Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) sebagai berikut :

Tabel 4.14
Jumlah Personil ASN Berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Pangkat

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah
1.	Eselon	7
a.	II b	1
b.	III a	1
c.	III b	3
d.	IV a	2
2.	Jabatan Fungsional	8
a.	Penata Kelola Bangunan dan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda	4
b.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1
c.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	3
3.	Pangkat/Golongan	27
a.	IV	5
b.	III	19
c.	II	3
4.	Jenjang Pendidikan	27
a.	S3	-



b.	S2	4
c.	S1	20
d.	SMA Sederajat	3

5. Hasil Capaian

Dalam hal tidak terjadi bencana dalam skala besar maka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan dengan kegiatan Identifikasi dan pemenuhan 3 (tiga) tahapan penerapan SPM.

Berikut capaian pelaksanaan pemenuhan 3 (tiga) tahapan penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum didalam aplikasi e-SPM Kemendagri sebagai berikut :

Tabel 4.15
Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar	Format	Persentase Capaian	Keterangan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Dalam Hal tidak terjadi Bencana, maka diminta untuk melakukan 3 tahapan dan mengisi format A, B, C	100%	Tidak ada bencana dalam skala besar yang ditetapkan oleh kepala daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah
A. Pendataan	Form. 4. A.4, Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana,	100%	
	Form. 4. A.5 Identifikasi Lahan Potensial,	100%	
	Form. 4. A. 6 Pengumpulan Data Rumah yang terkena Bencana	100%	
B. Penghitungan Kebutuhan	Form. 4. B.3, Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana	100%	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

	Form. 4. B.4 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Terkena Bencana	100%	
C. Perencanaan	Form. 4. C.2 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana	100%	
Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	Dalam Hal tidak ada relokasi, diminta untuk melaksanakann 3 tahapan dan mengisi form A, B, C	100%	
A. Pendataan	Form. 4. A. 10 Identifikasi Perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya	100%	Tidak ada kegiatan relokasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekda sehingga diminta melampirkan format A, B, C
	Form. 4. A. 11 Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Permukiman	100%	
	Form. 4. A. 12 Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh	100%	
	Form. 4. A. 13 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Relokasi	100%	
B. Penghitungan Kebutuhan	Form. 4. B.7 Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	100%	
	Form. 4. B. 8 Penghitungan Kebutuhan Biaya Layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah	100%	



C. Perencanaan	Form 4. C. 4 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi	100%	
----------------	---	------	--

Sumber : Aplikasi e-SPM Kemendagri

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka permasalahan dapat diuraikan sebagaimana berikut :

a. Kendala dan Permasalahan

Kendala dan Permasalahan dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan adalah :

1. Pengumpulan data, perhitungan kebutuhan dan perencanaan korban bencana dilakukan setelah adanya Sk penetapan bencana dari Bupati sehingga bisa menyebabkan pemberian bantuan bisa terlambat.
2. Minimnya anggaran untuk pelaksanaan SPM bidang Perumahan sehingga bila terjadi bencana bisa menjadi kendala dan pemberian bantuan bisa terhambat.
3. Adanya persyaratan bahwa pemberian bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
4. Belum adanya kajian resiko bencana dalam bentuk Peraturan Daerah tentang penentuan lokasi daerah rawan bencana.
5. Belum maksimalnya koordinasi antar perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal atau OPD yang terkait.
6. Kurangnya SDM yang terlatih dan memahami penerapan dan pelaksanaan secara teknis Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan.
7. Kurangnya/Tidak adanya lahan untuk relokasi korban bencana atau relokasi program pemerintah kabupaten/kota.



8. Belum adanya sarana dan Prasarana terkait Layanan dasar di bidang Perumahan

b. Solusi

1. Perlu adanya Pemetaan daerah rawan bencana secara rinci dan juga perlu ditetapkan dalam bentuk Perda.
2. Memprioritaskan anggaran untuk pelaksanaan SPM bidang Perumahan.
3. Memaksimalkan koordinasi antar OPD pengampu Standar Pelayanan Minimal atau OPD yang terkait.
4. Perlu peningkatan sumber daya manusia sehingga dalam penerapan dan pelaksanaan SPM dapat maksimal (Bimtek, dll)
5. Menambah anggaran untuk Peningkatan kapasitas aparatur (SDM) khususnya terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan.
6. Perlu adanya pembebasan Lahan dari Pemerintah Daerah
7. Perlu ada bantuan/penganggaran sarana dan prasarana terkait layanan
8. Perlunya ada komunikasi dan koordinasi lebih awal antar OPD yang menangani bencana dalam hal ini BPBD dan Disperkim agar tidak terjadi keterlambatan pengurusan SK BNBA bagi calon penerima bantuan. Namun, karena hal ini telah terjadi, untuk ke depannya diperlukan kesepahaman mengenai pentingnya penerbitan SK BNBA untuk dasar pelaksanaan bagi OPD pelaksana.
9. Informasi terjadinya bencana sudah seharusnya secara cepat disampaikan kepada OPD yang berhubungan dengan penanganan pasca bencana untuk dikoordinasikan agar penanganan dan perencanaan penganggaran dapat segera dilakukan.

E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

1. SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan



pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Republik Indonesia.

Adapun fungsi Pemadam Kebakaran sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 Tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, dilakukan penggabungan ke dalam Institusi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga nomenklatur saat ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum mencakup :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum;

b. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target capaian SPM Sub Urusan Trantibum di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 :

Tabel 4.16

Target Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh eh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%	2025	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)			
					Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluh an, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	100%	2025	
					Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)			
					Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	-	2025	
					Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	100%	2025	
					Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	100%	2025	

c. **Anggaran**

Adapun besaran anggaran SPM sub urusan Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp. 599.896.500,-. Secara umum alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan



Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2025 sangat terbatas dibanding dengan kebutuhan operasional di lapangan. Namun pelayanan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum terus diupayakan secara optimal dengan memperhatikan tingkat keseriusan gangguan yang terjadi.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui APBD dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok mengalokasikan anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian pelaksanaan SPM, adapun kegiatan tersebut adalah Pengawasan Perda/Perkada yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Pengendalian Peredaran Cukai Rokok Ilegal.

d. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar berjumlah 341 Orang terdiri dari :

Tabel 4.17

Jumlah Personil Aktif Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2025

TAHUN 2022	JUMLAH
PNS	48 Orang
PPPK PENUH WAKTU	40 Orang
PPPK PARUH WAKTU	310 Orang
JUMLAH	398 Orang

Tabel 4.18

Personil Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Strata Dua (S2)	7 Orang	PNS
2.	Strata 1(S1)	52 Orang	17 Orang PNS, 2 Orang PPPK, 33 PPPK PW
3.	D3	3 Orang	PPPK Paruh Waktu



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

4.	D2	-	-
5.	SLTA/Sederajat	293 Orang	24 Orang (PNS), 38 Orang PPPK, 231 PPPK PW
6.	SLTP/Sederajat	-	-
7	Paket C	43 Orang	43 PPPK PW
	Total	398 Orang	

e. Hasil Capaian

Tabel 4.19

Realisasi SPM Sub Urusan Trantibum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan ketertarikan dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	100%	2025	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						pada tahun berjalan)				
						Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	100%	100%	2025	
						Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)				
						Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	-	-	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	100%	100%		
						Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	100%	100%		

f. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Beberapa kendala, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Ketentraman dan Ketertiban



Umum dan Sub Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2025 antara lain :

1. Terbatasnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Solusi Mengikutsertakan Personil Satpol.PP mengikuti Diklat Penyidik guna mengoptimalkan fungsi penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perda dan perkara.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas

Solusi Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung terutama alat pemadam kebakaran

3. Terbatasnya Anggaran Operasional Penegakan Perda dan Pemadam Kebakaran

Solusi Mengusulkan Penambahan anggaran untuk kebutuhan operasional.

2. SUB URUSAN KEBENCANAAN

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar sub urusan kebencanaan adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan informasi rawan bencana di daerah
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana



b. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 :

Tabel 4.20

Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	2025	- Penyusunan Kajian Resiko Bencana			
					1. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	100%	2025	
					2. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	100%	2025	
					- Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana 1. Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	100%	2025	
					b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	100%	2025	
					c. Tersedianya Narasumber /Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	-	2025	
					d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					2. Sosialisasi Melalui media sosial dan wahana multimedia			
					a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					b. Tersedianya Materi media social	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)			
					c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					e. Tersedianya penyelenggara sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					3. Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik			
					a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					c. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					d. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
2	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagan terhadap bencana	100%	2025	- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana			
					a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	100%	2025	
					b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	100%	2025	
					c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	100%	2025	
					d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					e. Tersedianya Penyelengga ra Diskusi Publik	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(sesuai dengan kebutuhan)			
					- Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)			
					- Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi 1. Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulang an bencana (sesuai dengan kebutuhan)	-	2025	
					e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2. Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara			
					a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					- Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
					A. Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise)			
					a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan	-	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kebutuhan)			
					b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	-	2025	
					c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	-	2025	
					B. Gladi Lapang			
					a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	-	2025	
					b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan	-	2025	
					c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	-	2025	
					- Pengendalian Operasi dan Penyediaan			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
					A.Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
					a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	100%	2025	
					b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	-	2025	
					c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	100%	2025	
					d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					B. Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana			
					a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kebutuhan)			
					b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					C. Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast			
					a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					D. Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat			
					a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					E. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
					a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	-	2025	
					c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	-	2025	
					d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban	-	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					bencana (sesuai dengan kebutuhan)			
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	2025	- Respon Cepat Darurat Bencana			
					a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	100%	2025	
					b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	-	2025	
					c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	-	2025	
					- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			
					a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					e. Tersusunnya SK pengorganisasi an Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					- Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana			
					a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	100%	2025	
					h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan,	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)			

c. **Anggaran**

Alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana Kab. Kepulauan Selayar tahun 2025 sebesar Rp. 752.879.300,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Informasi rawan bencana Rp. 54.627.800,- (APBD)
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana Rp. 440.626.600,- (APBD)
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp. 119.731.900,- (APBD) dan Rp. 1.432.429.000,- (DSP/BTT).

d. **Dukungan Personil**

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.21
Data Pegawai BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2025

NO	JENIS/KUALIFIKASI	JUMLAH
1	2	3
1	ESELON	
	a. II	1 orang
	b. III	4 orang
	c. IV	3 orang



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

2	JABATAN FUNGSIONAL	
	a. Pelaksana	7 orang
	b. Pertama	-
	c. Muda	2 orang
	d. PPPK	2 orang
3	PANGKAT/GOLONGAN	
	a. IV/c	1 orang
	b. IV/b	1 orang
	c. IV/a	2 orang
	d. III/d	6 orang
	e. III/c	-
	f. III/b	3 orang
	g. III/a	2 orang
	h. II/d	1 orang
	i. II/c	1 orang
	j. II/a	-
	k. PPPK/ IX	2 orang
4	JENJANG PENDIDIKAN	
	a. S2	6 orang
	b. S1	11 orang
	c. SMA	2 orang



e. Hasil Capaian

Tabel 4.22

Realisasi SPM Sub Urusan Kebencanaan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana	100%	100%	2025	- Penyusunan Kajian Resiko Bencana				
						a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	100%	100%	2025	
						b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk dilegalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	100%	100%	2025	
						- Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Bencana A. Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana				
						a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	100%	100%	2025	
						b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	100%	100%	2025	
						c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						B. Sosialisasi Melalui media sosial dan wahana multimedia				
						a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						b. Tersedianya Materi media social dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						e. Tersedianya penyelenggara sosialisasi	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(sesuai dengan kebutuhan)				
						C. Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik				
						a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	-	-	2025	
						d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Pelayanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagan terhadap bencana	100%	100%	2025	- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana				
						a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	100%	100%	2025	
						b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	100%	100%	2025	
						c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minimal 2)	100%	100%	2025	
						d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						e. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						- Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)				
						- Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi A. Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan	-	-	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						bencana (sesuai dengan kebutuhan)				
						e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						B. Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara				
						a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						kebutuhan)				
						d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						- Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
						A. Simulasi Dalam Ruang (Table-Top Exercise)				
						a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	-	-	2025	
						b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table	-	-	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPFD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						top exercise (sesuai dengan kebutuhan)				
						c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	-	-	2025	
						B. Gladi Lapang				
						a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	-	-	2025	
						b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan	--	-	2025	
						c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan	-	-	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						kebutuhan)				
						- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
						A.Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
						a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	100%	100%	2025	
						b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	-	-	2025	
						c. Tersedianya Manajer	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Pusdalops (minimal 1)				
						d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						B. Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana				
						a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						kebutuhan)				
						c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						C. Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast				
						a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						b. Tersedianya Operasional	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)				
						D. Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat				
						a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						E. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						terhadap Bencana				
						a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	-	-	2025	
						c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	-	-	2025	
						d. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	-	-	2025	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	2025	- Respon Cepat Darurat Bencana				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	100%	100%	2025	
						b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	100%	100%	2025	
						c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	100%	100%		
						- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				
						a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)				
						b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	-	-	2025	
						c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	-	-	2025	
						d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Bencana				
						a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						(sesuai dengan kebutuhan)				
						e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	100%	100%	2025	
						h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan,d an evakuasi	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)				



f. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pencapaian target SPM pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC) yang terlatih dan kompeten dibidang kebencanaan.
2. Belum terwujudnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang seharusnya menjadi prioritas terkait lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
3. Belum akuratnya data penduduk yang berada di wilayah rawan bencana terkait pemenuhan SPM;
4. Keterbatasan anggaran dalam menunjang kegiatan pemenuhan pelayanan dasar kepada warga negara yang berada dikawasan rawan bencana seperti contoh masih kurangnya masyarakat yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana karena pelaksanaan pelatihan belum rutin dilaksanakan setiap tahunnya;
5. Belum optimalnya peralatan dasar dan pendukung dalam rangka penguatan kelembagaan / kesiapsiagaan terhadap bencana;
6. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (tanggap darurat bencana) seperti kurangnya kendaraan operasional (mobil rescue) yang berfungsi sebagai alat mobilisasi penanganan darurat bencana di wilayah yang terdampak bencana dan kurangnya peralatan water rescue yang menunjang pelaksanaan evakuasi penyelamatan korban bencana di perairan/laut;
7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang kebencanaan, ini disebabkan masih kurangnya kompetensi/skill SDM BPBD yang mumpuni dalam pengoperasian peralatan teknologi informasi kebencanaan.

Adapun solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan adalah sebagai berikut :



1. Pengalokasian dana yang cukup sangat dibutuhkan dalam upaya mendukung kegiatan terutama yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) penanggulangan bencana dan penambahan jumlah Dana Tak Terduga Kebencanaan;
2. Perlunya penguatan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana) sebagai bentuk perpanjangan tangan BPBD di Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, contohnya dapat membentuk posko siaga bencana di tingkat Desa sebagai upaya meningkatkan efektivitas penanganan bencana;
3. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penyediaan peralatan dan perlindungan kesiapsiagaan dalam penanganan Bencana;
4. Dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pemenuhan kendaraan operasional lapangan (mobil rescue) sehingga nantinya respon cepat penanganan bencana dapat terlaksana real time;
5. Diperlukan dukungan kerjasama dengan Pemerintahan Desa dalam pemenuhan pemasangan rambu jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu papan informasi bencana pada wilayahnya yang dapat dianggarkan pada APBD Desa melalui kegiatan tanggap darurat bencana;
6. Perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana khususnya kegiatan pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan secara berkala dan berkelanjutan tiap tahunnya kepada para relawan bencana desa yang ada pada daerah rawan bencana;
7. Memberikan kesempatan kepada SDM BPBD untuk mengikuti pelatihan pemanfaatan teknologi informasi kebencanaan sehingga diharapkan kedepannya SDM BPBD dapat memiliki kompetensi/keahlian/skill yang mumpuni dan professional dalam bidang teknologi informasi;
8. Perlu adanya peningkatan kualitas keahlian/kompetensi/ skill tenaga Tim Reaksi Cepat (TRC) dengan memfasilitasi mengikutsertakan



TRC dalam pelatihan-pelatihan teknis kebencanaan di Kabupaten/Provinsi dan di tingkat Nasional.

3. SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN

Pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran di kawasan pemukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah tanggungjawab daerah otonom.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Pemadam Kebakaran mencakup :

- 1) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran;

b. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target capaian SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 :

Tabel 4.23

Target Pencapaian SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	2025	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	100%	2025	
					Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					evakuasi			
					Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	100%	2025	
					Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sum ber Daya Manusia	100%	2025	
					Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	100%	2025	
					Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	100%	2025	

c. Anggaran

Adapun besaran anggaran SPM sub urusan pemadam kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp. 292.942.400,-. Secara umum alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM Sub Bidang Pemadam Kebakaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2025 sangat terbatas dibanding dengan kebutuhan operasional di lapangan. Namun pelayanan Pemadam Kebakaran terus diupayakan secara optimal dengan memperhatikan tingkat keseriusan gangguan yang terjadi. Alokasi anggaran dalam rangkaian pencapaian SPM Sub Bidang Pemadam Kebakaran akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga sesuai dengan target yang direncanakan.



Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui APBD dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok mengalokasikan anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian pelaksanaan SPM, adapun kegiatan tersebut adalah Pengawasan Perda/Perkada yang berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok dan Pengendalian Peredaran Cukai Rokok Ilegal.

d. Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar berjumlah 341 Orang terdiri dari :

Tabel 4.24

Personil Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Strata Dua (S2)	7 Orang	PNS
2.	Strata 1(S1)	52 Orang	17 Orang PNS, 2 Orang PPPK, 33 PPPK PW
3.	D3	3 Orang	PPPK Paruh Waktu
4.	D2	-	-
5.	SLTA/Sederajat	293 Orang	24 Orang (PNS), 38 Orang PPPK, 231 PPPK PW
6.	SLTP/Sederjat	-	-
7	Paket C	43 Orang	43 PPPK PW
	Total	398 Orang	

e. Hasil Capaian

Tabel 4.25

Realisasi SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Penyelamat	Persentase penduduk	100%	100%	2025	Pemenuhan tingkat waktu	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	an dan Evakuasi Korban Kebakaran	yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran				tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi				
						Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100%	100%	2025	
						Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	100%	100%	2025	
						Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	100%	100%	2025	
						Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	100%	100%	2025	
						Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	100%	100%	2025	



f. Kendala, Permasalahan dan Solusi

1. Kendala dan Permasalahan

Beberapa kendala, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2025 antara lain :

- Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas
- Terbatasnya Anggaran Operasional Penegakan Perda dan Pemadam Kebakaran

2. Solusi

- Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung terutama alat pemadam kebakaran

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, Urusan Sosial memiliki 5 jenis pelayanan dasar, yakni :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;



- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM

Berikut adalah target capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 :

Tabel 4.26
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang g disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	2025	Layanan data dan pengaduan	100%	2025	
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	-	2025	
					Penyediaan permakanan	100%	2025	
					Penyediaan sandang	100%	2025	
					Penyediaan alat bantu	100%	2025	
					Penyediaan perbekalan kesehatan	100%	2025	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	100%	2025	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	100%	2025	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan / Bukti dokumen kependudukan	100%	2025	
					Akses ke layanan pendidikan dan	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kesehatan dasar			
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ bukti penelusuran keluarga	100%	2025	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	2025	
					Layanan rujukan	100%	2025	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2025	Layanan data dan pengaduan	100%	2025	
					Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	100%	2025	
					Penyediaan permakanaan	100%	2025	
					Penyediaan sandang	-	2025	
					Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	100%	2025	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	100%	2025	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	100%	2025	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti dokumen kependudukan	100%	2025	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	100%	2025	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ bukti keberadaan keluarga	100%	2025	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	2025	
					Layanan rujukan	100%	2025	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	100%	2025	Layanan data dan pengaduan	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	luar panti	diluar panti						
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	100%	2025	
					Penyediaan permakanaan	100%	2025	
					Penyediaan sandang	-	2025	
					Penyediaan alat bantu	100%	2025	
					Penyediaan perbekalan kesehatan	100%	2025	
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	100%	2025	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Lanjut Usia terlantar	-	2025	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan / Bukti dokumen kependudukan	100%	2025	
					Akses ke layanan kesehatan dasar dan kesehatan dasar	100%	2025	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	100%	2025	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	2025	
					Layanan rujukan	-	2025	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	2025	Layanan data dan pengaduan	100%	2025	
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	100%	2025	
					Penyediaan permakanaan	100%	2025	
					Penyediaan sandang	100%	2025	
					Penyediaan perbekalan	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kesehatan			
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	100%	2025	
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	100%	2025	
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	100%	2025	
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	100%	2025	
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ bukti keberadaan keluarga	100%	2025	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	2025	
					Layanan rujukan	-	2025	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	2025	Penyediaan permakanaan	100%	2025	
					Penyediaan sandang	100%	2025	
					Penyediaan tempat penampungan pengungsi	100%	2025	
					Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100%	2025	
					Pelayanan dukungan	100%	2025	



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Ket
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator SPM	Target	Tahun	Indikator SPM	Target	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Psikososial			

3. Anggaran

Sebagai salah satu unsur pendukung yang memegang peranan penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, maka keberadaan sumber pendanaan mutlak diperlukan. Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2023 mendapat alokasi dana melalui APBD dan APBN dengan rincian sebagai berikut :

- Alokasi anggaran satker perangkat daerah **Rp. 4.995.365.500,- (Empat Milliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)**
- Alokasi anggaran Penerapan SPM pada Satuan Kerja Perangkat Daerah **Rp. 957.026.900,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah)**
- Alokasi anggaran Penerapan SPM dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat (APBN-Program Keluarga Harapan) **Rp. 16.924.800.000,-(Enam Belas Milliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**

4. Dukungan Personil

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2025 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 93 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 19 orang, PPPK sebanyak 3 Orang, PPPK Kementerian Sosial (Pendamping PKH, Rehsos, dan TKSK) Sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Orang, dan PPPK PW sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang, dengan mengklasifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

- Pejabat Struktural sebanyak 14 (Empat Belas) Orang, terdiri dari:
 - Eselon II : 1 (Satu) Orang



- Eselon III : 4 (Empat) Orang
- Eselon IV : 2 (Dua) Orang
- Pejabat Fungsional : 16 (Lima) Orang
- b. PPPK sebanyak 3 (Tiga) Orang
- c. PPPK PW sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) Orang
- d. PPPK Kementerian Sosial Tenaga Pendamping sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Orang
 - Pendamping Rehsos : 2 (Satu) Orang
 - Pendamping PKH : 29 (Dua Sembilan) Orang
 - Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) : 1 (Satu) Orang

5. Hasil Capaian

Tabel 4.27

Realisasi SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	2025	Layanan data dan pengaduan	100%	100%	2025	
						Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	-	-	2025	
						Penyediaan permakanan	100%	100%	2025	
						Penyediaan sandang	100%	100%	2025	
						Penyediaan alat bantu	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyediaan perbekalan kesehatan	100%	100%	2025	
						Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	100%	100%	2025	
						Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	100%	100%	2025	
						Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan / Bukti dokumen kependudukan	100%	100%	2025	
						Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	100%	100%	2025	
						Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/ bukti penelusuran keluarga	100%	100%	2025	
						Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	100%	2025	
						Layanan rujukan	100%	100%	2025	
2	Rehabilitasi sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh	100%	100%	2025	Layanan data dan pengaduan	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dasar anak terlantar di luar panti	rehabilitasi sosial diluar panti								
						Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	100%	100%	2025	
						Penyediaan permakanaan	100%	100%	2025	
						Penyediaan sandang	-	-	2025	
						Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	100%	100%	2025	
						Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsia n sosial	100%	100%	2025	
						Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	100%	100%	2025	
						Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependuduka n/ Bukti dokumen kependudukan	100%	100%	2025	
						Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	100%	100%	2025	
						Pemberian pelayanan penelusuran	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						keluarga/ bukti keberadaan keluarga				
						Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	100%	2025	
						Layanan rujukan	100%	100%	2025	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	2025	Layanan data dan pengaduan	100%	100%	2025	
						Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	100%	100%	2025	
						Penyediaan permakanan	100%	100%	2025	
						Penyediaan sandang	-	-	2025	
						Penyediaan alat bantu	100%	100%	2025	
						Penyediaan perbekalan kesehatan	100%	100%	2025	
						Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	100%	100%	2025	
						Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Lanjut Usia	-	-	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						terlantar				
						Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan / Bukti dokumen kependudukan	100%	100%	2025	
						Akses ke layanan kesehatan dasar dan kesehatan dasar	100%	100%	2025	
						Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga	100%	100%	2025	
						Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	100%	2025	
						Layanan rujukan	-	-	2025	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususn ya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	2025	Layanan data dan pengaduan	100%	100%	2025	
						Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Penyediaan permakanaan	100%	100%	2025	
						Penyediaan sandang	100%	100%	2025	
						Penyediaan perbekalan kesehatan	100%	100%	2025	
						Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	100%	100%	2025	
						Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	100%	100%	2025	
						Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	100%	100%	2025	
						Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	100%	100%	2025	
						Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/	100%	100%	2025	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								Ket
		Penerima Layanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	Indikator SPM	Target	Capaian	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						bukti keberadaan keluarga				
						Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%	100%	2025	
						Layanan rujukan	-	-	2025	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	100%	2025	Penyediaan permakanaan	100%	100%	2025	
						Penyediaan sandang	100%	100%	2025	
						Penyediaan tempat penampungan pengungsi	100%	100%	2025	
						Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100%	100%	2025	
						Pelayanan dukungan Psikososial	100%	100%	2025	

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka permasalahan dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :



a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut:

2. Masih terbatasnya alokasi anggaran dalam penerapan SPM sehingga masih ada beberapa sub kegiatan/indikator yang tidak dianggarkan sehingga mempengaruhi capaian keterisian data dalam pelaporan SPM di website.
3. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendamping, khususnya tenaga pendamping di lapangan sehingga kurang optimal dalam melakukan pelayanan.
4. Belum tersedianya sarana rumah singgah yang digunakan sebagai penampungan sementara bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).
5. Sarana dan prasarana yang belum memadai, masih perlu penambahan komputer, laptop, printer dan penambahan ruangan kantor serta pengadaan operasional roda 4 dan roda 2 untuk penanggulangan bencana.
6. Belum optimalnya pengumpulan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

f. Solusi

1. Diusulkan penambahan pegawai khususnya pekerja sosial (Tenaga Pendamping) ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Perlu adanya diklat-diklat atau pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM para pendamping sosial.
3. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana untuk anggaran Tahun 2024 yang akan datang, terutama untuk pembangunan rumah singgah dan sarana prasana lain yang mendukung dalam pencapaian SPM.
4. Mengharapkan kucuran bantuan dana pembangunan yang lebih banyak dari APBD Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.



5. Perlu adanya kerjasama yang lebih intens dengan para TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dalam pengumpulan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

4.7. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam pelaksanaan peningkatan penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Adapun pembagian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

Tabel 4.28

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan
Pendidikan Tahun 2025

NO	NAMA PROGRAM & KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	15.933.102.750	13.349.493.420	83.78	APBD
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	9.106.772.000	8.439.280.893	92.67	APBD
	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	133.805.000	133.805.000	100,00	APBD
	2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.618.800.000	1.618.500.000	99,98	APBD



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

NO	NAMA PROGRAM & KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	54.442.450	-	-	APBD
	4. Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	49.512.100	-	-	APBD
	5. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	105.917.400	104.025.100	98.21	APBD
	6. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	370.863.700	370.674.855	99.95	APBD
	7. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	103.199.400	99.900.000	96.80	APBD
	8. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	155.763.450	74.010.000	47.51	APBD
	9. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	275.000.000	270.000.000	98.18	APBD
	10. Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.921.881.500	1.667.813.131	86.78	APBD
	11. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	51.600.650	-	-	APBD
	12. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	35.000.000	35.000.000	100.00	APBD
	13. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.326.352.850	3.174.496.423	95.43	APBD
	14. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	800.165.500	787.983.870	98.48	APBD
	15. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	104.468.000	103.072.514	98.66	APBD



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

NO	NAMA PROGRAM & KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	210.436.950	105.686.339	50.22	APBD
	1. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	84.777.500	83,758,866	98.80	APBD
	2. Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	47.784.700	-	-	APBD
	3. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	22.434.250	21,927,473	97.74	APBD
	4. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	55.440.500	-	-	APBD
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	3.635.078.000	2.393.434.300	99,30	APBD
	1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	138.771.200	-	-	APBD
	2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	679.200.000	679,200,000	100.00	APBD
	3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	475.144.300	409,467,624	86.18	APBD
	4. Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	92.457.450	91,602,770	99.08	APBD
	5. elatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	120.576.150	119,577,250	99.17	APBD
	6. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	165.536.300	106,968,449	64.62	APBD
	7. Pembangunan Ruang Kelas Baru	360.400.000	350,168,850	97.16	APBD
	8. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	198.463.600	147,403,205	74.27	APBD



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

NO	NAMA PROGRAM & KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				
	9. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	650.050.000	505,410,000	77.75	APBD
	10. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	517.000.000	514,426,018	99.50	APBD
	11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	237.479.000	236,652,526	99.65	APBD
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,980,815,800	2.411.091.888	80.88	APBD
	1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	20.841.400	-	-	APBD
	2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	740.484.800	738,324,400	99.71	APBD
	3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	44.444550	1,125,000	2.53	APBD
	4. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	42.205.150	40,804,643	96.68	APBD
	5. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	51.609.400	51,530,346	100	APBD
	6. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	16.712.050	15,606,268	93.38	APBD
	7. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	120.000.000	-	-	APBD
	8. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	82.500.000	-	-	APBD



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

NO	NAMA PROGRAM & KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6
	9. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	44.204.550	40,257,000	91.07	APBD
	10. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	327.406.000	317,898,287	97.10	APBD
	11.				
2.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	619.540.700	449.571.414	72.56	APBD
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	619.540.700	449.571.414	72.56	APBD
	1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	71.208.000	70,547,000	99.07	APBD
	2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	548.332.700	379,024,414	69.12	APBD



2. BIDANG URUSAN KESEHATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS KESEHATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.29
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Capaian (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
		A. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	3.887.072.000	3.549.813.000	91,32
		1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.887.072.000	3.549.813.000	91,32
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	663.461.000	580.020.000	87,42
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	229.450.000	227.250.000	99,04
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	19.200.000	19.200.000	100,00
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	26.100.000	26.100.000	100,00
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	675.000.000	592.350.000	87,76
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	174.758.500	171.220.000	97,98
7.	Pelayanan Kesehatan	g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	319.500.000	319.500.000	100,00



	Pada Usia Lanjut	pada Usia Lanjut			
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	500.575.250	474.256.500	94,74
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	500.575.250	474.256.500	94,74
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	136.500.000	134.250.000	98,35
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	558.952.000	449.510.000	80,42
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	83.000.000	81.900.000	98,67

3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Adapun pembagian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

Tabel 4.30
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.849.327.454,13	1.740.855.208	94,13	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.849.327.454,13	1.740.855.208	94,13	Dinas PUTR



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Ket
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	6.335.102.748	5,028.281.818	79,37	Dinas Kesehatan
	Penyediaan layanan Kesehatan untuk UMKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.294.602.748	4.987.781.818	79,23	Dinas Kesehatan
		40.500.000	40.500.000	100	Dinkes
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.183.000.000	10.124.740.896	99,43	-
	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.183.000.000	10.124.740.896	99,43	Dinas PUTR
	- Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Perukiman	-	-	-	-

4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.31
Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Perumahan
Rakyat Tahun 2025

URAIAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI
Program Pengembangan Perumahan			



Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota • Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	Rp. 43.500.000,-	Rp. 43.500.000,-
Pengadaan Lahan • Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana (Dana ada pada Dinas PUTR)		Rp. 100.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
TOTAL		Rp. 143.500.000,-	Rp. 143.500.000,-

5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

A. SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan SPM Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Kepulauan Selayar telah menetapkan program dan Kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati Kepulauan Selayar. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.32

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum Tahun 2025

No	Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5
I	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp.599.896.500	Rp.517.665.590



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

		A.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.60.311.500	Rp.59.769.597
			1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 5,001,000	Rp 4,910,300
			2. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp. 54,211,000	Rp 53,768,397
			3. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Rp. 1,099,500	Rp 1,090,900
			4. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Rp.0	Rp.0
		B.	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp.402.010.700	Rp.330.910.981
			1. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Rp. 0	Rp. 0



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

			2. Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 1,349,700	Rp 1,025,640
			3. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Rp. 9,000,000	Rp 9,000,000
			4. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Rp. 0	Rp. 0
			5. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 150,808,900	Rp 84,780,300
			6. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Rp. 90,946,100	Rp 87,987,341
			7. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp. 149,906,000	Rp 148,117,700
		C.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp.137.574.300	Rp.126.985.012
			1. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Rp. 0	Rp. 0
			2. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Rp. 99,743,400	Rp 90,732,813
			3. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Rp. 37,830,900	Rp 36,252,199



B. SUB URUSAN KEBENCANAAN

Tabel 4.33

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan
Kebencanaan Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	54.627.800,-
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	321.914.200,-
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	45.311.700,-
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	33.897.200,-
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Penanggulangan bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	11.000.000,-
				Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	11.290.000,-
				Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	96.668.000,-



C. SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN

Tabel 4.34

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran Tahun 2025

N o.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran	292.942.400	274.455.479
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.213.099.450	Rp.195.364.660
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 27,338,150	Rp 27,014,763
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 92,738,800	Rp 92,436,019
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp. 52,690,600	Rp 52,452,001
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Pelindung Diri	Rp. 24,131,900	Rp 23,461,877
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Rp. 16,200,000	Rp. 0
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Rp. 0	Rp. 0
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp. 0	Rp. 0
		Investigasi Kejadian Kebakaran	Rp.10.429.400	Rp.10.403.395
		Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Rp. 10,429,400	Rp 10,403,395
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahaan Kebakaran	Rp.69.413.550	Rp.68.687.424



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPD)
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025

		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp. 69,413,550	Rp 68,687,424
--	--	--	----------------	---------------

6. BIDANG URUSAN SOSIAL

Program dan kegiatan yang menjadi pendukung tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial antara lain :

Tabel 4.35

Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	915.017.200	912.899.023
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	915.017.200	912.899.023
		Penyediaan Permakanan	880.053.000	878.552.425
		Pemberian Layanan Kedaruratan	15.360.000	15.280.740
		Pemberian Layanan Rujukan	19.074.200	18.567.858
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan	530.000	498.000
B	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	42.009.700	39.609.700
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	70.000.000	67.006.300
		Penyediaan Makanan	17.564.000	17462.000
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	14.575.000	12.281.000
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	9.870.000	9.866.700



BAB V

P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Laporan ini menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 telah berjalan dengan baik, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan, baik dari sisi sumber daya manusia, pendanaan, maupun kondisi geografis wilayah kepulauan. Namun demikian, berbagai capaian yang telah diraih menunjukkan adanya komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan terus berupaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan perencanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, serta peningkatan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 ini disusun. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI

**L
A
M
P
I
R
A
N**

**PENJABARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DARI PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	OPD Terkait	Validasi/ Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Meningkatnya Kapasitas Industri Kecil dan Menengah	7 Paket	Pasimarannu, Pasimasunggu dan Bontomanai	Disperinaker	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi IKM
2	Pembangunan, Peningkatan Kualitas Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	3 Paket	Laiyolo, Bonelambere dan Bontoborusu	Dishub	Meningkatkan aksesibilitas antar pulau
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Penataan Bangunan Pemerintah	Terpeliharanya dan Terawatnya Bangunan Gedung Daerah	3 Paket	Bontokoraang, Batangmata, dan Benteng	Dinas PUTR	Meningkatkan kualitas dan usia pakai gedung untuk fasilitas umum
4	Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan Jaringan Irigasi	Terbangun dan terpeliharanya bangunan pengaman pantai, sungai dan jaringan irigasi	48 Paket	Bontomanai, Bontosikuyu, Bontoharu, Bontomatene, Buki, Pastim, Takabonerate, Pasimasunggu dan Pasimarannu	Dinas PUTR	Mengurangi abrasi dan meningkatkan kualitas jaringan irigasi
5	Pengadaan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	3 Paket	Bontosikuyu	Dishub	Meningkatkan ketersediaan pelengkap jalan di jalan kabupaten
6	Pengelolaan Kebun Raya, Ruang Terbuka Hijau dan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kebun raya, RTH dan taman keanekaragaman hayati yang dikelola	4 Paket	Kab. Kepulauan Selayar	DLH	Meningkatkan keanekaragaman hayati
7	Peningkatan Kapasitas Keolahragaan	Berkembangnya Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	6 Paket	Benteng dan bontosikuyu	Disdikpora	Untuk meningkatkan prestasi olahraga
8	Peningkatan Kapasitas Nelayan	Meningkatnya kapasitas nelayan kecil	7 Paket	Pasimarannu, Bontomatene, Bontomanai, Buki, dan Bontosikuyu	Dinas Perikanan	Ketersediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	OPD Terkait	Validasi/ Keterangan
9	Peningkatan Kapasitas Pekerja/ Lembaga Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kinerja Lembaga kesejahteraan sosial	1 Paket	Kab. Kepulauan Selayar	Dinas Sosial	Meningkatkan pendampingan kesejahteraan keluarga
10	Peningkatan Kapasitas Perikanan Budidaya	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	1 Paket	Bontosai	Dinas Perikanan	Peningkatan produksi perikanan budidaya
11	Peningkatan Ketersediaan Air Minum	Terbangun dan teroptimisasinya sistem penyediaan air minum	4 Paket	Jambuiya, Binanga Sombaiya, Onto dan Appatanah	Dinas PUTR	Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak
12	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	1 Paket	Kab. Kepulauan Selayar	Disperinaker	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
13	Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	58 Paket	Kab. Kepulauan Selayar	Dinkes	Untuk peningkatan penggunaan sarana yang bersih dan aman
14	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	10 Paket	Bontomatene, Bontosikuyu, Bontoharu, Takabonerate, Pasimasunggu	Dinkes	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
15	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan	9 Paket	Bontomanai, Takabonerate, Bontomatene, Bontosikuyu, Benteng, dan Pastim	Disdikpora	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
16	Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Paket	Benteng, Pasimarannu	DLH	Meningkatkan pelayanan persampahan
17	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian/ Peternakan	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian/ Peternakan	35 Paket	Kab. Kepulauan Selayar	Distan KP	Meningkatkan produksi pertanian/ peternakan

18	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian/ Peternakan	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	26 Paket	Kab. Kepulauan Selayar	Distan KP	Meningkatkan produksi pertanian/ peternakan
----	--	---	----------	------------------------	-----------	---

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	OPD Terkait	Validasi/ Keterangan
19	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian	23 Paket	Bontoharu, Bontosikuyu, Bontomatene, Pastim, dan Benteng	DPKP	Peningkatan PSU untuk menunjang fungsi hunian
20	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	3 Paket	Kab. Kepulauan Selayar	DPKP	Mengurangi jumlah RTLH
21	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Gelandangan dan Pengemis	Terpenuhinya kebutuhan permakanan, sandang dan alat bantu sesuai kebutuhan	5 Paket	Kab. Kepulauan Selayar	Dinas Sosial	Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia, serta Gelandangan Pengemis